

# PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999

## **TENTANG**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## DAFTAR ISI

B A B I	KETENTUAN UMUM						
ВАВИ	RUANG LINGKUP						
BAB III	ASAS, VISI DAN  Bagian Pertama  Bagian Kedua  Paragraf I  Paragraf 2	MISI, SERTA TUJUAN  Asas  Visi, Misi dan Tujuan  Visi dan Misi Pembangunan DKI Jakarta  Tujuan Penataan Ruang	12 12 <b>n</b>				
BAB IV	Paragraf I Paragraf 2	STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG Kebijakan Pengembangan Tala Ruang Wilayah Pengembangan Strategi Pengembangan Tata Ruang Strategi Pengembangan Tata Ruang Propinsi Misi dan Stratey;i Pengembangan Tata Ruana Kotamadya	14 15 15				
BAB V	Paragraf I Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Paragraf 5 Paragraf 6 Paragraf 7	POLA PEMANFAATAN RUANG Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi Umum Persebaran Penduduk Kawasan Hijau Kawasan Permukiman Kawasan Ekonomi Prospektif Sistem Pusat Kegiatan Sistem Prasarana Wilayah Intensitas Ruang	19 20 20 2i 22 23 25 31				
	Paragraf I Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Paragraf 5 Paragraf 6 Paragraf 7	Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Katamaciya Umum Persebaran Penduduk Rencana Pengembangan Kawasan Hijau Rencana Pengembangan Kawasan Pennukiman • Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan Umum Rencana Pengembangan Kawasan Industri oan Pergudangan Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegictan Kotamadya	32 32 33 36 40 45				
	Bagian Ketiga I Paragraf I Paragraf 2 Paragraf 3	Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi Umum Arahan Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan <b>Hijau</b> Binaan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan <b>Peuinuknlian</b>	<b>59 J9</b> 60 61				

		Paragraf 5 Arah	an Pemanfaatan	Ruang Ekonomi Prospektif	62
		Paragraf 6 Arah	an Pemanfaatan	Ruang Kawasan Pusat	63
		Kegi	atan		
		Paragraf 7 Arah	an Pengembanga	n Sistem Prasarana Wilayah	63
		Paragraf 8 Arah	an Pengembanga	n Kawasan Prioritas	68
		Paragraf 9 Arah	an Kebijakan Ta	ta Guna Air, Tata Guna	69
		Laut	Tata Guna Uda	ara, dan Tata Guna Ruang	
		Bawa	h Tanah		
		Bagian Keempat Peman	faatan Ruang	Wilay-ah Kotamadya	
		Paragraf 1 Umu	m		73
		Paragraf 2 Peng	elolaan Kawasan	n Hijau Lindung	73
		Paragraf 3 Pema	nfaatan Ruang	Kawasan Hijau Binaan	74
		Paragraf 4 Pema	nfaatan Ruang	Kawasan Permukiman	77
		Paragraf 5 Pema	nfaatan Ruang	Kawasan Permukiman KDB	78
		Reno	a h		
		Paragraf 6 Pema	nfaatan Ruang	Kawasan Bangunan Umum	79
		Paragraf 7 Pema	infaatan Ruang	Kawasan Bangunan Umum	80
		Reno	a h		
		Paragraf 8 Pema	nfaatan Ruajig	Kawasan Campuran	81
		Paragraf 9 Pem	infaatan Ruang	Kawasan Industri dan	82
		Perg	udangan		
		Paragraf 10 Pem	anfaatan Ruang	Sistem Pusat Kegiatan	83
		Paragraf 11 Pen	gembangan Siste	em Prasarana Wilayah	85
		Paragraf 12 Pen	gembangan Kaw	asan Prioritas	96
ВАВ	VI	PENGENDALIAN PE	MANFAATAN	RUANG	
		Bagian Pertama Pedom	an Pengendalian		98
		Bagian Kedua Penga	wasan Pemanfaatar	n Ruang	98
		Bagian Ketiga Penerti	ban Pemanfaatan	Ruang	99
		Bagian Keempat Penday	agunaan Mekanis	me Perizinan	99
ВАВ	VII	HAK, KEWAJIBAN D	AN PERAN SI	ERTA MASYARAKAT	
		Bagian Pertama Hak	Masyarakat		99
		Bagian Kedua Kewa	-	akat	100
		Bagian Ketiga Peran	Serta Masy	arakat	101
		Bagian Keempat Tata	Cara Peran	Serta Masyarakat Dalam	102
		Penat	aan Ruang		
		Bagian Kelima Pemb	erday>aan Peran	Serta Masyarakat	103
ВАВ	V111	SANKSI			104
ВАВ	IX	KETENTUAN PIDANA	Λ		104
ВАВ	X	PENYIDIKAN			105
ВАВ	ΧI	KETENTUAN LAIN-I	AIN		105
BAB	XII	KETENTUAN PERAI	LI H A N		107
BAB	XIII	KETENTUAN PENUT	UP		107



# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN : 1999 NOMOR : 23

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1999

#### TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Daerah Khusus ibukota Jakarta dengan memanfaatkan mang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meniagkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dam pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan mang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilak:sanakan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau^ dunia usaha ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pernermtah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruan^ Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan mang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- d. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan rujukan baru dari tingkat nasional ;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
   (Lembaran Negara Tahim 1974 Nomor 65, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3046);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 1 86) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah dimbah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318) ;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 teniang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430) ;
- 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penamahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
   Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3469) ;
- 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanguaan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
- 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34Q3);
- 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
- 16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
- 18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 lahun 1982 tentang lata Pengaturan Air {Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
- 22. Peraturan Pemermtah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
- 23 PeratTiran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 24. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
- 27. Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Negara Nomor 3776);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

- 30. Kepulusan Presiden Nomor 64 lahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekamo -- Hatta ;
- 3 1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
- 32. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang
  Pengembangan Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
  (JABOTABEK) ;
- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tinskat II :
- 34. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 36. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta :
- 37. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta i^'omor ! 1
  Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan ICepulauan
  Seribu Kotamadya Jakarta Utara ;
- 38. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukoia Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 teniang penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tala Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

## Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, )'ang dimaksud dengan-:

- 1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Gubernur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- **4. Dewan** adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- 6. **Tata Ruang** adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
- 7. **Penata Ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tala ruang.
- 9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek adminsitrasi dan atau aspek fungsional.
- 10. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkail padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
- 11. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 12. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

- 13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 14. **Visi** adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan mjuan yang mgin dicapai serta akan menyatukan koniitmen selumh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota.
- 15. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Wilayah Propinsi dan Kotamadya untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di peringkat Propinsi.
- 16. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai daiam pembangunan Wilayah Propinsi dan Kotamadya berkaitan daiam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan,
- 17. **Strategi Pengembangan** adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Wilayah Propinsi dan Kotamadya yang telah ditetapkan.
- 18. **Ruang Terbuka Hijau** yang selanjurnya disebut RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.
- 19. **Kawasan Hijau Lindung** adalah bagian dan kawasan hijau yang memiliki karaktensnk alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas.
- 20. Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk mjuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.

- 2 L Kawasan Tangkapan Air adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah atau binaan terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai, kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain.
- 22. **Kawasan Permukiman** adalah kawasan yang diarahkan dan dipenmtukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstmkmr dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
- 23. Kawasan Permukiman Koefisien Dasar Bangunan Rendah adalah kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 22 pasal mi yang secara keseluruhan Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20%.
- 24. **Kawasan Ekonomi Prospektif adalah** kawasan yang mempunyai nilai strategis bagi pengembangan ekonomi kota.
- 25. Kawasan Bangunan Umum adalah yang diarahkan dan diperunmkkan bagi pengembangan perkotaan, perdagangan, jasa, pemerintahan dan fasilitas umum/fasilitas sosial beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
- 26. Kawasan Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan Rendah adalah kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 25 pasal ini yang secara keseluruhan Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20%.
- 27. Kawasan Campuran adalah kawasan yang diarahkan dan dipemntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
- 28. **Industn** adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggymaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 29. **Industri Selektif** adalah kegiatan industri yang kriteria pemilihannya disesuaikan dengan kondisi Jakarta sebagai kota jasa, yakni industri yang hemat lahan, hemat air, tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi.

- 30. **Kawasan Industri dan atau Pergudangan** adalah kawasan yang diarahkan dan dipemntukkan bagi pengembangan industri dan atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimal 50%.
- 31. Kawasan Sistem Pusat Kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarkhi terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang berskala kota, regional nasional dan internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala lokal.
- 32. **Kawasan Sentra Primer** adalah kawasan dalam sistem pusat kegiatan yang menurut hirarkhmya termasuk dalam sistem pusat utama.
- 33. **Kawasan Wisata Lingkungan** adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup Imgkungan seperti wisata agro, serta wisata flora dan fauna.
- 34. **Kawasan Wisata Sejarah** adalah kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk dilindungi dan dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.
- 35. Kawasan Wisata Budaya adalah kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai lain yang dianggap penting unmk dikembangkan dan/atau dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.
- 36. **Kawasan Super Blok** adalah kawasan bagian kota yang ditujukan untuk menampung berbagai peruntuk^an campuran (mixed use) berorientasi bisnis dan komersial ; Koefisien Lantai Bangunan tinggi ; memiliki organisasi pengelolaan kawasan tersendiri.
- 37. Intensitas Ruang adalah besaran mang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koe fisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan Ketinggian Bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

- 38. **Koefisiensi Dasar Bangunan** yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota.
- 39. **Koefisiensi Lantai Bangunan** yang selanjutnya disebut KLB adalah besaran ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap laus tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota.
- 40. **KLB rata-rata** adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai
  KLB rata-rata pada suaOi kawasan berdasarkan ketetapan nilai
  KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis.
- 41. **Koefisiensi Tapak Besmen** yang selanjutnya disebut KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dan proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
- 42. **Koefisiensi Daerah Hijau** yang selanjurnya disebut KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
- 43. **Ketinggian Bangunan** yang selanjutnya disebut KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.
- 44. **Kawasan Prioritas** adalah kawasan yang diprioritaskan pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan kota ke arah yang direncanakan dan atau menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.
- 45. **Tipologi Kawasan** adalah penggolongan kawasan sesuai karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan mang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dmamis, dan peralihan.
- 46. **Perbaikan Lingkungan** adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki stmktur hngkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

- 47. Pemeliharaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penumnaii kualitas lingkungan.
- 48. Pemugaran Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan-'atau keindahan/estetika.
- 49. Peremajaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran penyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur tisik dan fungsi.
- 50. Pembangunan Baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.
- 51. Panduan Rancang Kota (Urban Design Ouide/Incsj adalah perencanaan kawasan yang memuat teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, utilitas maupun sarana lingkungan.
- 52 Pedoman Pembangunan Kota (UrbanDevelopment Guidelines) adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian krieria. ketentuan-ketentuan yang komposisi peruntukan 'dan pemanfaatan ruang kawasan, kebutuhan fasilitas yang diperlukan, sena cara pembangunan pembia)aan p e m b a n g u n a n dan sistem pengelolaan kawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Panduan Rancang Kota.

#### B A B il

## RDANC LINGKUP

#### Pasal 2

{1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan kelinia bagian wilayah Kotamadya sampai dengan batas mang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud ayat
  (1) pasal ini berisi :
  - a. asas, visi dan misi pembangunan, serta tujuan penataan ruang Kota Jakarta ;
  - b. kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang ;
  - c. struktur dan pola pemanfaatan ruang ;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang ;
  - e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

#### B A B 111

#### ASAS, VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN

Bagian Pertama

#### Asas

#### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan :
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

## Bagian Kedua

## Visi, Misi dan Tujuan

## Paragraf I

#### Visi dan Misi Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## Pasal 4

Pembangunan Kota Jakarta diarahkan dengan visi mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia }ang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan.

## Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan 3 (tiga) misi utama, yaitu :

- a. membangun Jakarta yang berbasis pada nias\arakai.
- b. mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan ;
- c. mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional.

#### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 6

Tujuan penataan ruang adalah

- a. terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan mang wila> ah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya dukung dan da\a tampunu lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
- $c. \quad terwujudnya \quad keterpaduan \quad dalam \quad penggunaan \quad sumber \quad da \backslash a$   $alam \quad dan \quad sumber \quad daya \quad buatan \quad dengan \quad memperhatikan \quad sebesarbesam > 'a \quad sumberdaya \quad manusia \quad ;$
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya.

### BAB IV

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Bagian Pertama

Kebijakan Pengembangan Tata Ruang

#### Pasal 7

Kebijakan pengembangan tata ruang adalah :

- a. memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional ;
- b. memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor timur, barat, utara dan membatasi pengembangan ke ai-ah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem ;

- c. melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

#### Bagian Kedua

#### Wilayah Pengembangan

#### Pasal 8

Sesuai dengan karkateristik fisik dan perkembangannya, Jakarta dibagi atas 3 (liga) Wila}ah Pengembangan (WP) utama sebagaimana tercantum pada Gambar 01 Lampiran il Peraturan Daerah ini, dengan kebijakan pembangunan untuk masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) sebagai berikut:

- a. Wilayah Pengembangan (WP) Utara terdiri atas :
  - 1. WP Kepulauan Seribu (WP-KS), dengan kebijakan pengembangan diarahkan untuk yang terutama meningkatkan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove.
  - 2. WP Pantai Utara (WP-PU), dengan kebijakan meliputi :
    - a) Pantai Lama :
      - 1) Meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan Jakarta Utara ;
      - 2) Mempertahankan pennukiman nelayan ;
      - 3) Mengembangkan fungsi pelabuhan dan perniagaan.
    - b) Pantai Baru : melalui pengembangan reklamasi yang terpisah secara fisik dari pantai lama dengan kegiatan utama jasa dan perdagangan berskala internasional, perumahan, pelabuhan sena pariwisata.
- b) Wilayah Pengembangan (WP) Tengah terdiri dari :
  - 1. WP Tengah Pusat (WP-TP), dengan kebijakan pengembangan yang diarahkan utnuk pusat pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta pennukiman intensitas tinggi ;

- 2. WP lengah Barat (WP-TB). dengan kebijakan pengembangan untuk pemukiman yang ditunjaiiti dengan pengembangan Sentra Primer Baru Barat :
- 3. WP Tengah Timur (WP-TT), dengan kebijakan pengembangan untuk pusat industri^pergudangan serta permukiman yang ditunjang dengan pengembangan Sentra Primer Baru Timur.
- c. Wilayah Pengembangan (WP) Selatan terdiri atas :

- 15-

- WP Selatan Utara (WP-SU). dengan kebijakan untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas sedang sampai tinggi:
- 2. Vv'P Selatan Selatan (WP-SS). dengan kebijakan untuk pengembangan permukiman secara terbatas dengan penerapan Koefisien Dasar Bangunan rendah untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan resapan air.

## Bagian Ketiga

## Strategi Pengembangan Tata Ruang

### Paragraf 1

## Strategi Pengembangan Tata Ruang Propinsi

## Pasal 9

Untuk mewujudkan visi dan misi pembanguann Daerah, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh adalah :

- a. mengembangkan pemanfaatan ruang secara terpadu dengan pola penggunaan campuaran di kawasan ekonomi prospektif dan sistem pusal kegiatan kota ;
- b. mengembangkan Senira-Sentra Primer Baru di Timur, Barat, dan Utara :
- c. menata kawasan Taman Medan Merdeka untuk bangunan umum pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial ;
- d. mengembangkan kawasan pantai utara sebagai kawasan pusat niaga terpadu skala internasional di masa depan ;
- e. mengembangkan sistem angkutan umum massal sebagai modal angkutan utama antar pusat-pusai kegiatan cian antar bagian-bagian kota;

- f. mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang daerah aliran 13 sungai, situ, waduk, banjir kanal dan lokasi tangkapan air sebagai orientasi pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi Wilayah Pengembangan (WP) tempat badan air tersebut berlokasi ;
- g. mempertahankan dan mengembangkan RTH di setiap wilayah Kotamadya baik sebagai sarana kota maupun untuk keseimbangan ekologi kota ;
- h. mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang berdasarkan tipologi kawasan.

### Misi dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Kotamadya

#### Pasal 10

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka misi pengembangan tata ruang Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat :
  - L Mewujudkan pusat kota jasa terpadu dengan mendorong pembangunan fisik secara vertikal dan terkendali ;
  - 2. Meningkatkan Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa.
- b. Kotamadya Jakarta Utara :
  - Mengembangkan Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari dengan menjaga kelestarian lingkungannya;
  - Mendukung pengembangan kawasan pelabuhan, industri selektif di bagian limur dan pusat niaga terpadu berskala internasional di bagian tengah Pantura.
- c. Kotamadya Jakana Barat:
  - Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan sedang dan tinggi di wilayah bagian barat;
  - Mewujudkan pusat wisata budaya-sejarah, kota tua, sena melanjutkan pengembangan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat kegiaian wilayah.

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Mempertahankan wilayah bagian selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air,
- 2. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga terpadu.

#### e. Kotamadya Jakarta Timur:

- Mengembangkan kawasan permukiman dan mempertahan kan kawasan hijau sebagai resapan air.
- Mengembangkan kawasan industn selektif dan melanjutkan pengembangan Sentra Primer Baru Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah.

#### Pasal 11

Untuk mewujudkan misi pembangunan Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh di masing-masing Kotamadya adalah :

#### a. Kotamadya Jakarta Pusat:

- Mendorong pengembangan kawasan strategis skala Nasional dan Internasional pada kawasan ekonomi prospektif temtama di kawasan sekitar Medan Merdeka, Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati;
- 2. Mengembangkan sarana/fasilitas transportasi yang mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal;
- Mendorong penataan kawasan sekitar daerah aliran 13 sungai dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan tersebut;
- 4. Mengembangkan program peremajaan lingkungan kawasan permukiman kumuh berat dengan peremajaan terbatas imtuk pembangunan rumah susun murah dan penyediaan ruang terbuka hijau.

#### b. Kotamadya Jakarta Utara :

- Mendorong revitalisasi kawasan kota tua sebagai objek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya guna mendorong pengembangan pusat niaga baru bertaraf internasional di kawasan reklamasi;
- Menata kembah kawasan pantai lama secara terpadu dengan pengembangan reklamasi ;
- Mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan perairan dan pulau-pulau di Kepulauan Senbu ;

- 4. Menata kawasan hilir sungai dengan badan air lainnya sebagai upaya pengendali banjir dengan penyediaan permukiman bagi penduduk sekitarnya ;
- 5. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dan laut untuk angkutan penumpang dan angkutan barang secara terpadu dengan sistem transportasi makro.

#### c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Mendorong revitalisasi kawasan kota tua sebagai objek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya;
- Memberikan kemudahan untuk terwujudnya Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa;
- 3. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan sistem jaringan jalan Barat-Timur, serta pembangunan terminal angkutan penumpang dan angkutan barang di Rawa Buaya yang terintegrasi dengan pengembangan sistem angkutan kereta api.

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Mendorong pengembangan kawasan strategis skala nasional dan internasional pada kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kunmgan, Casablanca, Manggarai dan penataan kawasan Blok M Kebayoran Baru ;
- 2. Mengakomodasikan permukiman dengan kepadatan sedang pada wilayah bagian utara Jakarta Selatan dan mempertahankan pengembangan permukiman dengan kepadatan rendah pada wilayah bagian selatan Jakarta Selatan;
- 3. Mendukimg pembangunan jalan lingkar luar ke arah barat dan mengembangkan sarana/fasilitas n-ansportasi yang mendorong pengembangan sistem angkutan umum massal penataan termmal Blok M, serta sistem janngan jalan Selatan-Utara ;
- 4. Mengembangkan kawasan hijau pada daerah aliran 13 sungai dengan pola hijau yang mendukung wisata Imgkungan di wilayah bagian selatan Jakara Selatan serta memanfaatkan badan air untuk atraksi wisata ;

- Mengembangkan pusat pembibitan tanaman dan perikanan serta pengembangan kegiatan penelitian agro dan pengembangan wisata agro.
- e. Kolamadya Jakarta rimur :
  - 1. Mendorong pembangunan Sentra Primer Baru Timur dengan menyelesaikan pembangunan jalan aaeri dan pendukungnya :
  - 2. Mengoptimalkan pengembangan kawasan industri seiekiil" di Pulo Gadung, Ciracas, Pekayon dan membatasi per¬kembangan baru kegiatan industri padaj alan-j alan arteri ;
  - 3. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan sistem jaringan jalan Timur-Barat serta pembangunan terminal penumpang dan barang sebagai titik simpul bagian timur yang menunjang pengembangan pelabuhan dan industri ;
  - 4. Mengembangkan kawasan iiijau pada daerah aliran 13 sungai dan melestarikan kawasan hijau, situ dan rawa untuk pengendalian banjir.

## B A B V

#### STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

Paragraf 1

Umum

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan berdasarkan kebijakan persebaran penduduk, arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang, serta arahan intensitas ruang.
- (2) Kebijakan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijabarkan ke dalam besaran jumlah penduduk dan besaran jumlah tenaga kerja formal berdasarkan daya tampung tempat kerja dengan memperhatikan angka pertambahan penduduk, baik pertambahan alami maupun migrasi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (3) Komponen ulama pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kawasan hijau, kawasan permukiman kawasan ekonomi prospektif, sistem pusat kegiatan, dan sistem prasarana yang digambarkan sebagaimana tercantum pada Gambar 02 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pemanfaatan kawasan-kawasan pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada a)'at (3) pasal ini ditetapkan kawasan prioritas sebagai upaya untuk m e m p e r c e p a t terwujudnya struktur tata ruang yang direncanakan.
- (5) Arahan intensitas ruang dilakukan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan serta kapasitas prasarana >'ang sudah ada dan atau akan terpasang.

#### Persebaran Penduduk

## Pasal 13

Untuk mewujudkan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan kebijakan kependudukan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Jakarta sampai pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 12.500.000 jiwa :
- b. Persebarannya diaralikan sebanyak 10,8% di Kotamad)'a Jakarta Pusat, 17.6% di Kotamadya Jakarta Litara. 23.6% di Kotamadya Jakarta Selatan, dan 22,4% di Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada Gambar 03 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini :
- c. Jumlah tenaga kerja fonnal yang dapat ditampung pada tahun 2010 sebanyak-banyaknya 8.200.000 jiwa.

## Paragraf 3

## Kawasan Hijau

### Pasal 14

(1) Kawasan hijau adalah Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari Kawasan hijau lindung dan hijau binaan.

- (2) Kawasan hijau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi hutan lindung, cagar alam, dan hutan bakau di pantai lama bagian barat Jakarta, serta Taman Nasional Laut di Kepulauan Seribu.
- (3) Kawasan hijau binaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini meliputi:
  - a. RTII berbeniuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum :
  - b. RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga, dan atau keindahan lingkungan ;
  - c. RTH berbentuk hijau budida\'a pertanian.
- (4) Prosentase luas keseluruhan kawasan hijau lindung dan hijau binaan sampai tahun 2010 ditetapkan sebanyak 13,94% dari luas wilayah Kota Jakarta, sebagaimana tercantum pada label 01 Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan hijau lindung dan/atau hijau binaan tidak dapai dirubah fungsi dan peruntukannya.
- (6) Pemanfaatan ruang untuk kawalan hijau binaan dan kawasan hijau lindung untuk skala tingkat propinsi direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 04 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

#### 

- (1) Kawasan peimukiman terdiri atas kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan sedang, dan kawasan pennukiman dengan kepadatan rendah.
- (2) Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai norma 1 (satu) unit rumah yang layak untuk tiap keluarga.
- (3) Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan standar fasilitas umum/fasiltas sosiaL

- (4) Fasihtas Umum/Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Fasilitas Pendidikan ;
  - b. Fasilitas Kesehatan ;
  - c. Fasilitas Peribadatan ;
  - d. Fasilitas Olah Raga/Kesenian/Rekreasi:
  - e. Fasilitas Pelayanan Pemerintah ;
  - f. Fasilitas Bina Sosial ;
  - g. Fasilitas Perbelanjaan/Niaga ;
  - h. Fasilitas Transportasi.
- (5) bangunan campuran pada kawasan pennukiman terdiri dari campuran antara perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga secara terbalas beserta fasilitasnya.

## Kawasan Ekonomi Prospektif

- (1) Kawasan ekonomi prospektif terdiri atas kawasan dengan pemanfaatan perkantoran, perdagangan dan jasa. kawasan campuran, dan kawasan industri dan pergudangan serta kawasan pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) pasal ini bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kemampuan kota Jakarta dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi;
  - b. Memantapkan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan dampak globalisasi ekonomi dan mendorong Kota Jakarta sebagai kotajasa ;
  - c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan ekonomi prospektif terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran perumahan secara vertikal sekaligus untuk meningkatkan kualitas ruang kota :

- d. Meningkatkan alokasi ruang bagi sektor unformal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor foimal besar dari berbagai jenis aktifitas perekonomian ;
- e. Mengembangkan dan menata kawasan ekonomi prospektif di kelima wilayah kota menjadi lokasi yang konduksif untuk berinvestasi bagi penanam rnodal dalam negeri maupun pemodal asing, yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Penataan kawasan pelabuhan dilakukan sebagai bagian integral dari penataan mang kota.
- (4) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif dilakukan melalui :
  - a. Mengembangkan kegiatan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di WP Tengah Pusat untuk skala pelayanan nasional dan internasional, di kawasan Sentra Primer Baru Barat, Sentra Primer Baru Timur, Bandar Baru Kemayoran, dan bagian tengah kawasan Pantura ;
  - Mengembangkan kawasan industri yang dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan dan air, tidak berpolusi dan menggunakan teknologi tinggi;
  - c. Mengembangkan mdustri perakitan yang diarahkan pada daerah industri yang memiliki akses langsung ke jalan arteri di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.
- (5) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif sampai tahun 2010 sebagaimana dmiaksud pada ayat (4) huruf a dan b pasal mi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Gambar 05 Lampiran II Peraturan Daerah im.

## Sistem Pusat Kegiatan

- (1) Sistem pusat kegiatan ditetapkan untuk menunjang Jakarta sebagai kota jasa dan memeratakan pusat kegiatan pemerin tahan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta kegiatan pelayanan.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibedakan berdasarkan kegiatan kawasan sebagai pembentuk struktur mang dan kawasan fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan, pusat perwakilan negara asing, pasat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

- (3) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dan Pusat Kegiatan Utama dan Pusat Kegiatan Penunjang.
- (4) Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat pemenntahabn kotamadya, perkantoran, perdagangan danjasa ;
  - b. Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat pemerintahan kotamadya, perkantoran, perdagangan danjasa ;
  - c. Pusat Niaga Terpadu Pantura sebagai pusat niaga bam di bidang perdagangan, jasa dan lembaga keuangan ;
  - d. Sentra Primer Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik ;
  - e. Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil ;
  - f Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan ;
  - g. Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua sebagai pusat perdagangan pakaian jadi;
  - h. Pusat Niaga Terpadu Bandar Bam Kemayoran sebagai pusat eksibisi dan mformasi bisnis.
- (5) Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi khusus ditetap¬ kan sebagai berikut:
  - a. Pusat Pemerintahan Nasional dan Propinsi di kawasan Medan Merdeka ;
  - b. Pusat Perwakilan Negara Asing di kawasan Kuningan dan
     Jalan MH. Thamrin ;
  - c. Pusat Rekreasi ; Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Kepulauan Seribu, Taman Margasatwa Ragunan, dan Bumi Perkemahan Cibubur;
  - d. Pusat Olahraga di Senayan
  - e. Pusat Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Tjipto
    Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
    Gatot Subroto ;
  - f. Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki;
  - g. Pusat Distribusi Barang di Tanjung Priok, Distribusi Bahan Bakar Minyak di Plumpang, Pasar Induk Bahan Pangan di Kiamat Jati, Cipinang, dan Rawa Buaya.

- (6) Persebaran lokasi pusal kegiatan di tingkat propinsi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Gambar 06 Lampiran I! Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem Pusal Kegiatan Penunjang menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang dan menumt fungsi khusus ditetapkan pada Rencana Pengembangan Sistem Pusal Kegiatan Kotamadya,

#### Sistem Prasarana Wilayah

#### Pasal 18

Sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi prasarana transportasi, sumber air dnn air bcisili. pengendalian banjir dan drainase, irigasi, air limbah, persampahan, prasarana energi dan telekomunikasi.

- (1) Prasarana transportasi yang dikembangkan melipLiti prasarana untuk pejalan kaki dan kendaraan bennoior. angkutan kercia api. angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara yang dikembangkan sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
  - a. tersusunnya suatu jaringan sistem transportasi yang efisiensi dan efektif;
  - b. meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan ;
  - c. terselenggaranya pelayanan angkutan yang aman, tenib.
    nyaman, teratur, lancar dan efisien ;
  - d. terselenggaranya pelaN'anan angkutan barang yang sesuai dengan perkembangan sarana angkutan dan teknologi transportasi angkutan barang ;
  - e. meningkamya keterpaduan baik antara sistem angkutan laut, udara dan darat maupun antar moda angkutan darat;
  - f. meningkamya disiplin masyarakat pengguna jaian dan pengguna angkutan.

- (3) Mengembangkan sistem jaringan dan kapasitas angkutan kereta api melalui pengembangan kereta api layang, pada permukaan maupun jaringan kereta api bawah tanah. Pengembangan jaringan rel dan sistem stasiun kereta api, sebagaimana tercantum pada Gambar 07 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Mengembangkan sistem angkutan jalan melalui pengembangan jaringan jalan sesuai dengan fungsi dan hirarkhi jalan serta tenninal bis antar kota dan terminal bis dalam kota, sebagaimana tercanmm pada Gambar 08 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Menata pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan.
- (6) Melaksanakan penerapan manajemen lalu lintas, termasuk di dalamnya sistem satu arah, pengaturan dengan lampu lalu lintas, dan kebijakan pembatasan lalu lintas pada daerah tertentu sebagaimana tercantum pada Gambar 09 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (7) Membangun gedung-gedung dan atau taman parkir pada pusat-pusat kegiatan untuk menghilangkan parkir pada badan jalan secara bertahap.
- (8) Mengembangkan fasilitas pejalan kaki yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi pcn\ andang cacat.
- (9) Lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasn>a dan pangkalan truk diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri/pergudangan serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri primer.
- Mengembangkan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangan sebagai berikut : kegiatan ekspor/impor, angkutan penum¬ pang dan barang di Tanjung Priok dan Kali Baru, perikanan samudera di Muara Baru, perikanan nusantara di Muara Angke, tradisional dan pelayaran rakyat di Sunda Kelapa, serta pelabuhan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di Muara Angke dan pelabuhan/den-naga khusus wisata ke Kepulauan Seribu di Marina Ancol sebagaimana tercantum pada Gambar 10 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (11) Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini secara lerii.'.egra^i dengan pengembangan jaringan angkutan kereia api dan jaringan angkutan jalan.
- (12) Mengembangkan Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma untuk mendukung fungsi Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi pelayanan lainnya temiasuk pelayanan tamu negara dan pelayanan haji.

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih diarahkan untuk mencapai tujuan :
  - a. berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku ;
  - b. terlaksananya distribusi air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat;
  - c. terlaksananya konservasi air bawah tanah untuk pengendalian penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah, dan kerusakan struktur tanah.
- (2) Pengembangan prasarana sumber air dan sumber air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk sebesar 38,00 m3/detik pada tahun 2010 dengan tingkat konsumsi maksimal sebesar 175 liierorang/hari.
- (3) Pembagian zona pelayanan air bersih, prioritas pelayanan, jaringan pengaliran air baku, lokasi-lokasi Instalasi Pengolahan Air (iPA), dan lokasi-lokasi pusat distribusi air direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 11 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

- (1) Pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase diserahkan untuk :
  - a. Menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air;

- b. Menata daerah aliran atau koridor 13 sungai utama sebagai bagian penting dari unsur kota dengan menjadikannya sebagai orientasi kawasan ;
- c. Mengoptimalkan dan memadukan fungsi jaringan saluran makro, sub makro, mikro, dan lokasi tampungan air (waduk/situ) dalam pengelolaan sistem kawasan.
- (2) Pengembangan prasarana pengendalian banjir ditujukan untuk meningkatkan kapasitas prasarana pengendalian banjir 100 tahunan dengan tetap mempertimbangkan debit minimal aliran mantap beserta kualitasnya.
- (3) Pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud pada a\at (1) pasal ini dilakukan melalui :
  - a. Nonnalisasi aliran 13 sungai ;
  - b. Penyempumaan sistem aliran Kanal Barat dan Cengkareng Drain untuk bagian barat ;
  - c. Penyempumaan sistem aliran Cakung Drain, Sungai Sunter, dan pembangunan Banjir Kanal Timur untuk bagian timur;
  - d. Penyempurnaan dan penambahan sistem polder terutama pada bagian utara.
- (4) Penataan kembali sempadan simgai sejalan dengan penataan sungai menurut fijngsinya yaitu sebagai pengendali banjir, drainase, dan penggelontor.
- (5) Pembangunan, peningkatan dan pengembangan fungsi situsitu sebagai lokasi tempat penampungan air terutama di bagian hulu dan daerah cekungan atau palung secara terbatas.
- (6) Rasio badan air yang mencakup saluran, kali, sungai, banjir kanal, situ, dan waduk tahun 2010 seluas 4.92% dari luas wilayah Kota Jakarta, sebagaimana tercantum pada Tabel 02 Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (7) Pengembangan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) tercantum pada Gambar 12 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran umum.

(9) Badan air berupa saluran, kali, sungai, banjir kanal, situ dan waduk tidak dapat diubah peruntukannya.

#### Pasal 22

Pengembangan prasarana irigasi diarahkan untuk :

- a. Menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian \ ang terdapat di kawasan Timur dan Timur Laut, Barat dan Barat Laut serta Selatan Jakarta ;
- b. Mengintensifkan kegiatan dan hasil pertanian pada lokasi pertanian.

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan sanitasi kota melalui pengaturan fungsi drainase.
- (2) Memperluas pela>anan pengelolaan air limbah sistem perpipaan tertutup melalui pengembangan sistem terpusat di kawasan permukaan, kawasan pusat bisnis, kawasan industri dan pelabuhan serta pengembangan sistem modular dengan teknologi terbaik yang dapat diterapkan.
- (3) Pembagian zona pelayanan pengolahan air limbah direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 13 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (1) Pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dan pengemhan^zan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan prasarana persampahan ditujukan untuk mencapai target penanganan 90% dari jumlah total sampah, yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutannya maupun pengelolaannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),

- (3) Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sampah.
- (4) Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dar beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengar teknologi yang tepat.

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan prasarana energi diarahkan untuk tujuan terlaksananya pemanfaatan energi gas bagi kebutuhan mmah tangga dan transportasi, dan tersedian>'a tenaga listrik yang terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya.
- (2) Pengembangan prasarana energi dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan pelayanan gas melalui jaringan pipa untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, dan perumahan diprioritaskan di WP Tengah dan WP Pantai Utara :
  - b. Pengembangan jaringan distribusi listrik melalui saluran kabel bawah tanah untuk kawasan perkantoran, perdagangan/jasa, industri dan perumahan baru ;
  - c. Memperluas pengadaan gardu induk dan gardu distribusi.

## Pasal 26

Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem telekomunikasi lokal, antar kota dan antar negara dan terjamin keandalannya untuk menunjang Kota Jakarta sebagai kota jasa.

#### Pasal 27

Pengembangan sistem jaringaji listrik, telepon, gas dan air bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, 23, 25, dan 26 secara bertahap diarahkan pada sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu.

#### Intensitas Ruang

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, pembangunan fisik kota didorong secara vertikal melalui penetapan pola intensitas ruang dengan ketentuan :
  - a. Penetapan intensitas ruang di tiap lokasi dan/atau kawasan didasarkan pada pola sitrat lingkungan, da\a dukung dan daya tampung kawasan yang diwujudkan dalam besaran ruang pada nilai KLB dan komponen intensitas lainnya;
  - b. Intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini menggunakan komponen KLB, KDB, KB, KDH dan KTB :
  - c. Penetapan nilai komponen intensitas ruang cdimulai dari penetapan besaran ruang menurut n ilai KLR. sebagaimana tercantum pada Tabel 03, Tabel 04, dan Tabel 05 Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
  - d. Besaran nilai dalam komponen intensitas ruang mengikuti ketetapan nilai KLB yang ditetapkan pada alokasi / kawasan ,
  - e. Batasan nilai KDB maksimal dan KTB maksimal tidak dapat dilampaui dan besaran nilai KDH minimal tidak dapat dikurangi.
- (2) Kawasan-kawasan yang diperkenankan dibangun dengan KLB ^ 10 dan ketinggian bangunan lebih tinggi dari 97 lantai, dibatasi hanya pada kawasan ekonomi prospektifyang pembangunajinya diprioritaskan, yaitu kawasan Bandar Baru Kemayoran, Kawasan Semanggi, pusat bisnis pada bagian tengah Kawasan Pantura serta Sentra Primer Baru Barat dan Sentra Primer Baru Timur.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kotamadya

Paragraf 1

U m u m

#### Pasal 29

Struktur pemanfaatan ruang wilayah tingkat propinsi dijabarkan kt dalam struktur pemanfaatan ruang Kotamadya yang meliputi kebijakan persebaran penduduk, rencana pengembangan kawasan hijau, rencana pengembangan kawasan permukiman, rencana pengembangan kawasan bangunan umum, rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan, rencana pengembangan sistem prasarana, dan rencana intensitas ruang, sejalan dengan visi dan misi pembangunan wilayah propinsi.

## Paragraf 2

#### Persebaran Penduduk

- (1) Untuk mewujudkan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka ditetapkan kebijakan persebaran penduduk dan tenaga kerja di masing-masing **Kotamadya** sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk di Kotamadya Jakarta Pusat pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 1.350.000 jiwa, dengan tenaga kerja formal yang dapat ditampung sebanyak L800,000jiwa ;
  - b. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Utara pada tahun
     2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 2.200.000 Jiwa,
     dengan tenaga kerja formal yang dapat ditampung
     sebanyak 1.800.000 jiwa ;
  - c. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Barat pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 2,950.000 jiwa, dengan tenaga kerja formal yang dapat ditampung sebanyak K400.000jiwa;

- d. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Selaian pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-han\aknya 3,200.000 jiua, dengan tenaga kerja formal yang dapal dilampun\*; sebanyak 1.600.000 jiwa ;
- c. Jumlah penduduk Kotamadya Jakaila l'imur pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 2.800-O00 jiwa. dengan tenaga kerja formal yang dapal dilanipung sebanyak 1.600.00 jiwa.
- (2) Persebaran dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di masing-masing Kotamadya diaralikan sebagaimana tercantum pada Gambar 14, Gambar 15, Gambar I 6. Gambar 17, dan Gambar 18 pada Lampiran U Peraiuran Da^^rah ini.

#### Rencana Pengembangan Kawasan Hijau

- (1) Pengembangan kawasan hijau lindung dilakukan melalui pembinaan kawasan sesuai dengan fungsinya, meliputi : Hutan Angke Kapuk sebagai kawasan hutan lindung. Hutan Kamal Muara sebagai taman wisata alam dan kebun pembibitan mangrove, dan Hutan Muara Angke sebagai cagar alam di Kecamatan Penjaringan ; Pulau Rambut dan Pulau Bokor; Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliraii Tinmr serta pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam Zona Inti dan Zona Pelindung sebagai Taman Nas ional Laul Kepulauan Seribu.
- (2) Kanasan hijau binaan dijabarkan di mas ing-masing Kotamadya sebagai berikut :
  - a. Kotamadya Jakarta Pusat mehpuli :
    - L Mengembangkan jalur hijau di kawasan Gambir, Tanah Abang dan Senayan, jalur hijau berbunga di sepanjang jalan, sungai dan kercia api serta hijau produktif di pekarangan ;
    - Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yajig ada :

- 3. Meniagkatkan ruang terbuka dan jalur hijau di daerah pennukiman padat seperti di Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran yang sekaligus berfungsi sebagai sarana sosialisasi warga
- 4. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman serta pengadaan RTH umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan, di beberapa Kecamatan dan program pembangunan baru khusus di Bandar Baru Kemayoran ;
- 5. Mendorong pengembangan areal budi daya tanaman hias, pertanian dan perikanan \ang berfungsi sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
- 6. Prosentase luas ruang terbuka hijau tahun 2010, di Kotamadya Jakarta Pusat ditargetkan sebesar 0,66% dari luas kota Jakarta ;
- 7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.
- b. Kotamadya Jakarta Utara meliputi :
  - Menata hutan kota dan taman kota di sekitar Waduk
     Pluit dan Waduk Sunter Utara :
  - Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
  - Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai yang dipadukan dengan budi daya perikanan ;
  - 4. Menata RTH pada jalan tol Scdiatmo, Cakung Cilincing dan tol pelabuhan ;
  - 5. Menata bagian hilir muara daerah aliran sungai;
  - 6. Prosentase luas ruang terbuka hijau tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Utara ditargetkan sebesar 3,94% dari luas kota Jakarta ;
  - 7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

- c. Kotamadya Jakarta Barat meliputi:
  - Mengamankan RTH di sekitar kawasan Keselamatan
     Operasi Penerbangan Bandar Udara Soekarno Hatta
     terpadu dengan budi daya pertanian ;
  - Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
  - Mengembangkan penghijauan di Kecamatan Kembangan, kawasan kota tua, dan pusat-pusal kegiatan lainnya;
  - 4. Mengembangkan hutan kota Srengseng sebagai tempat rekreasi alam ;
  - Menata pengembangan kegiatan budi daya tanaman hias di kawasan Rawa Belong ;
  - 6. Prosentase luas RTH tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Barat ditargetkan sebesar 1,68% dari luas kota Jakarta ;
  - 7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan meliputi :
  - Menata ka\\asan resapan air di Kecamatan Pasar Minggu. Cilandak dan Jagakarsa secara terpadu dengan pengembangan kegiatan budi daya. tanaman hias dan pertanian ;
  - Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
  - J, Menbienibaniikan hutan kota di Taman Margasatwa Ragunan, Blok P Kebayoran Baru, Kampus Universitas Indonesia dan sekitar situ-situ lainnya ;

Prosentase luas RTH tahun 2010 di Kotamad)'a Jakarta Selatan ditargetkan sebesar 2,94\*% dari luas kota Jakarta ;

Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

#### e. Kotamadya Jakarta Timur meliputi ;

- Menata kawasan resapan air di selatan jalan lingkar luar terpadu dengan pengembangan kegiatan budi daya tanaman hias dan pertanian :
- Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
- 3- Menata hutan kota di Bumi Perkemahan Cibubur, Situ Rawa Dongkol, Kopasus Cijantung, Mabes TN! di Cilangkap, Halim Perdana Kusuma, Sentra Primer Baru Timur dan Kawasan Industri Pulo Gadung;
- 4. Menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Jakarta-Bogor. Jakarta-Cikanipek, sertajalan-jalan arteri ;
- 5. Prosentase luas RTH tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Timur ditargetkan sebesar 4,72% dari luas kota Jakarta ;
- 6. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

## Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

## Pasal 32

Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 di masing-masing Kotamad\a adalah :

## a. Kotamadya Jakarta Pusat:

- Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan sedang temiasuk pada kawasan sepanjang bantaran sungai dan kereta api ;
- 2. Melanjutkan peremajaan lingkungan kumuh berat melalui pembangunan vertikal;
- 3. Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khusus pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah di Menteng, Gambir, dan Sawah Besar;
- 4. Mempertahankan fungsi pelumahan pada kawasan mantap ;

- 5. Melengkapi fasilitas umum di kawasan pennukiman :
- 6. Prosentase luas kawasan premukiman ditargetkan sebesar 2,95% dari luas Kota Jakarta.

### b. Kotamadya Jakarta Utara ;

- Mengembangkan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat;
- 2. Mendorong pengembangan kawasan permukinian secara vertikal dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meniadai ;
- Mengembangkan pemukiman masyarakat nienengahatas pada areal reklamasi pantai utara ;
- 4. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan :
- 5. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua^ersejarah dan Pelabuhan Sunda K'';lapa sekaligus melestarikan lingkungannya :
- Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang di Kepulauan Seribu ;
- 7. Mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan hidup di kawasan Pantai Uama dan pulau-pulau yang dihuni di Kepulauan Seribu ;
- 8. Mempertahankan fungsi perumahan padci kawasan mantap ;
- 9. Melengkapi fasilitas umum di kawasan kawasan permukiman ;
- 10. Mengembangkan kawasan pemukiman KCDB rendah pada kawasan pantai lama ;
- 11. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 7,98% dari luas Kota Jakarta dan pennukiman KDB rendah ditargetkan sebesar 0,43% dari luas Kota Jakarta

#### c. Kotamadya Jakarta Barat :

- !. Mendorong pengembangan kawasan pennukiman secara vertikal dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- 2. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Kembangan, Kalidercs, Cengkareng, dan Kebon Jeruk ;
- 3. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang terutama sekitar kawasan Stasiun Angke, Stasiun Duri dan sepanjang jalur kereta api;
- 4. Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat secara terbatas, terutama di Kali Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk, Rawa Buaya, Kali Anyar, Kedaung Kali Angke.
- Mempertahankan ilmgsi perumahan pada kawasan mantap ;
- 6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan kawasan pennukiman ;
- 7. Mendorong pengembangan kawasan pennukiman KDB rendah beserta fasilitasn3'a terutama pada pembangunan baru ;
- 8. Mengarahkan pengembangan kawasan pennukiman KDB rendah di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Soekamo-Hatta dengan upaya mengembangkan budidaya tanaman hias dan pertanian produktif;
- Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 9,62% dari luas Kota Jakarta dan pennukiman KDB rendah ditargetkan sebesar 0,26% dari luas Kota Jakarta.

### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Mempertahankan pelestarian kawasan pemiuknnan di Kebayoran baru ;
- 2. Mengembangkan kawasan permukiman secara vertikal melalui peremajaan terutama pada lokasi yang kondisinya kumuh berat;
- 3. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan pennukiman kumuh sedang dan ringan ;
- 4. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Jagakarsa, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, dan Cilandak ;
- Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasar mantap;
- 6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan-kawasan permukiman ;
- 7. Mengembangkan kawasan pemiukiman KIDB rendah di daerah sebelah selatanjalan Imgkar luar ;
- 8. Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah yang ada di daerah sebelah utara lingkar luar khusus di Cilandak, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Pesanggrahan ;
- 9. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 7,67 % untuk kawasan non resapan air dan 0,93 % unmk kawasan resapan air dari luas Kota Jakarta, sedangkan kawasan permukiman KDB rendah ditargetkan sebesar 0,85 % untuk kawasan non resapan air dan 2,43 % untuk kawasan resapan air dari luas Kota Jakarta.

## e. Kotamadya Jakarta Timur ;

- Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur seperti di Kawasan Rawamangun, Kampung Ambon, Pondok Kelapa, Pondok Kopi dan Duren Sawit;
- Mengembangkan kawasan permukiman bam terutama di Kecamatan Cakung, Duren Sawit, dan Cipayung ;
- Mengembangkan perbaikan lingkungan p^da kawasan permukiman kumuh sedang dan rmgan ;.
- 4. Mengembangkan kawasan pennukiman bam di Cakung, Kramat Jati dan Pulo Gebang ;

- 5. Mengembangkan peremajaan hngkungan secara terbatas pada kawasan permukiman kumuh berat melalui pembangunan rumah susun murah ;
- 6. Mempertahankan fungsi pemmahan pada kawasan mantap;
- 7. Melengkapi fasilitas umum di kawasan pemiukiman ;
- 8. Mengembangkan kawasan permukiman KDB rendah pada daerah bagian selatan jalan lingkar luar;
- 9. Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah yang ada di daerah sebelah Utara hngkar luar khusus di Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Cipayung ;
- 10. Mendorong pengembangan kawasan pemiukiman KDB rendah beserta fasilitasnya temtama pada kawasan pembangunan bam secara vertikal ;
- 11. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 9,06% dari luas Kota Jakarta, sedangkan kawasan permukiman KDB rendah ditargetkan sebear 2,20% untuk kawasan non resapan air dan 0,44% untuk kawasan resapan air dari luas Kota Jakarta.

# Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan Umum

- a. Kotamadya Jakarta Pusat;
  - L Pengembangan Kawasan Bangunan Umum :
    - a) Mengembangkan fasilitas perdagangan temtama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanarmya ;
    - b) Mendorong pengembangan kawasan multifungsi
       yang bertaraf internasional di Gambir, Tanah
       Abang, Sawah Besar, Senen dan Kemayoran ;
    - c) Mengarahkan pengembangan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan lingkungan dengan menyediakan fasi litas umum yang memadai;
    - d) Mendorong pengembangan bangunan umum yang terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar sungai;

- e) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditargetkan sebesar 1,98% dan luas Kota Jakarta.
- 2. Pengembangan Kawasan Bangunan Urnium KDB rendah ;
  - a) Membatasi pengembangan kawasan bangunar umum di Senayan dan Cempaka Putih ;
  - b) Prosentase luas kawasan bangunan umum KDB rendah ditargetkan sebesar 0,18% dari luas Kota Jakarta.
- 3. Pengembangan Kawasan Campuran :
  - a) Mengembangkan kawasan campuran yang lebili nyaman dengan mengefektifkan penggunaan lahan pada berbagai lokasi di Kecamatan Senen, Kemayoran, Johar Bam dan Tanah Abang ;
  - b) Mengembangkan lokasi pariwisata multi-strata di kawasan Kebon Sirih dan sekitarnya ;
  - c) Mengembangkan industn mmahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup ;
  - d) Mengembangkan bangunan campuran sepanjang jalan arteri dan kolektor, meliputi Jalan Matraman Kramat Raya ~ Senen dan sepanjang Jl. Cideng KH. Mas Mansyur secara terbatas ;
  - e) Prosentase luas kawasan campuran KDB rendah ditargetkan sebesar 0,73% dari luas Kota Jakarta.
- b. Kotamadya Jakarta Utara ;
  - 1. Pengembangan Kawasan Bangunan L'mum :
    - a) Mengembangkan fasilitas perdagangan temtama
       untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan
       jangkauan pelayanamiya ;
    - b) Mengembangkan Pantai Utara di sub-kawasan tengah dengan pola pengembangan nnultifungsi/ Super Blok dengan fasihtasnya yaag bertaraf internasional;
    - c) Menala fungsi kawasan kota lua/bersej ^rah untuk mendukung kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan pariwisata ;

- a) Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya ;
- b) Mengembangkan kawasan multifungsi bertaraf intennasional secara terpadu di kawasan ekonomi prospektif, meliputi Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Kawasan Segitiga Kuningan, dan Casablanca;
- c) Membatasi pengembangan perkantoran, perdagangan, dan jasa sepanjang jalan arteri di luar kawasan ekonomi prospektif;
- d) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditargetkan sebesar 1,69% dari luas Kota Jakarta.

## 2. Kawasan bangunan umum KDB rendah :

- a) Mengembangkan kawasan bangunan umum KDB rendah secara terbatas terutama pada daerah sebelah selatan Jalan Lingkar Selatan ;
- b) Prosentase luas kawasan bangunan umum KDB rendah ditargetkan sebesar 0,90% dari luas Kota Jakarta.

## 3. Pengembangan kawasan campuran :

- a) Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan da\a tampung penduduk yang dikembangkan secara vertikal pada beberapa lokasi di sekitar Jalan Lingkar Selatan :
- b) Mengembangkan industri rumahan yang tidak berpolusi dan benva\\"asan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c) Mengendalikan perkembangan kawasan campuran terutama pada daerah sebelah selatan dari Jalan Lingkar Luar;
- d) Prosentase luas kawasan campuran KDB rendah ditargetkan sebesar 0,52%o untuk kawasan non resapan air dan 0,1%) untuk kawasan resapan air.

- e. Kotamadya Jakarta Timur:
  - L Pengembangan kawasan bangunan umum :
    - a) Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya;
    - b) Menata kawasan ekonomi prospektif sebagai pusat pengembangan wilayah timur;
    - c) Mengembangkan bangunan umum di sepanjang jalan arteri secara terbatas di luar kawasan ekonomi prospektif;
    - d) Mengembangkan Sentra Primer Baru Timur yang bertaraf internasional ;
    - e) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditergetkan sebesar 1,55% dari luas Kota Jakarta,
  - 2. Pengembangan kawasan bangunan umum KDB rendah :
    - a) Mengembangkan bangunan umum KDB rendah terbatas pada kawasan Pulo Mas, I lalim Perdanakusuma, Taman Mini Indonesia Indah. Mabes TNI Cilangkap dan Cibubur;
    - b) Prosentase luas kawasan bangunan umum K[)B rendah ditargetkan sebesar 1,72 % dari luas kota Jakarta.
  - 3. Pengembangan kawasan campuran :
    - a) Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan daya tampung penduduk yang dikembangkan secara vertikal ;
    - b) Prosentase luas kawasan campuran diproyeksikan sebesar 0,49%o dari luas Kota Jakarta.

Rencana Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan

Pasal 34

Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan di masing-masing Kotamadya adalah ;

a. Kotamadya Jakarta Pusat :

Merelokasi industri menengah dan besar dari pusat kota.

#### b. Kotamadya Jakarta Utara :

- Membatasi kegiatan industri pada kawasan yang sudah ada di Penjaringan, Kelapa Gading dan Cilincing;
- Mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing;
- 3. Mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengantisipasi perkembangan pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa ;
- 4. Merelokasi kawasan pergudangan dari kawasan kota tua ;
- Prosentase luas kawasan industri dan pergudangan diproyeksikan sebesar 3,75% dari luas Kota Jakarta.

### c. Kotamadya Jakaita Barat ;

- Mengarahkan pengembangan industri selektif di Cengkareng dan Kalideres ;
- Mengarahkan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri dan perdagangan jasa ;
- 3. Mengarahkan pengembangan kawasan industri di Kapuk dan Kalideres untuk menampung kegiatan industri yang bukan pada peruntukannya ;
- 4. Merelokasi kawasan pergudangan dari kawasan kota tua ;
- Prosentase luas kawasan industri dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,86%o dari luas Kota Jakarta.

# d. Kotamadya Jakarta Selatan ;

- 1. Mengembangkan industri kecil yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup :
- 2. Merelokasi kegiatan industri menengah dan besar ke luar wilasah Jakarta Selatan secara bertahap ;
- 3. Prosentase luas kawasan industri selektif dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,01 % dan luas Kota Jakarta.

## e. Kotamadya Jakana Timur :

- 1. Mengembangkan industri besar di kawasan industri Pulo Gadung, Cakung, Ciracas dan Pekayon untuk jenis industri yang berteknologi tinggi, tidak berpolusi, hemat lahan dan hemat air serta berwawasan lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- 2. Mengarahkan industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan hidup dengan bangunan bertingkat di kawasan industri Pulo Gadung :

- 3. Mcnf'arahkan kcuiatan industri vaue berlokasi di dekat pemiukiman haii^a untuk jenis-jenis industri kecil dan tidak polutif terutama di Penggilingan, Duren Sawit dan Kramaljati ;
- 4. Mengarahkan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri dan perdagangan jasa terutama sepanjang jalan Cakung Cilincing, jalan Lingkar Luar, Cakung dan Pulo Gadung :
- 5. Prosentase luas kawasan industri dan pergudangan ditargetkan sebesar 2,03% dari luas Kota Jakarta.

Rencana pengembangan kawasan hijau sebagaimana disebut pada Pasal 3 i, rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana disebut pada Pasal 32, rencana pengembangan kawasan bangunan umum sebagaimana disebut p^da pasal 33, dan p e n g e m b a n g a n kawasan industri dan sebagaimana disebut pada Pasal 34. digambarkan ke dalam struktur rencana tata ruang masing-masing K o t a m a d y a sebagaimana tercantum pada Gambar 19. Gambar 20. Cjambar 2 i. Gambar 22, dan Gambar 23 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Kotamadya

- (1) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut kegiatan sebagai pembentuk struktur i'uang dan menurut kegiatan pelayanan yang berfungsi khusus di Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan besaran kegiatan dan jangkauan pelayanan di bawah pusat kegiatan utama.
- (2) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di masing-masing Kotamadya adalah :

#### d. Koiamadva Jakarta Selatan:

- \. Sistem Pusal Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Blok M Kebayoran Baru, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Tebet, Pasar Manggarai, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Cilandak, Pasar Minggu dan Mayestik;
- 2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit MMC. Rumah Sakit Pondok Indah dan lauuawati. Rekreasi Situ Babakan. Situ Mangga Bolong dan Lapangan Olah Raga Lebak Bulusr

## e. Kotamadya Jakarta Timur :

- Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Jatinegara, Pasar Ra\\amangun, Pasar Kelender, Pasar Pulo Gadung. Pasar Bumng Pramuka dan Pasar Cakung;
- 2. Sistem pusat penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Rekreasi Pulo Mas dan laman Bunga Cibubur, Pacuan Kuda Pulo Mas, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit UKL Rumah Sakit Haji. Rumah Sakit Islam, Lapangan Olah Raga Rawamangun dan Halim.
- (3) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Peimnjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). di masing-masing Kotamadya sebagaimana tercantum pada Gambar 24, Gambar 25, Gambar 26. Gambar 27, dan Gambar 28 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 8

# Rencana Pengembangan Prasarana

## Pasal 37

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi di masingmasins Kotamadva adalah ;

#### a. K.olaniadva Jakarta Pusal

- Sistem Pusal Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Cikini, Bendungan Hilir, Roxi. Sabang. Cempaka Putih dan Pai Merah :
- 2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Ria Senayan, Lapangan Olah Raga Menteng, Rawasari dan Ro\i. Rumah Sakit St. Carolus dan PGI Cikini.

### b. Kotamadya Jakarta Utara :

- Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Koja, Pasar Kelapa Gading, Pasar Cakung. Pasar Pluit, Pasar Mandara Permai dan Pasar Cilincing;
- 2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan temtama pada lokasi Kantor Walikota Rumah Sakit Koja, Cilincing dan Atma Jaya dan Pasar Ikan Muara Karang.

## c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Asem Reges, S. Parman, Pasar Grogol. Pasar Tanjung Duren. Pasar Cengkareng dan Kali Deres;
- 2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Pasar Bunga Tanaman Hias Rawa Belong, Pasar Induk Bahan Pangan Rawa Buaya, Rumah Sakit Harapan Kita, Sumber Waras dan Husada.

- a. Di Kotamadya Jakarta Pusat, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi -stasiun KA dan lokasi tenninal bus direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 29 Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- b. Di Kotamadya Jakarta Utara, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi stasiun KA, lokasi tenninal bus, terminal angkutan barang, pelabuhan udara dan pelabuhan laut direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 30 Lampiran U Peraturan Daerah ini ;
- c. Di Kotamadya Jakarta Barat, jaringan arteri dan kolektor, jaringan rel KA. lokasi stasiun KA. lokasi terminal bus dan tenninal angkutan barang direncakan sebagaimana tercantum pada Gambar 31 Lampiran II Peraturan Daerah ini:
- d. Di Kotamadya Jakarta Selatan, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi stasiun KA dan lokasi tenninal bus direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 32 Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- e. Di Kotamadya Jakarta Timur, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi stasiun KA, lokasi tenninal bus dan terminal angkutan barang direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 33 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- Rencana pengembangan prasarana sumber air dan air bersih, prasarana pengendalian banjir, prasarana sanitasi dan pengolahan sampah, prasarana dan energi, prasarana masing-masing wilayah telekomunikasi di Kotamadya mengikuti arahan pengembangan prasarana dimaksud pada tingkat propinsi.

## Rencana Intensitas Ruang

## Pasal 38

(1) Rencana intensitas ruang tingkat propinsi yang dijabarkan ke dalam rencana intensitas ruang di masing-masing Kotamadya adalah sebagai berikut:

- a. Rencana hitensitas Ruang di Kotamadya Jakana Pusat dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu ;
  - L KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :
    - a) kawasan pennukiman di Kecamatan Menteng. Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran dan Sawah Besar;
    - kawasan bangunan umum di Kecamatan Tanah
       Abang, Cempaka Putih, Kemayoran dan Sawah
       Besar;
    - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Tanah Abang. Menteng dan Cempaka Putih ;
    - d) kawasan campuran di Kecamatan Kemayoran dan Sawah Besar.
  - 2. KLB rata-rata 2.0 diarahkan pada :
    - a) kawasan permukiman di Kecamatan Tanah Abang. Menteng, Senen, Cempaka Putih, Kemayoran dan Gambir;
    - b) kawasan bangunan umum di seluruh Kecamatan ;
    - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Tanah Abang;
    - d) kawasan campuran di selumh Kecamatan .
  - 3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :
    - a) kawasan bangunan unnnn di Kecamatan Senen, Cempaka Putih, Johar Bam, Kemayoran, Sawah Besar, dan Gambir;
    - b) kawasan campuran di Kecamatan Senen, Cempaka Putih, Sawah Besar dan Gambir.
  - 4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada
    - a) kawasan permukiman di Kecamatan Tanah Abang, Menteng, Sawah Besar dan Kemayoran ;
    - b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Tanah
       Abang, Menteng, Senen, Cempaka Putih,
       Kemayoran dan Gambir;

- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Tanah Abang, Kcma} oaran dan Cempaka Putih ;
- d) kawasan campuran di Kecamatan Kemayoran dan Menteng.
- 5. KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10.0 diarahkan pada kawasan Bandar Baru Kemayoran.
- Rencana Intensitas Ruang di Kotamadya Jakarta Utara
   dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitij :
  - 1. Kl.B rata-rata 1.0 diarahkan pada :
    - a) kawasan pennukiman di Kecamatan Penjaringan.
       Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan
       Cilincing: .
    - b) kawasan pennukiman di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing ;
    - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan
       Penjaringan. Tanjung Priok. Kelapa Gading, dan
       Cilincing ;
    - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Penjaringan. Tanjung Priok, Kelapa Gading, dan Cilincing ;
    - e) kawasan campuran di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing ;
    - O kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, Koja. Kelapa Gading, dan Cilincing.
  - 2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada ;
    - aj kawasan permukiman di Kecamatan Pademangan, Koja, Kelapa Gading dan Cilincing ;
    - b) kawasan bangunan umum di Kecamatan lanjung Priok :
    - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Koja;
    - d) kawasan campuran di Kecamatan Padcmangan :

- e) kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing.
- 3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :
  - a) kawasan permukiman di Kecamatan Penjaringan,
     Pademangan, Tanjung Priok. Koja, Kelapa Gading dan Cilincing;
  - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pademangan dan Cilincing ;
  - c) kawasan banguan umum di Kecamatan Penja¬ringan, Pademangan. Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading dan Cilincing :
  - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Kelapa Gading dan Cilincing;
  - e) kawasan campuran di Kecamatan Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priok ;
  - f) kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja dan Cilincing.
- 4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :
  - a) kawasan pemiukiman di Kecamatan Penjaimgan, Koja dan Pademangan ;
  - b) kawasan bangunan umum di Kecamatan
     Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Koja
     dan Kepala Gading ;
  - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Pademangan, Koja dan Kelapa Gading ;
  - d) kawasan campuran di Kecamatan Penjaringan.
- 5. KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan pusat kegiatan utama Pantura.
- c. Rencana Intensitas Ruang di Koumadya Jakarta Barat dibagi dalam 5 (lima) tmgkatan KLB yaitu :

### 1. KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebon Jemk,
  Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol
  Petamburan, Pai Merah dan Tambora ;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan dan Pai Merah ;
- c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan dan Pai Merah ;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan dan Pai Merah;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, dan Grogol Petamburan;
- f) kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Cengkareng dan Kalideres.

## 2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebon Jemk, Kalideres, Grogol Petamburan, Tambora dan Taman Sari ;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Grogol Petamburan dan Pai Merah ,
- c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan ;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan. Cengkareng, Kalideres dan Grogol Petamburan ;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Grogol Petamburan, Pai Merah, Tambora dan Taman Sari ;
- f) kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Cengkareng dan Kalideres ;
- g) kawasan pemukiman KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk.

- 3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :
  - a) kawasan permukiman di Kecamatan Kembangan, Cengkareng, Kaldieres dan Taman Sari ;
  - b) kawasan pemiukiman KDB rendah di Kecamatan Kebon Jeruk ;
  - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng dan Grogol Petamburan ;
  - d) kawasan campuran di Kecamatan ICebon Jeruk, Kembangan, Grogol Petamburan, Pai Merah dan Taman San.
- 4. KLB rata-rata 4,0 diaralikan pada ;
  - a) kawasan permukiman di Kecamatan Tambora :
  - b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kembangan, Grogol Petamburan, Pa! Merah, Tambora dan Taman Sari;
  - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kembangan ;
  - d) kawasan campuran di Kecamatan Kembangan, Grogol Petamburan dan Taman Sari ;
- KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan Sentra Primer Bam Barat.
- d. Rencana Intensitas Ruang di Kotamadya Jakarta Selatan dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu :
  - 1. KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :
    - a) kawasan permukiman di selumh Kecamatan ;
    - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pesanggrahan, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Pancoran, dan Tebet;
    - c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan kecuali Kecamatan Tebet;
    - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Mamj>ang Prapatan dan Setiabudi ;
    - e) kawasan campuran di selumh Kecamatan.

#### 2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Bam, dan Tebet;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pesanggrahan, Cilandak, dan Jagakarsa ;
- c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan kecuali Kecamatan Pasar Mmggu dan Setiabudi;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, dan Jagakarsa ;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Pancoran.

## 3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Pasar Minggu, dan Setia Budi;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, dan Jagakarsa;
- c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan kecuali Kecamatan Pasar Minggu ;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, Jagakarsa dan Setia Budi.
- e) kawasan campuran di Kecamatan Pesanggrahan, Cilandak dan Setia Budi.

# 4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Bam dan Setia Budi;
- kawasan bangunan umum di Kecamatan
   Kebayoran Lama, Pancoran, Kebayoran Bam,
   Setia Budi dan Tebet;

- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Mampang Prapatan, Pancoran dan Setia Budi ;
- d) kawasan campuran di Kecamatan Kebayoran Lama dan Setia Budi.
- 5. KLB lebih besar dari 5,0 diarahkan pada : kawasan bangunan umum di Kecamatan Kebayoran Bam dan Setia Budi;
- e. Rencana Intensitas Ruang di Kotamadya Jakarta Timur dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu :
  - L KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :
    - a) kawasan permukiman di selumh Kecamatan ;
    - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Kramat Jali, Makasar dan Cakung ;
    - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, Duren Sawit. Matraman, Pulo Gadung dan Cakung ;
    - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Makasar, Duren Sawit, Pulo Gadung dan Cakung ;
    - e) kawasan campuran di Kecamatan Makasar, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan Cakung ;
    - O kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas dan Cakung.
  - 2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :
    - a) Kawasan permukiman di Kecamatan Cipayung, Kiamat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman,
    - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Cipayung ;
    - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Cipayung, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sav/it Pulau Gadung dan Cakung ;

- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Cipayung Pulo Gadung dan Cakung ;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Kramat Jati, Makasar, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman dan Cakung :
- O kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Pulo gadung dan Cakung.

### 3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Duren Sawit, Pulo Gadung dan Cakung ;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Cakung ;
- c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan Cakung;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Makasar dan Pulo Gadung ;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Jatinegara,
  Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan
  Cakung;
- f) kawasan industn/pergudangan di Kecamatan Cakung.

## 4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Cakung ;
- b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kramat Jati, Jatinegara, Mati aman, Cakung dan Pulo Gadung;
- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Makasar dan Pulo Gadung ;
- d) kawasan can^uran di Kecamatan Jatinegara,
  Matraman, dan Pulo Gadung.
- KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan Sentra Primer Bam Timur.

- (2) Rencana intensitas ruang di masing-masing Kotamadya tercantum pada Gambar 34. Gambar 35, Gambar 36, Gambar 37, dan Gambar 38 Lampiran U Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana intensitas ruang Kotamadya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

### Bagian Ketiga

### Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

### Paragraf I

## U m u m

### Pasal 39

Untuk mewujudkan struktur pemanfaatan ruang wilavah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pola pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. arahan pengelolaan kawasan hijau lindung ;
- b. arahan pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan :
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman ;
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan ekonomi prospektif;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan pusat kegiatan ;
- f arahan pengembangan sistem prasarana wilayah ;
- g. arahan pengembangan kawasan prioritas ;
- h. arahan kebijakan tata guna air, tata guna udara, dan tata guna ruang bawah tanah.

## Paragraf 2

## Arahan Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung

## Pasal 40

(1) Pemanfaatan ruang di pulau-pulau dan perairan laut yang tennasuk dalam Zona Inti dan Zona Pelindung dalam Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dibatasi hanya untuk kegiatan pemeliharaan habitat, tumbuhan, satwa dan plasma nutfah', kegiatan pendidikan dan penelitian.

- (2) Pemanfaatan ruang di Pulau Rambut, Pulau Bokor, dan pulau-pulau lain yang ditetapkan sebagai cagar alam di luar Zona Inti dan Zona Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di Kecamatan Kepulauan Seribu dibatasi hanya untuk kegiatan pendidikan dan penelitian serta pembinaan kelestarian lingkungaii dan fungsi alami pulau tersebut.
- (3) Pemanfaatan ruang di Hutan Lindung Angke/Kapuk diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan habitat, tumbuhan, satwa dan plasma nutfah, kegiatan pendidikan dan penelitian, kebun bibit mangrove dan kegiatan wisata alam secara terbatas.

## Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan hijau binaan diatur berdasarkan penetapan fungsi dari setiap kawasan RTH sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hijau binaan dilakukan melalui :
  - a. Pemeliharaan dan pengadaan baru RTH dengan pengembangan penggunaan tanaman keras berkanopi besar;
  - b. Pemeliharaan dan pengadaan hutan kota baru di setiap wilayah Kotamadya ;
  - c. Pengembalian fungsi RTH yang telah terkonversi;
  - d. Pengembangan jalur hijau pada sempadan sungai,
     sepanjang jalan kereta api dan di bawah jaringan listrik
     tegangan tinggi;
  - e. Pengembangan RTH dilingkungan yang penggunaannya dapat sekaligus sebagai sarana olah raga, rekreasi, serta taman lingkungan perumahan ;

-61

- f. Pengadaan RTH baru pada peremajaan kawasan-kawasan terbangun ;
- g. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan RTH.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan cagar buah-buahan Condei diarahkan untuk pengembangan potensin)a sebagai penghasil buah-buahan khas setempat dalam rangka pengembangannya seba"ai kawasan wisata aero.

### Paragraf 4

Arahan Pemanfaatan Ruang Ka\>asan Permukiman

- (1) Pemanfaatan ruang untuk kawasan pennukiman dilakukan dengan pembangunan perumahan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kondisi kawasan, yaitu ;
  - a. pembangunan baru pada lingkungan siap bangun baik yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun maupun yang berdiri sendiri ;
  - b. pemugaran terhadap bangunan dan lingkungan
     perumahan bersejarah atau berciri khas budaya tertentu :
  - c. pemeliharaan lingkungan perumahan terhadap kawasan yang sudah mantap ;
  - d. perbaikan lingkungan terhadap kawasan perumahan kumuh kategori ringan ;
  - e. peremajaan terhadap kawasan perumahan kumcih kategori sedang dan berat dengan membangun Rumah Susun Murah/Sederhana.
- (2) Pembangunan rumah susun murah/sederhana \an^ dikaitkan dengan peremajaan pada kawasan perumahan kumuh kategori sedang dan berat, diprioritaskan pada kawasan yang terletak di sekitar jalan lingkar dalam serta yang berada di bagian lingkar luar yang memiliki akses tinggi terhadap jaringan jalan arteri tersebut, serta pada kawasan perumahan yang terletak berdekatan atau berada di dalam kawasan ekonomi prospektif.

- (3) I.okasi pengenil^angan kawasan perudiahan sebagaimana dimaksud pada aj-ai (I) diarahkan sebagaimana tercantum pada Gambar 39 Lampiran II Peraturan Daerah ini
- (4) Urutan prioritas pembangunan rumah susun sederhana diarahkan sebagaimana tercantum pada Gambar 40 lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembangunan perumahan pada kawasan konservasi atau kawasan resapan air dibatasi dengan kepadatan rendah disertai upaya mempenahankan fungsi resapan air, khususnya kawasan di sebelah selatan jalan lingkar luar.
- (6) Perubahan fungsi pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang telah mantap, dan memiliki nilai sejarah, budaya serta UJsitektur, khas, sopcili kawasan Mctucng dan Kchn\baru dikendalikan secara khusus.

# Arahan Pemanfaatan Ruang Ekonomi Prospektif

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa wajib memperhitungkan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktifitas yang berlangsung pada kawasan tersebut.
- (2) Pembangunan fasilitas perdagangan'jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengetiibangan golongan usaha kecil.
- (3) Pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan daiam rangka meningkatkan integrasi pembangunan kawasan ekonomi prospektif dibarengi dengan penyediaan ruang-ruang untuk golongan usaha skala kecil tennasuk rektor informal dan ruang-ruang terbuka bersifat umum.
- (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan campuran pemmahan dan bangunan umum dapat berbentuk pita atau superblok dengan proporsi ruang untuk perumahan berkisar 3 5% sampai 65% dari total besaran ruang yang dibangun sesuai dengan kategori pola sifat lingkungan setempat.

- (5) Kawasan industri dan pergudangan wajib dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah.
- (6) Penataan kawasan pelabuhan dilakukan sebadai bagian integral dari penataan ruang kota.

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pusat Kegiatan

#### Pasal 44

Pemanfaatan ruang pada sistem pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa khususnya pada pusal bisnis dan pusat perbelanjaan diarahkan sebagai berikut;

- a. Dilaksanakan berdasarkan Panduan Rancang Kota dan Pedoman Pembangunan Kota ;
- b. Dapat diisi dengan kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan perumahan, baik secara horizontal maupun vertikal ;
- c. Pembangunan per persil dilakukan berdasarkan Panduan Rancang Kota dan Pedoman Pembangunan Kota dengan memperhitungkan keseimbangan antara manfaat ruang dan kewajiban penyediaan prasarana dan fasilitas umum ;
- d. Pengembangan prasarana untuk pejalan kaki;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate tnanu^cmenlj ;
- f. Pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan.

## Paragraf 7

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 45

Pengembangan prasarana transportasi diarahkan melalui :

- a. Peningkaian integrasi antara nioda angkutan laut dan udara dengan moda angkutan darat dilakukan dengan menyediakan fasiltias penghubung (inierface).
   layanan angkutan yang terpadu ;
- b. Peningkatan pelayanan angkutan umum, dilakukan dengan upaya optimalisasi, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru ;
- c. Pengembangan sistem angkutan umum kereta api dimulai dari peningkatan jaringan pelayanan yang sudah ada yaitu jalur lingkar (loop line) dan jalur tengah (central line), serta lintasan baru diprioritaskan pada jalur Fatmawati Kota dan Duri Kemayoran dengan jaringan bawah tanah secara proporsional :
- d. Peningkatan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dilakukan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan ruang jalan, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru serta kualitas lingkungan hidup ;
- e. Pembangunan fasilitas jalan kaki >'ang memadai untuk menumbuhkan buda} a berjalan kaki terutama untuk jarak perjalanan yang relatif pendek ;
- f Peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui peningkatan disiplin lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan, peningkatan pengawasan kelaikan kendaraan, serta pembangunan fasi litas-t asi litas yang mendukung keselamatan berlalu lintas.

Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih bagi masyarakat diarahkan melalui :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air bersih jaringan pipa melalui:
  - Pembangunan instalasi, produksi dan jaringan pipa distribusi yang baru untuk memperluas pelayanan ;
  - Peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air bersih ;•

- 3. Rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran ;
- 4. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sumber air baku ;
- 5. Meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan air bersih.
- b. Pembangunan hidrant umum dan terminal air pada kawasan yang berkepadatan penduduk tinggi dan rawan air bersih namun belum terlayani jaringan pipa distribusi;
- c. Perluasan pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih alternatif melalui reservoir alam dan buatan :
- d. Perlindungan dan rehabilitasi terhadap resevoir air berupa waduk dan situ-situ dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber air di hulu serta kapasitas tampung dan bangunan reservoirnya;
- e. Penyeimbangan kebutuhan dan penyediaan airtanah dengan membangun pengisian airtanah pada kawasan pengguna airtanah yang banyak, baik secara alamiah maupun melalui penggunaan teknologi ;
- f Perluasan pembangunan sumur resapan dan merintis pengisian reservoir air bawah tanah ;
- g. Pengurangan penggunaan airtanah pada kawasan yang sudah terlayani jaringan pipa distribusi air bersih ;
- h. Pengendalian penggunaan airtanah, terutama cii kawasan resapan air dan rawan airtanah ;
- Perlindungan terhadap kaw^asan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase diarahkan melalui:

a. Peningkatan kapasitas dan daya tampung prasarana pengendalian banjir 100 tahunan untuk Banjir Kanal barat menjadi 500 m3/deiik, peningkatan daya tampung Cengkareng

Drain menjadi 510 m3/delik, pembangunan saluran penghubung sungai Sunter-Cakung dengan kapasitas 220 mS/detik, dimulainya pelaksanaan Banjir Kanal Timur dengan kapasitas 370 m3/detik, optimalisasi dan nonnalisasi 13 sungai utama serta pengembangan sistem polder pada kawasan rendah ;

- b. Penataan kembali kawasan sempadan sungai bebas dari bangunan dan menjadikan sungai sebagai bagian dari halaman depan (front yard);
- c. Peningkatan kapasitas saluran makro, sub makro, saluran mikro dan lokasi penampungan air yang ada melalui pengerukan secara berkala ;
- d. Pembangunan dan pengembalian fungsi situ-situ dan waduk sebagai lokasi tempat penampungan air ;
- e. Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana/sarana pengendalian banjir dan penataan sungai terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya.

## Pasal 48

Pengembangan prasarana irigasi diarahkan melalui :

- a. Perlindungan bangunan jaringan irigasi dengan memper¬ hatikan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran ;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang belum memenuhi standar teknis.

## Pasal 49

Pengembangan prasarana air limbah diarahkan melalui :

- a. Perluasan pelayanan sistem sewerage (perpipaan tertutup) melalui pengembangan sistem terpusat dan sistem modular dengan menggunakan teknologi terbaik yang dapat diterapkan.
- b. Pengembangan fungsi waduk sebagai lokasi instalasi pengolahan air limbah ;
- c. Pengelolaan air limbah dengan sistem daur ulang menyeluruh di Kawasan Pantura ;

- d. Pemanfaatan areal R FH untuk instalasi pengolahan air limbah bawah tanah :
- c. Pengembalian fungsi drainase sebagai saluran air hujan secara bertahap yang disertai pengelolaan air limbah.

Pengembangan prasarana persampahan diarahkan melalui :

- a. Pengembangan lokasi baru bagi kegiatan sanitar\ 1 andfill yang melayani wilayah bagian barat dan bagian selatan ;
- Penjajagan pengembangan teknik sanitary landfill di laut yang terpadu dengan reklamasi untuk melayani wila)ah bagian utara;

Pengembangan teknologi transfer stalion untuk meningkatkan kapasitas daya angkut sampah ke lokasi TPA :

- d. Pengembangan penggunaan incinerator untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA ;
- e. Perluasan penggunaan teknik komposling dan allernalif teknologi lainnya dalam pengolahan sampah khususnya pada sebagian WP Selatan-Utara dan WP Selatan-Selatan :
- f Pembangunan recycle plant untuk mengurangi volume r^ampah yang akan diangkut ke TPA khususnya di WP leiigah Pusat ;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan persampahan melalui pelaksanaan konsep Rcc> eling (daur ulang) Reused (penggunaan kembali) dan Reduced (pengurangan sampah);
- h. Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah, baik di sumber sampah, dalam proses pengangkutan maupun di TPA :
- i. Pengembangan lokasi pengumpulan sampah B3 sebagai bagian dari sarana pengelolaan sampah 83 serta nieningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman sampah B3 ;
- j. Pencegahan lokasi-lokasi tempat penampungan sementara (TPS) di pinggir sungai untuk menghindari pencemaran sungai.

Pengembangan prasarana energi diarahkan melalui :

- a. Pengembangan pelayanan gas dengan penambahan jaringan pipa gas bawah tanah serta dengan memperbaiki dan meningkatkan pemeliharaan jaringan yang ada di kawasan industri, pennukiman, dan komersial terutama di WT Tengah;
- b. Pengembangan pela^'anan energi bahan bakar minyak bagi kawasan industri, pennukiman, komersial dan transportasi :
- c. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik, melalui kabel bawah tanah terutama untuk kawasan perkantoran, komersial, industri dan pennukiman bam ;
- d. Pembangunan stasiun-stasiun pompa bahan bakar gas (SPBG)
  baru, terutama untuk melayani angkutan umum Bus. minibus
  dan taksi;
- e. Pengembangan pengadaan energi listrik melalui pembangkit tenaga listrik PLTU Muara Karang dan Tanjung Priok ke sistem jaringan inter koneksi Jawa -- Bali.

## Pasal 52

Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan melalui :

- a. Peningkatan penggunaan sistem digital, baik dengan sistem kabel maupun dengan gelombang mikro ;
- b. Pengembangan sistem jaringan sentral telepon fiber optik,
   jaringan kabel bawah tanah, sistem telepon bergerak dan
   koridor frekuensi bagi pelanggan tetap dan fasilitas umum :
- c. Perluasan distribusi warung telekomunikasi dan telepon umum ke seluruh wilayah kota.

## Paragraf 8

## Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas

# Pasal 53

(1) Pengembangan kawasan prioritas di tingkat propinsi ditetapkan berdasarkan besar dan strategisnya kontribusi yang diberikan dalam pembangunan kota untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota jasa internasional.'

(

- (2) Kawasan Prioritas untuk wilayah KotamadNa ditetapkan berdasarkan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi pembangunan wilayah Kotamadya yang bersangkutan.
- (3) Kawasan tingkat propinsi, meliputi:
  - a. Kawasan Pantura ;
    - 1) Perbaikan kualitas lingkungan Pantai Lama ;
    - 2) Reklamasi perairan laut Teluk Jakarta seluas ± 2.700 Ma.
  - b. Penataan koridor 13 sungai :
    - Penataan kembali dimensi dan ruang koridor 13 sungai, sebagaimana tercantum Gambar 41 pada Lampiran Peraturan Daerah ini .
    - 2) Menata kembali kawasan pinggir suneai dengan merubah orientasi bangunan dan lingkungan dan saluran bantaran kali bebas dari bangunan.
  - c. Pembangunan Banjir Kanal Timur:

Diupayakan pemanfaatannya selain fungsi sebagai prasarana pengendali banjir, juga untuk kepentingan tranportasi dan rekreasi ;

d. Koridor Sistem Angkutan Umum Massal.

## Paragraf 9

Arahan Kebijakan Tata Guna Air, Tata Guna Li»u(, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Ruang Bawah Tanah

- (1) .Arahan kebijakan tata guna air meliputi kebijakan terhadap tala guna air permukaan dan tata guna aiilanah.
- (2) Pengembangan penatagunaan aii- permukaan dilakukan melalui penetapan peruntukan air sungai, situ dan waduk meliputi:
  - a. Air sungai, ditetapkan untuk :
    - 1. sumber air baku air minum ;
    - 2. kegiatan usaha perkotaan ;
    - 3. keperluan wisata dan transportasi;
    - 4. pengembangan perikanan, pertanian dan peternakan.

- b. Situ-situ ditetapkan untuk perikanan dan rekreasi.
- . Waduk ditetapkan untuk pengendalian banjir dan pengolahan air limbah.
- (3) Arahan pengembangan penatagunaan air permukaan adalah sebagai beriktu :
  - a. Meningkatkan kualitas dan debit air sungai dilakukan secara terpadu mencakup daerah aliran sungai (DAS) dengan berpedoman kepada peruntukan air sungai tersebut;
  - b. Stasiun pemantauan kualitas dan debit air sungai ditempatkan di lokasi-loaksi yang sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Peningkatan kualitas dan volume air situ dan waduk dilakukan secara terpadu mencakup daerah tangkapan airnya dengan berpedoman kepada peruntukan air situ dan atau waduk.
- (4) Untuk sumber air kebutuhan Kota Jakana yang berada di luar wilayah administrasi Kota Jakana. kebijakan yang ditempuh adalah melakukan koordinasi dengan instansi dan pihakpihak yang terkait serta ikut berupaya memelihara kelestarian sumber-sumber air.
- (5) Arahan pengembangan dan pemeliharaan yang ditempuh untuk memelihara dan memperbaiki kondisi permukaan ainanah dangkal maupun ainanah dalam adalah :
  - a. Pengawasan secara ketat pada pengambilan langsung airtanah dan terutama ainanah dalam ;
  - b. Mengendalikan secara ketat dewaiting dalam pembangunan ruang bawah tanah ;
  - c. Melakukan injeksi air tanah dalam di zona kritis di bagian Utara dan zona rawan di bagian tengah Kota Jakana ;
  - d. Mengawasi realisasi kewajiban pembuatan sumur resapan terutama di bagian selatan kota Jakarta ;
  - e. Mencegah merembesnya limbah cair ke dalam tanah.

- (1) Arahan kebijakan lata guna laut meliputi konservasi kawasan-kawasan hijau lindung, rehabilitasi, mem¬ pertahankan kualitas air laut, dan mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan.
- (2) Arahan pengembangan tata guna laut adalah sebagai berikut:
  - a. konservasi bagi kawasan-kawasan hijau lindung sesuai ekosistemnya khususnya di wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu ;
  - Rehabilitasi untuk memulihkan tatanan ekosistem yang telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran khususnya wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu ;
  - c. Mempertahankan kualitas air laut yang memenuhi baku mutu untuk pelestarian sum berdaya terumbu karang besena ekosistemn>a ,
  - d. Mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan secara terpadu untuk berbaga. kepentingan dengan mempertimbangkan da\a dukung -lingkungannya seperti perhubungan, rekreasi dan olah raga, jalur pipa min)ak bawah laut serta kabel telekomunikasi bawah laut.

- (1) Arahan kebijakan tata guna udara meliputi : pemanfaatan ruang udara untuk atmosphere kehidupan, transportasi, telekomunikasi, transmisi listrik, bangunan tinggi, bangunan atas tanah, bangunan atas air dan ruang pandang.
- (2) Arahan pengembangan tata guna udara adalah sebagai berikut;
  - a. Arahan pemanfaatan ruang udara untuk atmosphere kehidupan dilakukan dengan meny «bimbangkan pengembangan hutan kota dan program penghijauan kota dengan besarnya beban emisi gas hasil bakar dan atau perubahan iklim mikro ;
  - b. Pemanfaatan ruang udara untuk transponasi dilakukan dengan pengamanan jalur keselamatan operasi penerbangan sekitar bandar udara ;

- c. Pemanfaaian ruang udara untuk telekomunikasi antara lain untuk frekuensi radio, gelombang micro wave dan sellular;
- d. Pemanfaatan ruang udara untuk transmisi listrik antara lain untuk jaringan listrik tegangan tinggi dan jaringan distribusi listrik ;
- e. Pemanfaatan ruang udara untuk bangunan tinggi pelaksanananya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f Pemanfaatan ruang udara untuk bangunan atas tanah antara lain untuk jalan layang, simpang susun, kereta layang dan jembatan pen\eberangan orang ;
- g. Pemanfaatan ruang udara untuk bangunan atas air antara lain untuk jembatan atas sungai, anjungan dan cottage ;
- h. Pemanfaatan ruang udara untuk ruang pandang terhadap bentang alam atau unsur buatan yang dijadikan orientasi kawasan.

## Pasal 57

- (!) Arahan kebijakan tata guna ruang bawah tanah meliputi pemanfaatan ruang untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu.
- (2) Pengembangan tata ruang bawah tanah meliputi pengembangan lahan di bawah areal kepemilikan pribadi dan areal kepemrlikan umum.
- (3) Arahan pengembangan tala guna ruang bawah tanah di bawah lahan areal kepemilikan pribadi dilakukan berdasarkan ketentuan bangunan dan batasan intensitas bangunan vanu pemanfaatannya terutama untuk parkir, gudang ruang komersil dan ruang untuk kepentingan militer besena ruang fasilitas penunjangnya.
- (4) Arahan pengembangan tata ruang bawah tanah di baw-ah lahan areal kepemilikan umum adalah sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan untuk , pengembangan sistim prasarana transportasi yang diarahkan untuk pengembangan Sistim Angkutan Umum Massal beserta fasilitas penunjangnya ;

- b. Pemanfaaian unmk jalur penghubung dalam sislini transportasi kendaraan umum dan pejalan kaki besena fasilitas penunjangnya ;
- c. Pemanfaatan untuk pengembangan jaringan utilitas dan sanitasi.
- (5) Pembangunan mang bawah tanah hams memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar ba ngunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya.
- (6) Pengaturan yang lebih rinci tentang bangunan bawah tanah akan diatur tersendiri.

#### Bagian Empat

#### Pemanfaatan Ruang Wilayah Kotamadya

#### Paragraf 1

 $U\ m\ u\ m$ 

# Pasal 58

Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kotamadya diwujudkan dengan pemanfaatan ruang di masing-masing Kotamadya yang terdiri atas :

- a. Kawasan Hijau Lindung ;
- b. Kawasan Hijau Binaan ;
- c. Kawasan Permukiman ;
- d. Kawasan Pemiukiman KDB Rendah ;
- e. Kawasan Bangunan Umum ;
- r Kawasan Bangunan Umum KDB Rendah ;
- g. Kawasan Campuran ;
- h. Kawasan Industri dan Pergudangan ;
- i. Sistem Pusat Kegiatan ;
- j. Sistem Prasarana Wilayah :
- k. Kawasan Prioritas.

## Paragraf 2

# Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung

## Pasal 59

(1) Kawasan Hijau Lindung terdapat pada wilayah K-otamadya Jakarta Utara di Kepulauan Seribu **dan** Kecamatan Penjaringan.

- (2) Pengelolaan kawasan hijau lindung di Kepulauan Seribu dan Penjaringan dilakukan dengan :
  - a. Meieslariakan ekosistem terumbu karang dan hutan bakauAnangrove sebagai bagian dari kegiatan pariw isala ;
  - b. Penyelamatan keutuhan potensi keanekaragaman hayati,
    baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumber
    daya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetik¬
    nya:
  - c. Pembatasan kegiatan fisik dan kegiatan pelayaran sekitar daerah yang dilindungi.
- (,^) PengeU)laan kawasan hijau lindung hutan bakau mangrove di bagian darat Kecamatan Penjaringan dilakukan dengan :
  - a. PencegaJian pencemaran air laul sekitar hutan bakau :
  - b. Pembalasan pembangunan fisik terutama yang langsung dapat menimbulkan pencemaran air laul sekitar hutan bakau ;
  - c. Pengendalian kegiatan reklamasi pantura terutama pada kawasan sekitar hutan bakau ;
  - d. Pelestarian vegetasi mangrove dengan kegiatan rehabilitasi tanaman sekitar hutan bakau ;
  - e. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Taman Nasional Laut dan pembangunan daerah penyangganya.

## Paragraf 3

# Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan

## Pasal 60

Pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat meliputi:
  - Penghijauan dengan tanaman yang berbiji pada koridor habitat burung di Kemayoran, lapangan Banteng, Monas, Sudirman Thamrin dan Senayan ;
  - 2. Penghijauan jalur jalan, sungai dan kereta api dengan jenis tanaman berbunga sesuai dengan wilayahnya ;

- Penaiaan areal pemakaman dan penanaman polion pelindung >'ang berfungsi sebagai peneduh ;
- 4. Melaksanakan refungsionalisasi (aman pada 30 lokasi seluas ± 9 lia ;
- >. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat penduduk, terutama di Karang Anyar, Galur, Kebon Kosong, Pctojo Selatan, Johar Baru. Duri Pulo, Tanah Tinggi dan Kampung Rawa;
- 6. Pengadaan ruang terbuka hijau untuk budi daya ikan hias ;
- 7. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.
- b. Kotamdaya Jakarta Utara meliputi ;
  - 1. Penanaman hutan bakau di kawasan pantai dan pelestarian hutan bakau di Angke :
  - Pembangunan taman kota dengan penanaman pohon produktif di sekitar Waduk Pluit. Waduk Sunter dan Waduk Kemayoran ;
  - 3. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman \ang berfungsi sebagai peneduh ;
  - 4. Penanaman pohon pelindung di Jalan Tol Scdiatmo dan jalan Tol Cakung-Cilincing serta jalan tol menuju pelabuhan ;
  - 5. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai :
  - 6. Melaksanakan refungsionalisasi taman, pada 26 lokasi seluas ± 12.17 Ha
  - 7. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan pennukiman padat, terutama di ka\sasan Pademangan. Penjaringan, dan Cilincing.
- c Kotamadya Jakana Barat meliputi ;
  - Intensifikasi pertanian di sekitar Kawasan Kleselamatan
     Operasi Penerbangan Bandar Udara Soekamo hfana ;
  - i^cmbangunan taman kota dan penanaman pohon pelindung di Sentra Primer Baru Barat, Tambora dan 'Taman Sari ;
  - 3. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
  - 4. Pengembangan hutan kota di Srengseng untuk kegiatan wisata ;

- 5. Penataan kawasan Rawa Belong sebagai pusat tanaman hias;
- 6. Melaksanakan reiungsionalisasi taman pada 14 lokasi seluas  $\pm$  3,44 Ha :
- 7. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan meliputi :

- Pengembangan budi daya tanaman hias dan tanaman produktif terutama di Kecamatan Pasar Minggu, Jagakarsa dan Cilandak;
- 2. Pengembangan hutan kota di taman Margasatwa Ragunan dan Blok P Kebayoran Baru ;
- Pengembangan areal budi da>a perikanan terutama di Situ Manggabolong, Situ Babakan. Situ Ulujami, Situ Kalibata, dan Situ Pancoran ;
- 4. Penanam pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
- Pengembangan hutan kota di sekitar Situ Babakan. Situ Manggabolong dan Situ Kampus UI Jagakarsa;
- 6. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 18 lokasi seluas + 7,63 Ha ;
- 7. Pengadaan lahan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan pemuikiman padat penduduk ;
- 8. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.

## c. Kotamad\a Jakarta Timur meliputi :

- Pengembangan program pertanian pada wilayah bagian selatan jalan lingkar luar di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas dan Cipayung;
- Peningkatan budidaya tanaman hias di kawasan TMII. taman bunga Cibubur dan tanaman buah-buahan di Condet;
- 3. Penanaman pohon pelindung di area! pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
- Peningkatan hutan kota di Rawa Dongkel, Kopasus Cijantung, Pacuan Kuda Pulomas. Kawasan industri Pulo Gadung, Mabes TNI Cilangkap, Kompleks Halim Perdana Kusuma;

- 5. Pengembangan Taman Kota untuk rekieasi alam di sekitar situ kelapa Dua Wetan, Rawa Dongkel Baru, Rorotan, Tipar, Waduk Pulomas, Bujana Tirta Penggilingan dan Rawa Bening,
- 6. Pembangunan taman kota antara lain di kawasan Sentra Primer Bam Timur dan kawasan pemukiman baru ;
- 7. Peningkatan penghijauan pada jalur jalan antara lain di jalan Tol Jagorawi, Tol Cikampek & jalan arteri serta di sepanjang daerah aliran sungai yang menjorok ke dalam kota (Ciliwung, Cipinang, Sunter, Cakung, Cakung Dram, Buaran & Jati Kramat);
- 8. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 16 hikasi ± 2,26 Ha;
- 9. Pengadaan lahan unmk mang terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk.

## Paragraf 4

# Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Pasal 61

Pemanfaatan mang kawasan permukiman di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat;
  - Pembangunan mmah susun di kawasan permukiman kumuh berat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi di Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Kelurahan T^anah Tinggi. Kampung Rawa, dan Jati Bundar;
  - Perbaikan bangunan mmah dan Imgkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui program Tribma ;
  - Pelestarian bentuk dan fungsi bangunan dalam rangka pemugaran di daerah Menteng.
- b Kotamadya Jakarta Utara ;
  - Pembangunan mmah susun sederhana pada kawasan permukiman kumuh berat di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kali Bam, Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjaringan;
  - Pembangunan mmah susun untuk masyarakat berpeng hasilan menengah dan tinggi pada areal reklamasi Pantai Utara, Kelapa Gading dan Penjaringan ;

- 3. Perbaikan lingkungan pennukiman di Kepulauan Seribu ;
- 4. Perbaikan bangunan mmah dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui Program Tribina.

## c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Perbaikan lingkungan pada daerah kumuh temtama kawasan stasiun Angke, stasiun Duri dan sepanjang jalur jalan kereta api ;
- 2. Pembangunan mmah susun sederhana pada permukiman kumuh berat di Kali Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk, Rawa Buaya, Kali Anyar, Kedaung Kali Angke dan lainlain :
- 3. Pembangunan kawasan permukiman bam.

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Peremajaan kawasan kota dengan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi di Setia Budi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan dan Pesanggrahan ;
- Pembangunan mmah susun sederhana di kawasan padat penduduk temtama di Kecamatan Tebet, Pancoran, Kebayoran Lama dan mampang Prapatan ;
- Perbaikan lingkungan pada kawasan yang relatif padat penduduk dan rawan banjir, di Kecamatan Pancoran, Tebet dan Mampang Prapatan.

# e. Kotamadya Jakarta Timur:

- Pembanguann kawasan permukiman bam di Kecamatan Kramat Jati dan Duren Saw'it;
- Perbaikan lingkungan pada permukiman padat di selumh Kecamatan ;
- Pembangunan dan peningkatan mmah susun di Cipinang Besar Utara, Kelender, Pondok Kelapa, Bidara Cina. Pulo Gadung, dan Pisangan.

## Paragraf 5

# Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman KDB Rendah

# Pasal 62

Pemanfaatan mang kawasan permukiman KDB rendah di masingmasing Kotamadya adalah ; a. Kotamadya Jakarta Pusat:

Di Kotamadya Jakarta Pusat tidak terdapat program pemanfaaian ruang kawasan pennukiman KDB rendah.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

Pengendalian pembangunan pemmahan baru di Pademangan. Cilincing, dan Penjaringan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

Pengendalian pembangunan bam di kawasan ICeselamatan Operasi i'enerbangan Bandara Sukanio Hatta.

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

Pengendalian pembangunan pemiukiman di Kecamatan Pasar Mmggu, Cilandak, dan Kecamatan Jagakarsa.

e. Kotamadya Jakarta Timur:

Pengendalian pembangunan pennukiman di Kecamatan Cipa}'ung, Ciracas, Kramat Jati, dan Pasar Rebo.

## Paragraf 6

## Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum

## Pasal 63

Pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum di masing-masing Kotamadya adalah :

- a Kotamadya Jakarta Pusat:
  - 1. Penataan kawasan sentra primer perdagangan Tanah Abang dan Sawah Besar. Senen dan Kemayoran dengan memperhatikan pedagang ekonomi lemah :
  - 2. Penibangunan perkantoran dan pusat eksibisi di kawasan Bandar Baru Kemayoran ;
  - 3. Penataan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa disepanjang koridor Sudinnan-Thamrin melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki yang terpaciu dengan pengembangan Sistem Angkutan Umum Masai Jakarta pada koridor Blok M Kota,

## b. Kotamadya Jakarta Utara :

Penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Yos Sudarso untuk menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok.

- c. Kotamadya Jakarta Barat:
  - L Penataan kawasan kota tua di Kecamatan Tambora dan Taman Sari dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki, sarana perdagangan danjasa pariwisata ;
  - Pembangunan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat perdagangan dan perkantoran serta pusat pemerintahan Kotamadya.
- b. Kotamadya Jakarta Selatan :

Pengembangan kawasan niaga terpadu di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Kawasan Segitiga Kuningan, dan Casablanca.

- e. Kotamadya Jakarta Timur:
  - Penataan kawasan perdagangan dan jasa di Kampung Melayu, Jatinegara dan Kramat Jati ;
  - Pembangunan Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat perdagangan dan perkantoran serta pusat pemerintahan Kotamadya.

## Paragraf 7

# Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum KDB Rendah

## Pasal 64

Pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum KDB di masingmasing Kotamadya adalah :

# a. Kotamadya Jakarta Pusat :

Pembatasan fungsi bangunan umum di kawasan Senayan hanya untuk mendukung sebagai pusat pemerintahan, olah raga dan rekreasi.

#### b. Kotamadya Jakarta Utara :

Pengembangan bangunan umum KDB rendah di Kamal, Kapuk, Pademangan, Kelapa Gading, dan Cihnciag.

c Kotamadya Jakarta Barat:

Penataan bangunan umum KDB rendah di koridor sungai Pesanggrahan dan Kali Grogol melalui program Prokasih dengan orientasi sungai sebagai muka bangunan.

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Pengembangan bangunan umum KDB rendah di Pondok Pinang ;
- Pengendalian pelaksanaan pembangunan bangunan umum di Kecamatan Jagakarsa, Cilandak, dan Pasar Minggu.

## c. Kotamadya Jakarta Timur:

Pengembangan bangunan umum dengan KDB rendah **di** Kawasan Pulo Mas. Taman Mini, Cilangkap, dan Cibubur.

## Paragraf 8

## Pemanfaatan Ruang Kawasan Campuran

Pasal 65

Pemanfaatan mang kawasan campuran di masing-masing Kotamadya adalah :

## a. Kotamadya Jakarta Pusat:

- Peningkatan intensitas bangunan dan perbaikan lingkungan disertai dengan penyediaan inlrastmktur yang memadai di Johar Bam, Tanah Abang, Senen, Sawah Besar, Gambir dan Kemayoran ;
- Penataan kawasan bangunan umum campuran di Jalan Jaksa untuk mendukung pariwisata multistrata.

## b. Kotamadya Jakarta Utara :

Pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan pemmahan secara vertikal temtama di kawasan Jalan L.odan, Martadinata, Yos Sudarso, Cilincing, Kelapa Cjadmg, dan Sunter.

#### c. Kotamadya Jakarta Barat

Peningkatan intensitas bangunan disetai dengan perbaikan lingkungan di Kecamatan Tambora dan Taman San.

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- L Pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan pemmahan secara vertikal temtama di Setiabudi, Tebet, Pesanggrahan dan Kebayoran Lama ;
- 2, Pengembangan industri kecil/mmah tangga yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup temtama di Kebayoran Lama.

#### c. Kotamadya Jakarta Timur :

Peningkatan kawasan campuran dilakukan secara vertikal di Jalan **Otto** Iskandardinala, DI Panjaitan, Dewi Sarlika, Jalan Pahlawan Revolusi, Kalimalang, Raden Inten, Ujung Menteng dan Jalan Raya Pondok Gede.

## Paragraf 9

# Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pergudangan

## Pasal 66

Pemanfaatan ruang kawasan industri dan pergudangan di masing-masing Kotamadya adalah :

## a. Kotamadya Jakarta Pusat :

Relokasi kegiatan industri menengah dan besar secara bertahap dari Kecamatan Sawah Besar.

## b. Kotamadya Jakarta Utara :

- Penataan industn kecil tennasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing dan Kali Bam ;
- Relokasi industii menengah dan besar yang berpolusi dan Ancol Barat, Mamnda dan Cilincing;
- Penyediaan fasilitas pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan «dan jasa di Penjaringan, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing.

- c. Kotamadya Jakarta Barat:
  - Pembangunan kawasan industri di Cengkareng, Kalideres serta sepanjang koridor Sungai Mookervaart ;
  - 2. Pembangunan pergudangan di Cengkareng dan Kalideres.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :

Relokasi kegiatan industri besar dan menengah secara bertahap dari Kecamatan Kebayoran Lama.

- e. Kotamadya Jakarta Timur:
  - Penataan kawasan industri di Pulo Gadang, Cakung,
     Ciracas dan Pekayon menjadi kawasan industri selektif;
  - 2. Penataan industri yang berlokasi di dekat pemiukiman dengan penyediaan fasilitas pengolahian limbah temtama di Penggilingan, Pondok Bambu, Duren Sawit dan Kramatjati ;
  - Pembangunan pergudangan yang menunjang kegiatan industri, dan perdagangan di Kecamatan Cakung temtama di sepanjang jalan Cakung Cilincing dan jalan Lingkar Luar.

## Paragraf 10

Pemanfaatan Ruang Sistem Pusat Kegiatan

P a s a l 67

Pemanfaatan mang untuk Sistem Pusat Kegiatan di masingmasing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
  - 1. Pembangunan kembali fasilitas perdagangan dan perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan menyediakan mang bagi pengusaha ekonomi lemah serrta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Kawasan Senen ;

- 2. Pembangunan kembali fasilitas perdagangan dengan peningkatan sarana peiparkiran serta penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki ;
- 3. Peremajaan pasar lama dan pengaturan moda angkutan umum pada Kawasan Bendungan Hilir.

#### b. Kotamadya Jakarta Utara :

- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan pemerintahan tingkat Kotamadya secara terpadu di kawasan Jalan Yos Sudarso ;
- Perbaikan Imgkungan fasihtas perdagangan dengan penanaman pohon pelindung secara terpadu melalui penataan sarana dan prasarana pejalan kaki di Kawasan Kelapa Gading.

# c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Pembangunan bam temtama fasilitas perkantoran dan mmah susun beserta fasilitasnya serta pengembangan RTH Kawasan Jalan S. Parman ;
- Perbaikan lingkungan pasar lama dengan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki di Cengkareng ;
- Pembangunan pasar mduk baru sebagai pusat distribusi bahan pangan terpadu dengan sistem transportasi di Rawa Buaya.

## d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- pengembangan sarana perparkiran terpadu dengan terminal disertai penataan sarana pedagang Kaki Lima pada Kawasan Blok M ;
- Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Kawasan Mayestik ;
- 3. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penyediaan sarana prasarana angkutan umum terpadu angkutan kareta api di Kebayoran Lama ;

- 4. Perbaikan hngkungan fasihtas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parku di Mampang Prapatan ;
- 5. Pembangunan kembah pasar lama terpadu deng.an sistem transportasi di Pasar Minggu ;
- 6. Perbaikan lingkungan fasihtas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Cilandak.

#### e. Kotamadya Jakarta Timur:

- 1. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan lama dan peningkatan fasilitas perdagangan batu aji yang disertai dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki terpadu dengan sistem transportasi di Kawasan Jatinegara :
- Peremajaan lingkungan Pasar Induk sebagai pusat distribusi bahan pangan di Kramat Jati;
- Peningkatan kapasitas pasar induk pusat distribusi bahan pangan beras terpadu dengan sistem transportasi di Cipinang.

# Paragraf 11

## Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

## Pasal 68

Pengembangan prasarana transportasi di masing-masing Kotamadya adalah ;

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
  - Pengembangan mas Timur Barat, termasuk penyelesaian persimpangan jalan arteri dan perlintasan jalan kereta api yang diprioritaskan pada mas Tanah Aban^ Pulo Gadung, Jatinegara Ancol, Tanah Abang Pai Merah ;
  - Pembatasan lalu lintas melalui penerapan kebijakan kawasan terbatas lalu Imtas (restheted zone) serta pengaturan perparkuan di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar dan Gajah Mada - Hayam Wumk;
  - 3. Pembangunan jaringan jalan lokal yang berfung^si sebagai jalan tembus temtama di kawasan Cikini, Kramat ;

- 4. Pembangunan jalan mspeksi sepanjang sungai dan jalan kereta api di sepanjang Kah Sentiong, Kali Ciliwung, Kali Litan Kayu, Kali Jtem ;
- 5. Pembangunan fasilitas pejalan kaki temiasuk penyeberangan temtama di kawasan Senen dan Tanah Abang ;
- 6. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal ;
- 7. Penataan moda angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhijalan ;
- 8. Penataan nianajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas temtama di sekitai terminal bus dan stasiun kereta api serta seperti di kawasan Johar Bam, Kali Bam, Bendungan Jago.

## b. Kotamadya Jakarta Utara ;

- Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal;
- Peningkatan janngan dan jalan arteri yang mendukung sistem transportasi antar wilayah di kawasan Mamnda dan jalan Kamal Raya;
- 3. Peningkatan jaringan dan kapasitas jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan terobosan temtama pada pusat perdagangan dan jasa ;
- 4. Peningkatan manajemen lalu lintas dan pembangunan fasilitas pejalan kaki temtama di kawasan Yos Sudarso, Cilmcing, Martadinata dan Lodan ;
- Pembangunan dan peningkatan j aringan j alan di perbatasan Kabupaten Tangerang dan Kotamadya Bekasi.

## c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Pembangunan dan peningkatan jalan pada perbatasan Kodya Tangerang, sisi selatan Kali Mookervart, jalan sejajar kereta api Rawa Buaya serta Sentra Primer Barat ;
- 2. Peningkatan manajemen lalulintas termasuk perbaikan simpang di kawasan Kebon Jemk, Kembangan, dan Tambora :

- 3. Penyediaan fasilitas paikir di luar badan jalan seperti gedung parkir di kawasan Glodok, serta penataan parkir pada kawasan-kawasan yang rawan kemacetan lalu lintas ;
- 4. Pembangunan fasilitas pejalan kaki di kawasan Kota Tua ;
- 5. Melanjutkan pembangunan terminal penumpang Rawa Buaya berikut sarana dan prasarana penunjang ;
- 6. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal.

## d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Pembangunan fasilitas, srana dan prasarana sistem angkutan umum massal ;
- 2. Pembangunan jaringan jalan arteri yang mendukung sistem transportasi antar wilayah yang menuju ke arah barat;
- 3. Peningkatan dan penerapan manajemen lalulintas serta penyediaan fasilitas pejalan kaki temtama di Kawasan Segitiga Kuningan, Kebayoran Bam dan mampang Prapatan;
- 4. Peningkatan jaringan jalan yang mendukung lalu lintas antar wilayah di perbatasan Kabupaten Bogor dan Tangerang ;
- Penataan moda umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan, berikut fasilitas penunjangnya.

## e. Kotamadya Jakarta Timur ;

- Pembangunan jaringan jalan penunjang Sentra Primer Bam
   Timur dan yang melayani pusat-pusat kegiatan lainnya ,
- Pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus seilajalan mspeksi sungai ;
- Peningkatan dan penerapan manajemen lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki temtama di kawasan Sentra Primer Bam Timur, Jatinegara ;
- 4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Terminal Kampung Rambutan dan relokasi Terminal penumpang Pulo Gadung ;

5. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau.

#### c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Perluasan jaringan pelayanan air bersih melakii peningkatan kegiatan\* pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan permukiman yang padat penduduk;
- 2. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan pennukiman secara bertahap ;
- Pelarangan pengambilan airtanah dalam terutama di Zona kritis airtanah ;
- 4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau

## d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendisU-ibusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan yang padat penduduk ;
- 2. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan pemiukiman secara bertahap ;
- 3. Pelarangan pengambilan airtanah dalam terutama di Zona kritis airtanah ;
- 4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau ;
- Pencegahan peresapan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber-sumber air terutama di Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu.

# e. Kotamadya Jakarta Timur:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan pennukiman yang padat penduduknya;

- 5. Peningkatan janngan jalan yang mendukung lalu lintas antar wilayah di perbatasan Kodya Bogor dan Bekasi ;
- 6. Penataan moda angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan berikut fasilitas penunjangnya ;
- 7. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem a^igkutan umum massal.

#### Pasal 69

Prasarana sumber air dan air bersih di masing-masing Kotamadya adalah ;

#### a. Kotamadya Jakarta Pusat;

- Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, temtama pada kawasan yang padat penduduknya ;
- Pemanfaatan waduk sebagai reservoir air di Waduk Melati dan Waduk Senayan;
- 3. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal secara bertahap ;
- 4. Pelarangan pengambilan airtanah dalam temtama di kawasan zona kritis airtanah ;
- Perluasan daerah resapan air melalui penambahan mang terbuka hijau.

## b. Kotamadya Jakarta Utara :

- Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, temtama pada kawasan yang padat penduduknya ;
- Peningkatan pelayanan air mmum untuk Kepulauan Seribu dengan pengembangan sistem pengangkutan, resen/oir. jaringan perpipaan serta peningkatan penggunaan air laut hasil olahan;
- 3. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap ;
- 4. Pelarangan pengambilan airtanah dalam temtama di zona kritis airtanah ;

- 2. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan pennukiman secara bertahap ;
- Pelarangan pengambilan airtanah dalam terutama di Zona kritis airtanah ;
- 4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau :
- Pencegahan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber-sumber air terutama di Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Kramat Jati dan Makasar;
- 6. Pengamanan dan peningkatan fungsi Kanal Tamm Barat.

#### Pasal 70

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
  - 1- Peningkatan kapasitas Kali Ciliw^ung, Kali Sentiong, Kali Malang, Kali Item, Kali Mati ;
  - 2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan masalah genangan air temtama di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar, Mangga Dua dan Jati Pinggir;
  - Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di Banjir Kanal, Kali Duri dan Kali Ciliwung ;
  - 4. Peningkatan kapasitas sungai saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah.
- b. Kotamadya Jakarta Utara :
  - Peningkatan kapasitas Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Ciliwung, Kali Kamal ;
  - 2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan terutama di kawasan jalan tol Sediyatmo, kawasan Pluit, Kepala Gading, Tugu Utara, Kebon Bawang, Rawa Badak dan Pademangan :
  - Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di Kamal, Banjir Kanal, Kali Sunter, Kali Cakung dan Kali Ciliwung;

- 4. Peningkatan kapasitas sungai, saluran dan penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
- 5. Pembangunan tangkapan air di Penjaringan.
- c. Kotamadya Jakarta Barat:
  - Peningkatan kapasitas Kali Mookervart, Kali Tubagus Angke, Kali Sepah, Kali Banjir Kanal dan Kali Grogol;
  - 2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Pai Merah, Jelambar, Kapuk Muara, Kamal Tegai Alur, Kedaung Angke dan Rawa Buaya ;
  - Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Mookervart, Kali Tubagus Angke. Kali Grogol dan Kali Banjir Kanal ;
  - 4. Peningkatan kapasitas sungai, saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
  - 5. Pembangunan tangkapan air di kawasan Kembangan dan Kali Deres ;
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
  - Peningkatan kapasitas Kali Pesanggrahan, Kali Grogol.
     Kali Krukui, Kali Baru dan Kali Ciliwung ;
  - Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Bintaro. Ulujami, Ciledug Raya, Petogogan, Gandaria dan Bukit Duri;
  - 3. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Pesangg.arahan. Kali Grogol dan Kali Baru ;
  - 4. Peningkatan kapasitas sungai saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
  - Pembangunan tangkapan air di kawasan Pasar Minggu,
     Cilandak, Jagakarsa dan Kebayoran Lama.
- e. Kotamadya Jakarta Timur:
  - Peningkatan kapasitas Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter dan Kali Jati Kramat;

2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Kampung Rambutan, Kampung Makasar, Kebon Pala, Dewi Sartika, Otista Raya, Kebon Nanas, Cipinang Jaya, Cipinang Muara dan Pondok Bambu ;

92

- Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter dan Kali Jali Kratnat;
- 4. Peningkatan kapasitas sungai, saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
- Pembangunan tangkapan air di kawasan Halim Perdana Kusuma, Pasar Rebo, Cilangkap dan Ciracas.

## Pasal 71

Pengembangan prasarana dan sarana sanitasi dan persampahan di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
  - Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Gajahmada dan Jalan Hayam Wuruk dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah Waduk Melati;
  - 2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh ;
  - Pembangunan jaringan prasarana air limbah dan instalasi pengolahan air limbah di kawasan Bandar Baru Kemayoran ;
  - 4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah dianiaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan pennukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
  - Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;
  - 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan saunpah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling).

#### b. Kotamadya Jakarta Litara :

- L Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Tanjung Priok, Pantai Mutiara, dan Pluit serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Waduk Pluit dan Waduk Sunter;
- 2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedan, g temtama pada kawasan kumuh ;
- Peningkatan kapasitas transfer station di Sunter dan pembangunan transfer station di Pluit, Sunter Utara dan Cilincing;
- 4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan pennukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
- Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;
- 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused. reduced, dan recycling) ;
- 7. Penanganan sampah/limbah di perairan laut.

## c. Kotamadya Jakarta Barat:

- Pembangunan jaringan prasarana air limbah pacia kawasan Glodok, Grogol, sekitar Jl. S. Parman, Tanjung Duren dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Waduk Grogol dan Waduk Tomang ;
- Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang temtama pada kawasan kumuh ;
- 3. Pembangunan transfer station di Duri Kosambi ;
- 4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahian sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani ;
- 5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan :

- 4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan pemiukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani ;
- Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;
- 6. Peningkatan peran serta masN'arakat dalam peng.elolaan sampah, dengan penetapan konsep 3R (reused. reduced, dan recycling).

#### Pasal 72

Pengembangan sektor Listrik dan Gas di setiap wilayah Kotamadya adalah :

- a. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan penghubung- taman serta pusat-pusat aktifitas masyarakat;
- c. Pengembangan pelayanan dan penambahan jaringan distribusi gas terutama di kawasan indutri, perdagangan dan jasa, serta rumah susun ;
- d. Pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pemerataan pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG).

## Pasal 73

Pengembangan prasarana dan sarana Telekomunikasi cii setiap wilayah Kotamadya adalah :

- a. Pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yang memadai;
- b. Penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru ;
- c. Perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung telekomunikasi di kawasan permukiman padat penduduk.

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused. reduced. dan recycling).

#### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Kuningan, Setiabudi, Casablanca, Tebet dan Manggarai serta peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Waduk Setiabudi ;
- 2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang temtama pada kawasan kumuh ;
- 3. Pembangunan transfer station di bagian selatan jalan lingkar luar;
- 4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
- 5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan, ^
- 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused. reduced, dan recycling).

## e. Kotamadya Jakarta Timm :

- Peningkatan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Pulo Mas dan Kelapa Gading sekaligus dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Waduk Pulo Mas dan jarigan prasarana air limbah dari instalasi pengolah an limbah pada kawasan Pulo Gadung ;
- 2. Pembangunan septicktank- komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang temtama pada kawasan kumuh ;
- Peningkatan kapasitas transfer station di Cakung dan pembanguann transfer station di bagian selatan jalan lingkar luar;

## Paragraf 12

# Pengembangan Kawasan Prioritas

#### Pasal 74

- (1) Pengembangan kawasan prioritas di tingkat Kotamadya diarahkan pada bagian wilayah kota yang memiliki peranan dan fungsi strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan kota. meliputi :
  - a. Kotamadya Jakarta Pusat:
    - 1. Kawasan Taman Medan Merdeka sebagai pusat Pemerintahan :
    - Pengembangan Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat bisnis berskala nasional dan international;
    - 3. Penataan Kawasan Tanah Abang sebagai pusat utama perdagangan dan jasa ;
    - 4. Pengembangan Kawasan Terpadu Waduk Melati sebagai kawasan Perdagangan Jasa dan pennukiman.
  - b. Kotamadya Jakarta Utara ;
    - Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, sebagai pusat pariwisata yang didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan perhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian cagar budaya;
    - 2. Pengembangan Kawasan Sunda Kelapa sebagai pusat pariwisata dengan penataan pelabuhan, perbaikan lingkungan dan pemugaran ;
    - Pengembangan kawasan permukiman nela}an Muara Angke sebagai kawasan pariwisata bahari dan tempat kegiatan perikanan laut;
    - 4. Pelestarian kawasan Hutan Angke Kapuk sebagai kawasan lindung.
  - c. Kotamadya Jakarta Barat :
    - Pengembangan Kawasan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat Pemerintahan wilayah Kotamadya, Perdagangan dan Jasa:

- Pengembangan Kawasan Kota Tua Glodok -Pancoran sebagai kawasan bersejarah ;
- 3. Pengembangan kawasan Sentra Bunga Ra-wa Belong sebagai pusat pemasaran bunga dan tanaman hias ;
- 4. Pengembangan kawasan Rawa Buaya sebagai pasai induk bahan pangan yang terpadu dengan terminal penumpang dan stasiun kereta api.

### d. Kotamadya Jakarta Selatan :

- Pengembangan kawasan Segi Tiga Kuningan sebagai pusat kegiatan bisnis Internasional dan pusat kegiatan Diplomatik :
- Pengembangan Niaga Terpadu Sudirman sebagai kawasan multifungsi bertaraf internasional;
- 3. Pengembangan stasiun Manggarai sebagai stasiun kereta api utama antar kota yang didukung dengan tenninal penumpang ;
- 4. Pengembangan Kawasan Situ Babakan yang mempakan perkampungan Budaya Betawi yang didukung hutan kota .yang serasi untuk kawasan wisata budaya;
- 5. Pengembangan Kawasan Situ Mangga Bolong sebagai lokasi wisata lingkungan.

## e. Kotamadya Jakarta Timur:

- Pengembangan Kawasan Sentra Primer Bam Timur sebagai Pusat Pemerintahan Wilayah Kotamadya, perdagangan dan jasa ;
- Penataan Kawasan Industri Pulogadung dan Cakung sebagai kawasan industri selektif berteknologi tinggi;
- Pembangunan waduk pada kawasan Halim Perdana Kusuma.
- (2) Persebaran kawasan prioritas di masing-masing Kotamadya ditetapkan sebagaimana tercantum pada Gambar 42, Gambar 43, Gambar 45, dan Gambar 46 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

#### Penertiban Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 77

Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan deng,an cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

## Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

#### Pasal 78

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat i/in sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII

# HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Pertama

## Hak Masyarakat

## Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah
  Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Rinci Tata Ruang
  Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Letak
  Bangunan ;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

## Pasal 80

(1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah, melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempattempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

#### BAB VI

#### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Pedoman Pengendalian

#### Pasal 75

- (1) Pedoman pengendahan pemanfaatan mang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) humf d didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud pada rencana suiiktur tata mang dan pemanfaatan ruang di tingkat propinsi dan Kotamadya.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di kawasan hijau, kawasan pennukiman, kawasan ekonomi prospektif, sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah, kawasan prioritas dan intensitas mang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan perizinan terhadap pemanfaatan mang, turmasuk terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, air laut, udara serta pemanfaatan mang bawah tanah.

## Bagian Kedua

## Pengawasan Pemanfaatan Ruang

## Pasal 76

Kegiatan pengawasan pemanfaatan mang sebagaiman dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) terdiri atas:

- a. Pemantauan, adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat pembahan kualitas tata mang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata mang ;
- b. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan mang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata mang ;
- c. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan mang dalam mencapai tujuan rencana tata mang.

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum. kantor Kelurahan dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### Pasal 81

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan mang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat bempa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 82

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap pembahan status tanah dan mang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

**Kewajiban** Masyarakat

## Pasal 83

Dalam kegiatan penataan mang wilayah, masyarakat wajib ;

- a. berperan serta dalam memcHhara kualitas ruang ;
- b. berlaku tertib dalam keikutsenaannya dalam proses
  perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
  pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan
  yang berlaku ;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 84

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat daiam penataan mang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang sena dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

## Bagian Ketiga

## Peran Serta Masyarakat

## Pasal 85

- (1) Peran Serta Mas $\$  arakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi ;
  - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah ;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan tennasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan :
  - c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah propinsi ;
  - d. pemberian infonnasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi ;
  - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi :

- f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan mang meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan mang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat. atau kebiasaan yang berlaku :
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kotamadya ;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan rencana lata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kotamadya ;
  - d. pembahan atau konversi pemanfaatan mang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya yang telah ditetapkan ;
  - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau ;
  - f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
  - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Propinsi, wilayah Kotamadya, Kecamatan, dan kawasan, temiasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya :
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

## Bagian Keempat

Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Pasal 86

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertim bangan, pendapat, tanggapan, keberatan, niasukan terhadap

- iutbiTnasi teniang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis pada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubemur Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

### Bagian Kelima

#### Pemberdayaan Peran Serta Masyaraklat

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata mang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau fomm pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat daiam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan unmk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkaian tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam a^'at (2), Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruan^.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :
  - a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelat ihan ;
  - b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses
     penataan mang kepada masyarakat secara terbuka ;
  - c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
  - d. Menghomiari hak yang dimiliki masyarakat :

- e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ;
- f. Mehndungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang.
- g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

B A B Vlil

SANKSI

Pasal 88

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1. sanksi administrasi;
- 2. sanksi perdata;
- 3. sanksi pidana.

## B A B IX

## $K\,E\,T\,E\,N\,T\,U\,A\,N \hspace{1cm} P\,I\,D\,A\,N\,A$

Pasal 89

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Gubemur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

#### B A B X

#### PLNYIDI KAN

#### Pasal 90

- (!) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
  Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
  melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
  Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran ;
  - c. r-'eminta keterangan dan bahan bukti dari O-^mg Pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain. serta melakukan pen) itaan terhadap bahan bukti tersebut :
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran.

# B A B XI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 91

Rencana Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta di gambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 5 0.000 untuk propinsi dan untuk wilayah Kotamadya berskala I : 20.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 92

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagal matra ruang dari Pola Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

#### Pasal 93

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan pada skala 1 : 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1 ; 1.000, dan Rencana Prasarana Wilayah pada skala 1 : LOOO atau skala 1 ; 500 ;
- b. penyusunan ketentuan permintakatan ;
- c. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta :
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kotamadya serta keserasian antar sektor;
- e. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat.

## Pasal 94

- (1) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasai 93 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubemur dengan persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a ditetapkan oleh Gubemur.

## Pasal 95

(1) Ketentuan permintakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf b meinuat kriteria teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah baik tingkat Propinsi, Kotamadya maupun Kecamatan ke dalam rencana yang lebih rinci ,

(2) Ketentuan permintakatan akan diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 96

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan, ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah
  Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan lahun 2010.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempumaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

B A B Xf!

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata mang wilayah dan ketentuan yang berkaitan dengan penaiaan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

- (I) Dengan berlakunya Peraturan Daeiah ini. maka ;
  - a. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan jeni s bangunan (KTV. 1941);
  - b. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
     5 Tahun 1984 teniang Rencana Umum Tata Ruang
     Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun I 985-2005 ;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah Daerah Kliusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah
Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus ibukota
Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi setelah RRTW
Kecamatan disyahkan sebagaimana dimaksud pasai 94 ayal

(1);

(3) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah.

## Pasal 100

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan RTRW Jakarta 2010.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A second and the seco

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juli 1999

GL'BERNLR KEPALA DAERAH KHLSUS IBUKOTA JAKARTA,

sltivoso

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 September 1999

11. FAI ZI BOWO
NIP 470044314

### PENJELASAN

ATAS

# PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

## DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan mengenai Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama ini diatur di daiam Peraturan Daerah Daerah Khusus Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka materi maupun terminologi Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) maupun Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) perlu disesuaikan dengan materi dan terminologi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan mang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat Wilayah Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan daerah otonom tetapi merupakan wilayah administratif, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya (untuk kelima wilayah kotamadya), dan kedua tingkatan rencana ini ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dhnaksud merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan mang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang meliputi :

a. visi dan misi pembangunan Kota Jakarta, kebijakan, pendekatan dan strategi pengembangan tata ruang untuk tercapainya tujuan pemanfaatan mang yang berkualitas ;

- b. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemanan ;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi :

- a. Arahan rencana penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan
- b. Arahan rencana pengembangan aktifitas kota dalam benmk pola peruntukan yang mencakup :
  - arahan pengelolaan kawasan permukiman
  - arahan pengelolaan kawasan ekonomi prospektif dan pengembangan sistem kegiatan
  - arahan pengelolaan kawasan hijau lindung dan hijau binaan
  - arahan kebijakan tala guna air, lata guna udara, tata guna laut dan tata guna mang bawah tanah
- c. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi : prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, tata air dan prasarana pengelolaan lingkungan
- d. Arahan rencana intensitas ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya. Oleh karena itu, penataan mang di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan implementasi dari keterpaduan pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang optimal, digunakan konsep "pertumbuhan melalui pemerataan". Sasaran pertumbuhan ditempuh melalui kebijakan sektoral dengan cara meningkatkan : (1) laju pertumbuhan ekonomi sektoral, (2) pemenuhan kebutuhan investasi, (3) efisiensi dan produktivitas masyarakat, dan (4) keter¬kaitan ekonomi antar sektor dan antar daerah. Selanjurnya, sasaran pemerataan ditempu}i melalui kebijakan lintas sektoral, antara lain dengan meningkatkan : (1) pemerataan peluang berusaha dan kesempatan kerja, (2) pemerataan hasilhasil pembangunan, (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat dan (4) peningkatan pelayanan masyarakat.

Di samping pendekatan di atas, diperlukan pula pendekatan k±usus yang didasarkan pada potensi dan peluang yang bersifat spesifik dan mempakan basis pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Jakarta sebagai kota internasional yang akan menghadapi diberlakukannya pasar ekonomi terbuka tahun 2020, (2) Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong pem^bangunan wilayah lain, (3) Jakarta sebagai pusat pembangunan dengan pemihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah.

Berdasarkan pada ketiga basis pembangunan ekonomi yang disebutkan di atas, serta antisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional, maka dirumuskan 11 (sebelas) pilar yang dinilai strategis bagi pembangunan ekonomi Jakarta, yaitu :

- 1. Perluasan sarana daji prasarana ekonomi (economic infmsinuiure)
- 2. Pengembangan kualitas sosial ekonomi masyarakat (sosial economic community development) ;
- 3. Peningkatan aparatur berwawasan bisnis (business oriented public servant);
- 4. Pengembangan manajemen tanah dan properti (land and property managemenl) ;
- 5. Pengembangan industri pilihan (ciean industry) ;
- 6. Pengembangan pusat distribusi (distribution center) ;
- 7. Pengembangan pusat keuangan (flnancial center) ;
- 8. Pengembangan pusat infonnasi bisnis (business infromation center) ;
- 9. Pengembangan pusat andalan (prime are^) ;
- 10. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (mass rapid iraasport) ;
- I I. Pengembangan pusat pariwisata nasional (national tourism center).

Pilar-pilar di atas mencerminkan pula aspirasi Jakarta sebagai kota Jasa, yang memiliki enam strategi sebagai berikut : (1) pusat pelayanan masyarakat yang memungkinkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, (2) pusat perdagangan dan distribusi, (3) pusal keuangan, (4) pusai pariwisata, yang mampu menarik wisatawan mancanegara dengan jumlah yang semakin besar dan mampu meneruskan ke daerah tujuan wisata lainya, (5) pusat pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), (6) pusat informasi bisnis yang mampu memberikan akses informasi peluang investasi dan pemasaran baik dalam negeri maupun ekspor.

Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat kegiatan ekonomi akan memainkan peran yang semakin besar. Jakarta akan merupakan barometer bagi kestabilan poUiik, keamanan dan perekonomian nasional. Jakarta juga akan dituntut memainkan peran yang semakin tinggi sebagai dinamisator pembangunan wilayah-wilayah lainnya. Jakarta juga akan memainkan peranan penting daiam mempersiapkan dan mengantisipasi perkembangan internasional khususnya menjelang diberlakukannya sistem pasar ekonomi terbuka di bidang perdagangan dan investasi pada tahun 2020.

Pembangunan sosial budaya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kuantitas masyarakat baik dalam ani formal dan nilai maupun fasilitas dan lembaga melalui partisipasi segenap golongan dan lapisan masyarakat yang makin efektif termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Dalam hal ini penataan ruang kota dilalrukan untuk mengakomodasikan dan menunjang pencapaian tujuan pembangunan sosial budaya dimaksud di atas.

Sebagai wadah bagi kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial budaya itu, maka pemanfaatan ruang harus dilakukan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan. Pemanfaatan mang secara serasi, selaras, dan seimbang adalah kegiatan dalam penataan ruang yang harus dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, permmbuhan dan perkembangan an antar sektor, antar daerah, serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan. Sedangkan pemanfaaian ruang yang berkelanjutan dimaksud adalah kegiatan dalam penataan mang yang harus dapal menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

# IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s.d. 18 cukup jelas

angka 19

Kawasan hijau lindung dimaksud meliputi zona inti dan zona pelindung dalam Taman Nasional Laul Kepulauan Seribu dan pulau-pulau dengan peruntukan Cagar Alam di luar Taman Nasional tersebut, serta Hutan Lindung, Cagar Alam dan Hutan Bakau di Kotamadya Jakarta Utara.

angka 20

Kawasan hijau binaan terdiri dari kawasan pertani an, hutan kota, taman kota, taman, pemakaman umum, jalur pengaman bandara, kereta api, listrik tegangan tinggi, sungai, waduk, situ dan lapangan olah raga. Kawasan hijau binaan dapat dilengkapi dengan bangunan sangat terbatas sebagai fasihtas pendukung fungsi hijau dimaksud.

angka 21

Penetapan kawasan ini ditujukan untuk melestari¬kan dan mengembangkan berbagai kegiatan yang berorientasi meningkatkan kualitas lingkungan kawasan ruang terbuka hijau dan badan air untuk kepentingan ekologi kota keseluruhan.

angka 22 s.d 43

Cukup jelas.

angka 44

Pengembangan kawasan prioritas didorong dar diprakarsai oleh Pemerintah.

Kesempatan yang seluas-luasnya diberikan kepada pihak swasta dan niasyarakai untuk berperan serta dalam pengembangannya melalui prinsip kemitraan dengan Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penggunaan tanah campuran. Penataan ruangn^'a diatur melalui panduan rancang kota.

angka 45 s.d 52

Cukup jelas.

Pasal 2 Pasal 3 Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan geopolitik. aspek waJctu, Dalam mempertimbangkan perencanaan tata ruang memperhatik: an aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai kemginan serta kebutuhan <lan mjuan pemanfaatan mang. Penataan ruang diselenggara^ kan secara tertib sehmgga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku serta konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang dapat mewujud kan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras, dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah serta antara sektor daiam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penataan bahwa ruang menjamin kelestarian k e m a m p u a n daya dukung sumber daya dengan memperhatikan kepentingan antar generasi. Yang dimaksud dengan berbudaya adalah bahwa penataan ruang menjamin pembangunan yang seimbang antara fisik dan non fisik serta memperhatikan aspek budaya.

Pasal 4 s.d 5

Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Termasuk dalam pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a s.d. c

Cukup jelas.

huruf d

Sebagai ibukota negara yang sekaligus berfungsi sebagai kota jasa berskala internasional, Jakarta memiliki mteraksi yang kuat dengan daerah-daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengemban fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sektor unggulan kawasan Jakarta dan sekitarnya di ruang daratan terutama industri, permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor unggulan kawasan Kepulauan Seribu dan sekitarnya terutama pariwisata, perikanan dan pertambangan, mendukung pelaksanaan program sektor unggulan dimaksud maka perlu dikembangkan sistem prasarana dan sarana kota baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Dalam pengertian sistem regional, nasional, internasional tersebut tercakup sistem prasarana dan sarana kota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 huruf a s.d. d

Cukup jelas.

huaif e

Yang dimaksud dengan Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal daa berfre-kuensi tinggi, sedangkan Modal Angkutan Utama adalah jenis angkutan umum yang berkapasitas sedang dan besar, yang termasuk dalam pola angkutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti kereta api, minibus dan bus.

huruf f

Lokasi tangkapan air adalah suatu daerah perencanaan dengan besaran luas tertentu, yang akan
menentukan besarnya limpahan/aliran air yang
akan terjadi pada daerah tersebut dengan intensitas
hujan tertentu.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Penggolongan tipologi kawasan yang terdiri dari tipologi mantap, peralihan dan dinamis, rnenurut ciri kawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;

- 1. Tipologi mantap ; menumt perkembangannya, kawasan ini sudah terbangun fisiknya dan secara umum kondisinya masih baik dan tidak banyak pembahan fungsi. Pada umumnya kawasan ini dari perencanaan kota yang mempakan hasil cukup matang, sehingga perencanaan prasarana dan sarana sangat memadai. Terhadap kawasan dengan tipologi mantap ini, pengelolaan kawasan dilakukan melalui program pemugaran dan/atau pemeliharaan lingkungan, dengan perencanaan bersifat rigid atau tidak memberi peluang pembahan ;
- 2. Tipologi peralihan menuju mantap ; menumt perkembangannya kawasan ini sebagian sudah terbangun dengan kondisi fisik masih baik, tetapi sebagian lagi belum terbangun atau, bila sudah terbangun n a m u n kondisinya cenderung menurun. Pengelolaan terhadap k a w a s a n dilakukan melalui program perbaikan lingkungan dan pemugaran, dengan perencanaan bersifat fleksibel.
- 3. Tipologi peralihan menuju dinamis ; menurut perkembangannya kawasan ini sebagian sudah terbangun dan sebagian lagi belum terbangun, secara umum kondisinya menurun dan pembahan fungsi yang kurang diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana kota. Pengelolaan terhadap kawasan seperti dilakukan melalui program perbaikan lingkungan dan peremajaan, dengan perencanaan bersifat lleksibel.
- 4. Tipologi duiamis ; menumt perkembangannya, kawasan ini sebagian sudah terbangun dan ada pula yang belum terbangun. Secara umum kondisinya ada yang masih cukup baik maupun yang cendemng bumk dan pada beberapa bagian fungsi kawasan berkembang dengan cepat. Pada umumnya kawasan ini mempakan kawasan yang

kurang terencana dengan baik, sehingga peren¬
canaan prasarana dan sarana kurang memadai.
Pengelolaan kawasan ini dilakukan melalui
peremajaan dan/atau pembangunan baru, dengan
perencanaan bersifat fleksibel ;

Pasal 10 s.d 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ayal (1) dan (2)

Cukup jelas.

ayat 3

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan baliwa Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tingkat I berisi :

- Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan a. Kawasan Budidaya.
- b. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan,
   Kawasan Perkotaan dan Kawasan Tertentu.
- Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman,
  Kehutanan Pertanian, Pertambangan, Perindus¬
  trian, Pariwisata dan Kawasan lainnya.
- d. Arahan Pengembangan sistem Pusat permukim¬ an perdesaan dan perkotaan.
- e. Arahan Pengembangan sistem Prasarana
  Wilayah yang meliputi prasarana transportasi,
  telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana
  pengelolaan lingkungan.
- f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.
- Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah ; Tata Guna Air, Tata Guna Udara, Tata Guna Sumber Daya Alam lainya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Sesuai dengan kondisi kota Jakarta maka Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi arahan kawasan hijau, kawasan permukiman, kawasan ekonomi prospekuf, sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah, kawasan diprioritaskan dan intensitas niang.

ayat (4) dan (5) Cukup Jelas.

Pasal 13

Persebaran penduduk Jakarta Tahun 2010 di¬rencanakan berdasarkan :

- a) Perkembangan Kependudukan Jakarta dan Botabek 15 tahun terakhir per kecamatan
- b) Rencana pemanfaatan mang yang ditetapkan dalam RUTR 2005.
- c) Perkembangan pemanfaatan ruang menurut fungsinya
- d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hingga tahun 2010.
- e) Kebijakan persebaran penduduk guna keseim¬
  bangan pemanfaatan ruang yang ingin dicapai.

Atas dasar tersebut, persebaran penduduk Jakarta Pusal direncanakan dapal menampung 1,35 juta (10,8%), Jakarta Utara direncanakan dapat menampung 2,2 juta (17,6%), Jakarta Barat direncanakan dapat menampung 2,95 juta jiwa (23,6%), Jakana Timur direncanakan dapat menampung 2,8 juta jiwa (22,4%) dan Jakarta Selatan direncanakan dapat menampung 3,2 juta jiwa (25,6%).

Pasal 14 ayal (1) dan (2)

Cukup jelas.

ayat (3) huruf a

RTH berbentuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum mempakan areal penghijauan yang berupa tanaman dan atau pepohonan yang terdiri dari hutan kota, taman kota, taman hngkungan/tempat bermain, lapangan olah raga, dan pemakaman.

ayat (3) huruf b

RTH berbentuk jalur dengan fungsi sebagai pengaman adalah areal berbentuk memanjang yang mempakan areal penghijauan yang dapat berupa tanaman rumput dan atau pepohonan sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari : pengaman sungai, pengaman waduk/sim, pengaman pantai, pengaman kereta api, pengaman jalan tol, pengaman bandara, dan pengaman listrik tegangan tinggi.

ayat (3) huruf c

RTH berbentuk hijau budidaya pertanian adalah areal yang difungsikan untuk budidaya pertanian milik perorangan, badan hukum, atau pemerintah.

ayat (4)

- Prosentase luas ruang terbuka hijau sebesar 13,94% atau seluas ± 9.544 Ha adalah areal yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan mang terbuka hijau lindung seluas ± 340 Ha dan ruang terbuka hijau binaan seluas ± 9.204 Ha.
- Luas mang terbuka hijau lindung eksisting yang dikelola sebagian hutan lindung, cagar alam, hutan wisata di Penjaringan seluas  $\pm 170$  Ha dan di daratan pulau seluas  $\pm 171$  Ha.
- Luas mang terbuka hijau binaan eksisting di darat yang dikelola sebagai hutan kota, taman kota, taman lingkungan, tempat bermain, lapangan olah raga, dan pemakaman sebagai fasilitas umum/ fasilitas sosial seluas ± 1.852 Ha, direncanakan perluasan sampai tahun 2010 menjadi seluas ± 2.538 Ha. tennasuk ruang terbuka hijau dalam persil sebagai hijau private dan RTH dari peremajaan ± 43 Ha dan dari refungsionalisasi taman ± 179 Ha.
- Luas RTH binaan eksisting yang dikelola sebagai jalur pengaman tegangan tinggi, jalan tol, sungai dan RTH pengaman fungsi khusus (Pelabuhan Udara Halim Perdanakusuma dan Vlarkas Besar TNI di Cilangkap) seluas ± 723 Ha direncanakan sampai tahun 2010 menjadi seluas ± 2.818 Ha termasuk penghijauan di Daerah Milik Jalan.
- Luas RTH binaan eksisting yang dikelola sebagai penghijauan pulau seluas  $\pm$  51 Ha, direncanakan perluasan sampai tahun 2010 menjadi seluas  $\pm$  190 Ha.
- Luas RTH binaan eksisting yang dikelola sebagai areal budidaya pertanian seluas ± 3.A57 Ha yang keberadaannya akan dipertahankan sampai tahun 2010.

ayat (5) Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Cukup jelas.

ayat (3)

(=)

Penetapan fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan permukhnan dilakukan dengan memper hitungkan kebutuhan penduduk pada kawasan tersebut berdasarkan jumlah penduduknya. Untuk itu fasilitas umum/fasilitas sosial yang digunakan sebagai standar kebutuhan ditetapkan sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini. Adapun jumlah jiwa pada setiap unit rumah/keluarga sebagai dasar fasilitas perhitungan kebutuhan penetapan umum/fasilitas sosial ditetapkan rata-rata 4,5 jiwa unmk setiap unit mmah/keluarga.

ayat (4)

Rincian kebutuhan sarana lingkungan sesuai dengan jenis fasihtas umum/fasilitas sosial dan berdasarkan besaran jumlah penduduk dan jenisnya pada kawasan itu dapat dilihat pada standar fasilitas sosial dan fasihtas umum di Lampiran Perda ini.

ayal (5) Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) s.d (3) Cukup jelas.

ayal (4) Cukup jelas.

huruf a s.d. b

huruf c Industri perakitan ringan yang dunaksud adalah perakitan barang-barang produk industri yang diterima dalam keadaan terurai meliputi perakitan alat olahraga, kedokteran, mainan anak-anak, komputer, dan lain-lain yang sejenis.

ayat (5) Cukup jelas.

Pasa! 17 ayat (1)

Pusat kegiatan adalah unsur pembenmk suukmr ruang kota yang berupa kawasan yang cukup luas dengan kegiatan yang bersifat mulii fungsi antara lain pusal pemerintahan, perkantoran, perdagangan, jasa, pusat pelayanan, dan pennukiman secara terbatas.

ayat (2) Cukup jelas.

ayal (3)

Pusal Kegiatan Utama adalah pusal kegiatan dengan skala pelayanan tingkat kota, regional, nasional dan internasional. Untuk fasilitas umum/fasilitas sosial minimal pelayanan tingkat Kotamadya.

Yang dimaksud Sistem Pusat Kegiatan Penunjang adalah pusat kegiatan dengan skaja pelayanan lokal atau maksunal tingkat bagian wilayah kotamadya. Untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial minimal tmgkat kecamatan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5) huruf a

Kawasan Medan Merdeka merupakan civic center yang mengandung kegiaian sosial budaya dan pusat daerah serta kegiatan pemerintahan nasional dan yang bersifat umum yaitu : tempat ibadah, museum nasional, gallery nasional. Kawasan ini dibatasi oleh jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Barat. Sejak peraturan ini ditetapkan maka pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan Medan Merdeka secara bertahap akan ditata kembali.

huruf b

Untuk menampung kegiatan perkantoran perwakilan negara asing secara bertahap diarahkan ke kawasan antara Jalan Jend. Sudirman, Jalan Jend. Gatot Subroto, dan Jalan H.R. Rasuna Jalan M. H. Thamrin. Khusus untuk tempat kediaman perwakilan negara asing ditetapkan di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru, sedangkan unmk kegiatan perkantoran selain lokasi yang ditetapkan terseb ut masih diperkenankan pada lokasi yang ada sekarang.

huruf c

Pusat rekreasi dimaksud sesuai dengan fungsi pengembangannya mempunyai skala pelayanan tingkat propinsi dan nasional.

huruf d

Kawasan gelanggang olahraga Senayan difungsikan sebagai pusat olahraga tingkat nasional dan internasional.

huruf e Pusat kesehatan yang dimaksud merupakan pusat pelayanan kesehatan dan merupakan mjukan dari rumah sakit di bawahnya dengan pelayanan tingkat propinsi.

huruf f Pusal kesenian yang dimaksud merupakan pusat kesenian dan gedung pertunjukan tingkat propinsi.

huruf g Pusat distribusi barang yang dimaksud mempakan tempat distribusi jenis barang tertentu tingkat regional dan tingkat propinsi dengan fasilitas penunjangnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ayal (1) s.d (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Secara bertahap lintasan operasi sarana angkutan umum akan diatur sebagai berikut :

- . angkutan bis besar hanya padajalan arteri ;
- angkutan bis sedang hanya padajalan kolektor ;
- . angkutan mikrolet hanya pada jalan lokal.

ayat (6)

Kebijakan pembatasan lalu lintas tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong para pemakai angkutan pribadi beralih ke angkutan umum tetapi juga untuk mengarahkan agar dapat disediakan sistem angkutan umum yang memadai.

Cara-cara yang akan diterapkan dalam rangka pembatasan lalu lintas pribadi sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang tepat yang antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan perparkiran, diberlakukannya perpajakan dan biaya izin tahunan yang lebih tinggi maupun diberlakukanya "Area Licensing System

ayat (7) s.d 1)

Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Proyeksi pelayanan air bersih ditingkatkan menjadi 38 m3/dtk pada tahun 2010 yang dihitung berdasarkan kebumhan domestik/mmah tangga per orang per hari ditambah dengan proyeksi kebutuhan perkantoran, perdagangan, jasa, industri dan pelabuhan.

Kondisi eksisting kemampuan produksi pada tahun 1999 adalah sebesar, 16,13 m3/dtk meningkat menjadi 17,68 m3/dtk pada tahun 2000 dan mencapai 38 m3/dtk pada tahun 2010.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (i) dan (2)

Cukup jelas.

ayat (3) huruf a

Normalisasi sungai adalah upaya yang dilakukan terhadap badan sungai sehingga kapasitas badan sungai sesuai dengan debit air yang diinginkan dengan masih memperiahankau pola alamiali sungainya.

huruf b s.d. d

Cukup jelas.

ayat (4) dan (8)

Cukup jelas.

Pasal 22 huruf a

Sebagian besar kebutuhan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipenuhi dari hasil pengolahan air baku yang berasal dari waduk Jatiluhur melalui Kanal Tamm Barat dan sebagian kecil dari sungai Cisadane.

huruf b

Saluran irigasi adalah saluran air permukaan yang berfungsi untuk menyalurkan air ke lahan pertani¬ an terutama pada wilayah Barat Laut, Timur Laul dan Selatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasai 24 ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Pengelolaan sampah dari sumber, baik dari rumah tangga maupun instansional ditangani secara berjenjang, dari sumber ke lokasi penampungan sementara sampai ke lokasi pembuangan akhir. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana s a m p a h hams diupayakan pengelolaan yang diduKung oleh teknologi tepat guna.

Pembakaran sampah secara individu sudah sejak lama dilarang melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penimbunan sampah secara terbuka (dumping sysiem) juga tidak dilakukan.

Cara penanganan yang dilakukan hingga saat ini di tempat pembuangan akhir adalah sanitary landlill. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan prasarana sampah perlu segera ditindak lanjuti pemanfaatan teknologi incenerator sebagai cara pembakaran sampah. Teknologi incenerator yang akan dimanfaatkan adalah incenerator yang mampu menghasilkan emisi/limbah sesuai dengan ketenman baku mutu diijinkan udara yang Surat Keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

ayai(4)

Lokasi pembuangan akhir limbah bahan berbahaya beracun (83) terletak di Cibinong yang dikelola oleh pihak swasta. Berbagai kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun di Daerah khusus Ibukota Jakarta wajib membuang limbah tersebut ke lokasi dimaksud yang pelaksanaannya diatur dalam ketetapan tersendiri. Untuk lebih mengamankan cara penanganan di lokasi sumber limbah sampai ke tempat pembuangan akhir perlu disediakan beberapa lokasi p e n a m p u n g a n pemilihan lokasinya sementara yang harus m e m e n u h i kriteria, t e m t a m a kriteria tidak mengganggu lingkungan hidup, kriteria keselamatan kerja, dan dekat ke jalan arteri menuju Cibinong.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Fasilitas telekomunikasi yang terjamin keandalan¬nya dimaksud adalah pelayanan telekomunikasi berlangsung 24 jam dengan kualitas suara, kecepatan dan ketepatan akses yang tinggi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan pola sifat lingkungan adalah pengelompokan lokasi lingkungan atau kawasan yanA memiliki kesamaan dkinjau dari segi kependudukan, bangunan, kegiatan ekonomi dan nilai tanah sehingga membentuk pola yang

digolongkan dalam Daerah Padat, Daerah Kurang Padat dan Daerah Tidak Padat.

Berdasarkan pola sifat lingkungan dan nilai KLB yang ditetapkan pada setiap lokasi/kawasan, ukuran intensitas ruang lainnya yainj nilai KDB, Ketinggian Bangunan,' KDH dan KTB ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabei 03, Tabel 04, dan Tabel 05 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Daya dukung dan daya tampung kawasan merupa kan indikator kemampuan suatu kawasan mendukung dan menampung besaran fungsi ruang. dukung Penetapan daya tampung dan daya dipengaruhi beberapa variabel yaitu kondisi infrastmkmr, kelayakan investasi, arsitektur kota, dan jumlah penduduk dan tenaga kerja formal yang dapat ditampung. Berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung ini, intensitas ruang dijabarkan menjadi Koefisien Lantai Bangunan di k o t a m a d y a sebagaimana tercantum Gambar 34, Gambar 35, Gambar 36, Gambar 37, dan Gambar 38 Lampiran II Peramran Daerah ini. Terhadap bangunan yang sudah berdiri perizinan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini boleh tetap dilaksanakan dan dapat melakukan renovasi sesuai dengan izin yang memiliki selama tidak merubah struktur utama dan bangunannya dengan tetap melunasi kewajiban denda yang melekat di dalam perizinan yang dimiliki.

huruf b Cukup jelas.

huruf c

Dalam penetapan besaran ruang di tiap lokasi dan atau kawasan berdasarkan fungsi tertentu, nilai KLB mempakan komponen awal yang dapat meng¬ gambarkan besaran mang (seluruh luas lantai bangunan) yang direncanakan dan dapat digunakan

untuk penetapan komponen-komponen lai yang terdapat pada tabel intensitas ruang. ayat (1) huruf d

Besaran nilai dalam komponen intensitas mang akan diperoleh dari tabel setelah nilai KLB ditetapkan pada suatu lokasi dan atau kawasan masing-masing, nilai maksimal KDB dalam prosentase, nilai maksimal ketinggian bangunan dalam lapis/lantai, nilai minimal KDH dalam prosentase, dan nilai maksimal KTB dalam prosentase.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 huruf a

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat pada taliun 2010 sebesar 1.350.000 jiwa mempakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :

-	Kecamatan	Tanah Abang	246.300	j i w a
-	Kecamatan	Menteng	137.500	j i w a
-	Kecamatan	Senen	143.600	j i w a
-	Kecamatan	Cempaka Putih	118.800	j i w a
-	Kecamatan	Johar Baru	119.400	j i w a
-	Kecamatan	Kemayoran	288.600	j i w a
-	Kecamatan	Sawah Besar	159.000	j i w a
_	Kecamatan	Gambir	136.800	iiwa

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Pusat, tenaga kerja formal yang dapat ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.800.000 jiwa ;

huruf b

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2010 sebesar 2.200.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan	Penjaringan	440.700	j i w a
Kecamatan	Pademangan	296.600	j i w a
Kecamatan	Tanjung Priok	452.600	j i w a
Kecamatan	Koja	430.000	j i w a
Kecamatan	Kelapa Gading	208.400	j i w a

IJ ) Tahu: ?9 No. 23

-127-

- Kecamatan Cihncing : 340.000 jiwa

Kecamatan Kepulauan Seribu : 31.700 jiwa

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung
tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya
Jakarta Utara, tenaga kerja formal yang dapat
ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar
1.800.00 jiwa ;

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat pada tahun 2010 sebesar 2.950.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Kebon Jeruk : 490.000 jiwa : 444. 100 jiwa - Kecamatan Kembangan - Kecamatan Cengkareng : 435.800 jiwa : 295.200 jiwa - Kecamatan Kalideres - Kecamatan Grogol Petamburan : 365. 100 jiwa - Kecamatan Palmerah : 3 18.000 jiwa - Kecamatan Tambora : 389.900 jiwa : 211.900 jiwa - Kecamatan Taman Sari Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Barat, tenaga kerja formal yang ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.400.000 jiwa ;

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan pada tahun 2010 sebesar 3.200.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :

: 458.300 jiwa Kecamatan Kebayoran Lama : 333.000 jiwa Kecamatan Pesanggrahan : 29 5.9 00 jiwa Kecamatan Cilandak Kecamatan Pasar Minggu : 376.600 jiwa : 283.100 jiwa Kecamatan Jagakarsa Kecamatan Mampang Prapatan : 222.800 jiwa Kecamatan Pancoran : 239.000 jiwa Kecamatan Kebayoran Bam : 293.700 jiwa Kecamatan Setia Budi : 294.700 jiwa Kecamatan Tebet : 402.900 jiwa

huruf c

huruf d

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Selatan, tenaga kerja formal yang dapal ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.600.000 jiwa ;

humf e

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 2010 sebesar 2.800.000 jiwa merupakan akumulasi persebaran penduduk kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan	Pasar Rebo	130.600 jiwa
- Kecamatan	Ciracas	162.300 jiwa
- Kecamatan	Cipayung	203.000 jiwa
- Kecamatan	Kramat Jati	3 02.100 jiwa
- Kecamatan	Jatinegara	344.600 jiwa
- Kecamatan	Duren Sawit	438.000 jiwa
- Kecamatan	Matraman	214.000 jiwa
- Kecamatan	Pulo Gadung	3 19.500 jiwa
- Kecamatan	Makasar	196.800 jiwa
- Kecamatan	Cakung	489.100 jiwa

tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Timur, tenaga kerja formal yang dapat ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.600.000 jiwa ;

Pasal 31

Pasal 32 huruf a butir Ib

Cukup jelas.

Pertumbuhan penduduk kota Jakarta yang sangat pesat sejak pelaksanaan Rencana Induk Jakarta 1965-1985 berakibat pada penyediaan lahan perumahan. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan pemmahan yang siap bangun dan relatif rendahnya kemampuan finansial masyakarat untuk membiayai pembangunan penunahan mengakibatkan terbentuknya kawasan-kawasan kumuh pada beberapa bagian kota.

Dalam rangka pelaksanaan program perbaikan lingkungan dan pembangunan rumah susun, Peme-

rintah Daerah memprioritaskan peremaj aan kawas¬ an-kawasan kumuh secara bertahap. Berdasarkan metode pembobotan terhadap kriteria kekumuhan yang telah dibakukan, kawasan kumuh digolong¬ kan dalam 3 (tiga) kategori yaitu kumuh berat, sedang dan ringan.

Kriteria kekumuhan meliputi : kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, air bersih, pembuangan limbah dan sampah.

Pasal 33 huruf a

.

Cukup jelas.

- Pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu diamr di dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu KotamadyaJakarta Utara. Upaya mempertahankan hijau alami dilakukan melalui areal penetapan 40% luas pulau untuk penghijauan, sedangkan sisanya dapat dikembangkan sarana pariwisata.
- Selain itu vegetasi asli pulau dan atau khas kepulauan tetap dipertahankan.

huruf c s.d. c

ayal (1)

huruf b bulir 2.a

Cukup jelas.

**Pasal** 34 **s.d** 37

Pasal 38

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan komponen intensitas ruang adalah angka dan prosentase dan KLB, KDB, KB, KDH dan KTB.

Yang dimaksud dengan 5 (lima) tingkatan nilai KLB adalali 5 tingkatan besaran ruang auiu luas seluruli lantai bangunan yang diperkenankan uatuk dibangun di dalam perpetakan / daerah perencanaan yang telah ditetapkan batas-batasnya berdasarkan fungsi tertentu dari rencana tata mang.

Lima tingkatan nilai KLB adalah sebagai berikut :

1. Nilai KLB rata-rata 1,0 mempakaJi nilai KLB antara angka 0,4 sampai dengan 1,6 •

- Nilai KLB rata-rata 2,0 merupakan nilai KLB antara angka lebih besar dari 1,6 sampai dengan 2,4.
- Nilai KLB rata-raU 3,0 merupakan nilai KLB antara angka lebih besar dari 2,4 sampai dengan 3,5.
- 4. Nilai KLB rata-rata 4,0 merupakan nilai KLB antara angka lebih besar dari 3,5 sampai dengan 5,0.
- Nilai KLB lebih besar dari 5,0 sampai maksimal 10,0.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Wilayah Kepulauan Seribu terdiri atas kawasan yang termasuk dalam Taman Nasional Laut Kepuluan Seribu serta kawasan di luar kawasan Taman Nasional Laut tersebut. Batas-batas zona inti, zona pelindung, zona pemanfaatan ditetapkan berdasar¬kan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/Um/7/1982 tentang Penunjukkan Perairan sekitar Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 108.000 Ha sebagai Cagar Alam Laut.

Keputusan tersebut diperbahami dengan kepumsan Menteri Kehutanan nomor 162/Kpts-11/95 teniang Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas ±108.000 Hamenjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.

Zona inti ditetapkan sebagai kawasan perlindungan habitat penyu sisik, perlmdimgan temmbu karang, dan hutan mangrove. Kegiatan yang diperkenankan pada zona ini hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan habitat dan ekosistem serta kegiatan penelitin untuk menunjang 'perlindungan lingkungan tersebut.

Pulau-pulau yang tercakup dalam zona mti adalah Pulau Gosong Rengat, Pulau Peteloran Barat,

ayat (2)

Pasal 39

Pasal 40 ayal(1)

Peteloran Timur, Pulau Penjaliran Barat, Pulau Penja-liran Timur, Pulau Kayu Angin Bira daii Pulau Belanda.

Zona Pelindung sebagai kawasan pelindung ekosistem dengan pemanfaatan terbatas meliputi Camping Ground, rekreasi pantai, olah raga perahu, fasilitas shelter, MCK, tangki-tangki penampungan air bersih dan tempat sampah. Pulau-pulau yang tercakup dalam Zona Pelindung adalah Pulau Kelor Barat, Pulau Kelor Timur, Pulau Lipan, Sebam Besar, Pulau Sebaru Kecil, Pulau Yu Barat, Pulau Yu Timur, Pulau Bunder, Pulau Nyamplung dan Pulau Rengat.

ayat (2)

Zona pemanfaatan dan zona penyangga mempakan kawasan pemanfaatan unmk pariwisata secara intensif, pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional dan perlindungan kawasan dari gangguan masyarakat luar.

Khusus terhadap pulau-pulau yang peruntukaimya cagar alam pada Zona pemanfaatan dan zona penyangga diberlakukan ketentuan yang lebih ketat agar ekologi pulau dan temmbu karangnya tidak msak. Kegiatan wisata terbatas adalah aktifuas olah raga perairan dan rekreasi pantai yang tidak meng¬ganggu habitat ikan hias, temmbu kiarang, serta tidak mengambil patahan-patahan karang atau benda lam sebagai suvenir dan kegiatan camping ground yang tidak memsak vegetasi-pulau.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41 ayat(1)

Cukup jelas

ayat (2) huruf a

Tanaman keras berkanopi besar adalah tumbuhan jenis pepohonan berdaun lebat dan berusia panjang yang memiliki diameter lingkaran tutupan daun relatif besar (lebih dari 5 meter). Pengembangan penggunaan tanaman keras berkanopi besar dalam pemeliharaan dan pembangunan baru ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas mang terbuka hijau sebagai pam-paru k:ota (pengha-

sil oksigen), kehijauan kota, estetika lingkungan, dan fungsi sebagai peneduh. Pepohonan berkanopi besar cocok dikembangkan di sepanjang sisi sungai, sekeliling lapangan olah raga, halaman gedung, lapangan parkir dan sebagainya. Unaik peneduh di pinggir jalan, dipilih jenis pepohonan yang tingkat guguran daunnya rendah serta perakaran yang tidak memsak jalan/trotoar.

huruf b s.d. g

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 42 ayat(1) s.d. (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemugaran Kawasan Menteng dan Kebayoran Baru, maka kawasan yang telah tergolong mantap, memiliki nilai sejarah, budaya serta arsitektur khas harus dikelola dengan cermat.

Pembahan fungsi pemanfaatan ruang untuk kawasan-kawasan seperti ini harus dikendalikan secara khusus dengan berpedoman kepada ketenman yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya.

Pasal 43 avat (1)

Fasilitas yang dibutuhkan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang hams disediakan berupa kantin, tempat parkir, mang mnggu, mang terbuka peribadatan untuk umum, fasilitas laiimya, di dalam persil atau gedung, jembatan penyeberangan dan sebagainya bagi setempat maupun pengunjung. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut hams dilakukan sebagai integral dari pengembangan kawasan secara terpadu.

ayat (2)

Kebutuhan fasilitas perdagangan/pertokoan dalam ruang yang menyaai seperti mall, plaza, pasar swalayan, dan pertokoan hams ^menyediakan ruangan tempat usaha bagi Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK) seluas 10% dari luas keseluruhan lantai tempat usaha yang dibangun. Keseluruhan

ruang untuk perdagangan dikelola sedemikian rupa sehingga harga sewa tempat usaha dapat dijangkau oleh GUSK, dan barang/jasa yang dijual oleh GUSK diatur agar dapat saling melengkiapi dengan kegiatan utama perdagangan di bangunan/komplek bangunan tersebut. Penyediaan ruangan tempat usaha bagi GUSK ini tidak boleh diahhkan ke lokasi lain atau diganti dengan bentuk apapun.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Pada kawasan campuran perumahan dan bangunan umum terbentuk pita, dipersyaratkan :

- Kebutuhan mang untuk manuver dan parkir kendaraan harus disediakan di dalam perpetakan;
- 2. Menyediakan ruang untuk fasilitas pejalan kaki secara menerus ;
- 3. Menanam pepohonan untuk peneduh di dalam perpetakan.

Pada kawasan campuran perumahan dan bangunan umum berbenmk superblok, dipersyaratkan ;

- Fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana parkir disediakan di dalam areal yang dikelola yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan standar;
- Koefisien Dasar Hijau diwujudkan dengan mang terbuka hijau yang mengandung tanaman pepohonan pelindung.

Besarnya proporsi ruang untuk perumahan disesuaikan dengan kategori pola sifat lingkungan setempat, sebagai berikut :

- Pada kategori padat, ruang untuk perumalian
   3 5% dan bukan perumahan 65%;
- 2. Pada kategori kurang padat, ruang untuk perumahan 50% dan bukan pemmah;an 50% ;
- 3. Pada kategori tidak padat, ruang lontuk peru¬
  mahan 65% dan bukan pemmahan 35%.

Pola sifat lingkungan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ayal (5)

Keputusan Gubernur Kepala Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 1893 tahun 1991 tentang Tindakan Administratif Bagi Perusahaan/Industri/ Kegiatan yang Menimbulkan Kerusakan Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wajib Mengolah Limbah Cair agar memenuhi Baku Mutu Limbah.

ayat(6)

Pasal 44 huruf a

Cukup jelas

Kota (PRK) Panduan Rancang disusun sebagai penjabaran dari RRTRW Kecamatan atas kawasankawasan bersifat strategis dan atau pusat-pusat kegiatan kota sehingga pembangunannya tidak bersifat individual atau per persil tetapi kawasan sehingga diperoleh penataan ruang yang terpadu. Panduan digambarkan Rancang Kotadalam tiga dimensi dalam skala 1:1.000 dan atau 1:500. Pedoman Pembangunan Kota (kawasan) merupakan lanjutan dari Panduan Rancang Kota yang memuat rencana implementasi dari PRK dan antara lain berisikan uraian mengenai pembagian kewajiban pembangunan prasarana, fasilitas sosial, dan fasilitas umum berdasarkan alokasi pemanfaat an mang yang diperoleh masing-masing pemilik tanah, tahapan pembangunan, dan pengelolaan kawasan. Panduan Rancang Kota dan Pedoman Pembangunan Kota (kawasan) ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan menjadi dasar penetapan kewajiban pengembang dalam penerbitan SIPPT.

huruf b s.d f

Pasal 45 huruf a s.d b

huruf c

Cukup jelas

Cukup jelas

Lintasan Fatmawati ~ Kota melalui jalur Blok M -Bundaran HI - Harmoni dengan pembangunan di bawah mulai dari Bundaran tanah (sub-way) Senayan sampai Harmoni, selebihnya dengan dibangun di atas tanah (elevated) Lintasan Duri - Kemayoran melalui jalur perbatas an Tangerang - Duri - Sawah Besar - Kemayoran sampai perbatasan Bekasi, dibangun sebagian di permukaan, sebagian di atas tanah dan kemungkinan sebagian di bawah tanah.

LD Tahun 9 No. 23

Cukup jelas

Pasal 46 huruf a

butir 5

huruf d

s.d f

Meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan air bersih dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan kerjasama dengan pihak swasta atas prinsip kesetaraan, keadilan dan saling menguntungkan.
- b. Tarif air bersih harus terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat.

huruf b

huruf c

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Reservoir pada dasarnya merupakan tempat penyimpanan air sebagai persediaan yang dapat dibedakan atas reservoir alami dan. reservoir buatan. Cekungan di lapisan akifer bawah permukaan tanah, baik akifer bebas maupun akifer tertekan sesungguhnya mempakan reservoir bawah tanah. Pengisian reservoir secara buatan dapal dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui pemasukan langsung, metode infiltrasi buatan dan metode injeksi.

huruf d s.d h

huruf i

dimaksud dengan perlindungan Yang daerah resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah upaya-paya yang dilakukan unmk mencegah terjadinya p e n c e m a r a n membuat seperti septictank yang baik dan memenuhi standar untuk mengolah limbah domestik, pembuangan sampah hams terkendali, mengolah limbah industri dan lain-lain.

Pasal 47 huruf a

Peningkatan kapasitas dan daya tampuag prasarana pengendalian banjir pada tingkat banjir tahunan untuk Banjir Kanal Barat menjadi Cisadane dengan kapasitas 600 M3/detik, daya tampung Cengkareng Drain peningkatan menjadi 510 M3/detik, pembanguaan saluranpenghubung sungai Sunter - Cakang dengan kapasitas 220 M3/detik, pembangunan saluran

Angke - Cisadane dengan penghubung sungai kapasitas 135 M3/detik, dimulainya pelaksanaan Banjir Kanal Timur dengan kapasitas 370 M3/detik serta optimalisasi dan normalisasi 13 sungai utama.

huruf b s.d e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 huruf a

modular adalah Yang dimaksud dengan sistem suatu sistem pengolahan air limbah yang dibuat per paket (permodul) dengan kapasitas kecil (terbatas). dapal diperluas dengan menambah Sistem ini pakte-paket (modul-modul) sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

huruf b s.d e

Cukup jelas

Pasal 50 huruf a s.d c

Cukup jelas

huruf d

incinerator yaitu alat pembakar sampah yang menggunakan prinsip pembakaran sehingga tidak mempunyai dampak terhadap pencemaran udara.

huruf e s.d h Cukup jelas

Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (4)

huruf i huruf j

Cukup jelas

huruf a s.d. c Pasal 51

Cukup jelas

huruf d

SPBUadalah singkatan Penyalur dari Stasiun Bahan Bakar Umum

SPBG adalah singkatan dari Stasiun Penyalur

Bahan Bakar Gas

dimaksud dengan pembangunan SPBGdialokasikan penambahan yang tuaknya pada SPBU yang telah terbangun di atas tanah pemntukan jalur hijau taman, pengaman sungai sebagainya. Hal ini dimaksudkan melaksanakan program "langit buu" secara bertahap.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 52 s.d 53 Cukup jelas

Pasal 54 ayat (1) dan (2)

ayat (3) huruf a

Cukup jelas Cukup jelas

huruf b

Lokasi penting pada pemantauan kiaalitas dan debit air sungai adalah lokasi-lokasi yang terletak diperbatasan wilayah Jakarta dengan Botabek dan lokasi-lokasi yang letaknya di sungai-sungai utama

setelah pertemuan beberapa sungai atau sebelum muara.

ayal (4) dan (5)

Cukup jelas

137-

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56 ayal (1)

Di dalam kegiatan penataan mang, penatagunaan udara juga memiliki nilai yang sangat penting untuk penyediaan koridor tranportasi, telekomunikasi, transmisi listrik, bangunan tinggi, bangunan atas tanah, bangunan atas air dan ruang pandang.

Pemanfaatan ruang udara juga hams memperhati¬kan pengendalian kualitas udara. Penurunan kualitas udara akan mengakibatkan penurunan derajat kesehatan masyarakat dan komponen lingkungan lainnya terutama vegetasi dan populasi bumng. Sebagai kota pantai, di Jakarta terdapat kawasan hutan pantai serta pulau-pulau kecil.

Pulau Rambut dan Pulau Dua merupakan tempat persinggahan burung dari negara lain secara musiman. Populasi burung juga memanfaatkan Pantai Jakarta sebagai tempat mencari makan. Oleh karena itu pemanfaatan mang udara untuk jalur-jalur terbang bumng dari kawasan pantai ke pulau tempat migrasi tersebut perlu dikelola dengan cermat.

ayal (2) huruf a

Pembangunan kota Jakarta selam membawa manfaat bagi masyarakatnya juga menimbulkan kerugian lingkungan yang berakibat penurunan kesehatan masyarakat. Untuk menang gulangi dan sekaligus mencegah penurunan kualitas lingkungan tersebut perlu ditingkatkan program pengembangan hutan kota, penghijauan kota dan pengendalian kualitas udara terhadap sumber-sumber pencemar bergerak yakni kendaraan bermotor dan sumber-sumber pencemar tidak bergerak yakni industri, bangunan umum, rumah tangga dan pembakaran sampali yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dengan gas hasil bakar adalah gas-gas yang terbentuk akibat proses pembakaran bahan bakar khususnya gas C02.

huruf b

Penatagunaan udara secara khusus mengandung beberapa kebijakan yang menyangkut persinggung an antara pemanfaatan ruang udara dengan tanah yaitu :

- Menjaga zona pengamanan lintas penerbangan dan lokasi bandar udara dari kemungkinan pem bangunan yang tidak relevan dengan fungsinya.
- Mengoptimalkan pengembangan bentang alam (skyline) kota, di antaranya dengan mengatur Koefisien Lantai Bangunan dan Tinggi Bangunan termasuk jalan-layang dan/atau susun.
- Pengaturan koridor-koridor dan penggunaan frekuensi radio, microwave, elektromagnetik.
- Pengamran jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik tegangan tinggi.

huruf c

Pemanfaatan udara untuk telekomunikasi ruang antara laui untuk frekuensi radio, gelombang sellular dengan memperhatikan microwave dan batasan ruang dan ketinggian' bangunan yang ditetapkan pada lokasi tersebut.

huruf d s.d g

Cukup jelas

huruf h

Penyusunan panduan rancang kota dan penataan tata letak bangunan sangat berkaitan pemanfaatan mang udara yang perencanaannya ditujukan untuk terciptanya suatu kawasan yang Untuk itu pembentukan kawasan baik berupa unsur alam maupun unsur buatan (contoh Monumen Nasional) perlu diupayakeberadaannya manfaatnya dan bagi masyarakat banyak.

Pasal 57 ayat (1) dan (4)

4) Cukup jelas

ayal (5)

Pengaturan ruang bawah tanah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang. Pemanfaatan mang bawah tanah hams berkesesuaian dengan tata mang muka tanah. Mengingat keterkaitan pemanfaatan ruang tersebut, demi menjaga stabilitas geologi dan kontmuitas geohidrologi kawasan s6rta pengaturan keterkaitan prasarana bangunan tuiggi di ruang bawah tanah baik yang menyangkut hak individu

inaupun publik perlu diatur di dalam ketentuan tersendiri yaitu ketentuan tentang Pedoman Dewatering, ketentuan tentang Hak Pemilikan Bawah Tanah, Ketentuan tentang Hak Pengelolaan Infrastruktur Bawah Tanah.

Terowongan adalah ruang yang di batasi oleh dinding masif yang terbuat dari berbagai macam material (beton, baja dan sebagainya) dan dapat dibentuk berupa dan atau segi banyak:, yang berbentuk memanjang.

Terowongan tersebut digunakan untak jalur rel kereta api bawah tanali/laut, pejalan kaki, atau pengaliran air seperti suplay untuk mengalirkan air sungai/danau di bawah jalan/gunung, atau peng¬gunaan lainnya.

Yang dimaksud dengan piliak yang berkepenungan dalam ayat ini adalah piliak yang memanfaatkan tanah dan mang udara.

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58 s.d 63

Cukup jelas

Pasal 64 humf a

Terhadap bangunan yang dibangun sebelimi berlakunya Peramran Daerali ini, maka pemntukan dan penggunaan bangunan tersebut >Aajib untuk kegiatan yang mendukung sebagai pusat pemerin¬tahan, keolahrdgaan dan rekreasi.

Setelali berlakunya Peraturan Daerah ini, niaka pembangunan yang menyimpang dari fungsi yang mendukung sebagai pusat pemerintalian, olah raga dan rekreasi tidak diperkenankan.

humf <u>bs.de</u>

Cukup jelas

Pasal 65 s. d 70

Cukup jelas

Pasal 71 humfa

Cukup jelas

butir 3

Transfer station adalah suatu lokasi yang dileng kapi dengan peralatan - peralatan yang berfungsi memindahkan sampah dari alat pengangkut dengan daya angkut kecil ke alat f)cngangkut dengan daya angkut yang lebih besar, sehingga pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akliir menjadi efekuf dan efisien.

butir 4

Penempauin incinerator terganmng dari kapasitas alatnya per hari. Untuk kapasitas incinerator 20~m3 perhari dapat melayani 1.200~KK. Peralatan tersebut ditempatkan di lokasi dipo (LPS) dengan areal  $\pm~100~\text{m}2$ ,

butir 5

Cukup jelas

butir 6

Konsep reused, reduced dan recycling (3R) adalah suatu konsep unmk meminimalkan jumlah sampah menuju zero waste. Konsep 3R ini dimulai dari pemilahan di sumber sampah dilakukan yang dengan mendesain bak sampah sehingga memudahkan sampah untuk digunakan kembali {reused), pengurangan jumlali sanipali, dilanjutkan dan dengan mendaur ulang sampah di tempat lain. Penerapan konsep 3R juga dilakukan di LPS dan LPA.

humfb butir 1

Cukup jelas

butir 2

Pembangunan sepuctank komunal dilakukan untuk permukiman dengan kepadatan penduduk sedang 100-300 orang per hektar. Untuk permuyaitu kiman dengan kepadatan penduduk rendah (kurang 100 orang/lia) dibangun septictank individu, sedangkan untuk kepadatan penduduk tinggi (lebih dari 300 orang/ha) dilakukan melalui pembangunan Seprictank sistem sewerage. komunal untuk wilayah utara Jakaru dengan air permukaan tinggi dilakukan dengan penerapan teknologi septictank modified dan di bagian .selatan dikembangkan sepdctank standar.

butir 3 s.d 6

Cukup jelas

butir 7

Berhubung adanya kendala peuangauan sampah di lokasi sumber sampah, maka pelayanan pembuang¬ an sampah tidak akan mencakup 100%. Sampah yang masuk ke saluran umum dan/atau kali akan terbawa ke perairan laut melalui muara sungai. Akumulasi sampah di perairan pantai menimbulkan permasalahan lingkungan, temtama di kawasan pantai eks hutan Angke-Kapuk, Kali Bam dan Cilincing.

huruf c s.d e

Cukup jelas

Pasal 72 s.d 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi dengan mengacu kepada Ketetapan Rencana Kota.

Ketetapan Rencana Kota adalali peui rencana lokasi tertentu pada kedalaman skala 1:1000 yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pembangunan fisik kota.

Pengawasan pemanfaatan mang juga mencakup pengawasan pasca konstmksi temtama terhadap kegiatan-kegiatan industri dan instansional. Instansi yang berwenang wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penegelolaan kualitas ruang sesuai a d a dengan ketentuan-ketenman yang t e m t a m a Keputusan Daerah Daerah Gubernur Kepala Khusus Ibukoui Jakarta tentang penetapan peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku muoi limbah cair di wilayah Daerah Ibukota Jakarta, Keputusan Kepala Daerah Daerah Kliusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pemntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku muoi limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubc^rnur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang

baku mutu udara ambien, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang dngkat kebisingan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang undakan administrasi bagi pemsahaan/industri/kegiatan yang menimbulkan pengmsakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Evaluasi kesesuaian rencana tata mang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimihki.

Salah satu hasil evaluasi adalah mmusan rekomen¬dasi, yakni saran tindak lanjut terliadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

# Cukup jelas

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ntang temtama adalah Izin Pemntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud di atas didukung oleh rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi terkait, temtama rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang tata kota dalam bentuk Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Bangunan, rekomendasi Letak instansi pertanahan, rekomendasi Komisi AMDAL, rekomendasi Manajemen Lalu Lintas. Penerbitan izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Undang-undang Gangguan, Izin Pariwisata, dan atau perizinan lain atas penggunaan tanah/bangunan harus tetap didasarkan kepada ditetapkan pemnmkan tanah yang dalam rekomendasi Ketetapan Rencana Kota.

# Cukup jelas

Pengumuman atau penyebarluasan rencana uta ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79
Pasal 80

dalam pasal ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 81 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Penyelenggaraan musyawarah antara pihak yang berkepentingan untuk menetapkan penggantian yang layak atas kerugian terhadap status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki oleli masyarakat harus mempertimbangkan hak private masyarakat.

Pasal 82

Penggantian yang layak diberikan kepada masya¬rakat yang melepaskan sebagian atau sepenuhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku.

Besarnya penggantian yang layak dapat ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau harga pasar yang berlaku saat itu, atau berupa penyertaan modal atau urun saham, dan atau bentuk fisik lain seperti konsolidasi tanah yang ditentukan berdasar¬kan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pembahan nilai ruang, dengan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan.

Apabila dalam perubahan status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki masyarakat tidak tercapai kesepakatan antara pihak yaiig berkepen¬tingan, maka hal ini tidak meniadakan hak perdata masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain tidak terbatas hanya kepada pihak yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 83 huruf a

Cukup jelas

humf b

Peran serta masyarakat di dalam kegiatan penyu¬
sunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan
dalam bentuk berbagai kegiatan masyarakat yang
timbul atas kehendak dan keinginan sendiri.

Kcgitan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaaian ruang mengacu kepada kaidah, peraturan dan pedoman-pedoman yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban, baik pemerintah maupun masyarakat yang ikut berperan serta wajib mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat, sehingga Pemerintali Daerali wajib menyelenggara kan pembinaan agar kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Bagi Ibukota Jakarta Daerah Khusus masyarakat dikaitkan dengan hirarki rencana tata ruang yang meliputi peran serta masyarakat di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya^ Rencana Rinci Tata Wilayah Kecamatan dan Rencana Teknik Ruang Kota. Peran serta masyarakat dimaksud diatur sebagai berikut :

Dalam rangka penyusunan Rencana Tata ruang Wilayali Daerah Jakarta Khusus Ibukota lingkup peran masyarakat mencakup serta perumusan tujuan, kebijakan dan pengembangan tata mang wilayah propinsi. Kelompok-kelompok masyarakat serta antara lain meliputi institusi kelompok pemuda dan tokoh agama, kelompok profesi dan intelektual yang berkaitan dengan pengem bangan tata ruang Kotamadya.

Cara serta penyampaian pendapat dilakukan dengan melalui penyebaran angket dan atau penyelenggaraan diskusi. Waktu serta dilaku¬kan setiap lima tahun sekali yckni pada" saat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan aiau pada

saal penyelenggaraan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan atau pada saat penyusunan Hencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kliusus Ibukota Jakarta yang baru. Kelembagaan yang menangani kegiatan ini dibentuk tersendiri dan bersifat tidak permanen.

- b. Dalam rangka Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan, lingkup peran serta masyarakat meliputi pengkajian pengembangan lingkungan dan atau proyek. Kelompokkelompok masyarakat yang ikut serta antara lain meliputi LKMD, PKK dan Karang Taruna. Waktu serta dilakukan setiap 5 lahun sekali penyelenggaraan yakni pada evaluasi saat Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan atau pada saat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan. Kelembagaan yang menangani kegiatan ini dibentuk tersendiri dan tidak permanen.
- rangka Penyusunan Rencana c. Dalam Teknik Kota lingkup peran serta masyarakat mencakup pengkajian pengembangan lahan kepemilikan masyarakat. Cara serta penyam diskusi. paian pendapat dengan Kelompok masyarakat yang berperan serta adalah badan swasta/individu.Waktu sertanya usaha Kelembagaan setiap kasus. pelaksanaannya ditangani oleh Komisi Tetap yang ciibentuk oleh merupakan Gubernur yang keanggotaannya gabungan dari Instansi Pemerintah Daerah dan Unsur Masyarakat.

Pasal 86

Tata cara peran sena masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan potensi dan masalah tata ruang.

Penyampaian saran, penimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan atau masukan sebagai¬ mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Peran serta masyarakat dalam pengciidalian pemanfaatan ruang wilayah disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

Cukup jelas

Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran perizinan rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat antara lain berupa ;

- a. Pencabutan surat izin penunjukan penggunaan tanah ;
- b. Pencabutan izin mendirikan bangunan.

Termasuk dalam sanksi administrasi disini adalali pengenaan retribusi penyesuaian rencana peman faatan lahan dan atau pelampauan KLB dan atau Ketinggian Bangunan sesuai Tabel 03, Tabel 04, dan Tabel 05 Lampiran I yang pengenaan retribusinya tergolong sebagai penaUi.

Sedangkan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran rencana tala ruang didasarkan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Peme¬rintah Nomor 30 Tahun 1980 teniang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 87

Pasal 88 angka 1

angka 2 dan 3

Pengenaan sanksi perdaia dan sanJvsi pidana dilakukan terhadap penyimpangan rencana dilakukan ruang baik yang masyarakat maupun yang berwenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89 s.d 90

Cukup jelas

Pasal 91

administrasi dan bentuk geografis Luas wilayah bervariasi masing-masing kotamadya sangat sehingga menimbulkan faktor kesulitan di dalam teknik penyajian petanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut peta yang berskala 1:20.000 sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat dikon versikan ke dalam skala garis tanpa mengurangi informasi yang dimuat pada peta 1:20.DO0.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93 huruf a

Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang digunakan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, harus memberikan informasi mengenai rencana yang jelas tata ruang yang dimaksud. Dengan skala 1:5.000, rencana tata akan memberikan informasi yang jelas ruang ini dan mudah dipahami mengenai rencana peruntukan laiian dan hitensitas ruang pada suatu lingkungan, yang dikenali dari nama jalan, letak geografis atau orientasi kawasan yang dimaksud, sehingga apabila """peta rencana tata ruang ini dipasang di Kantor Kcluralian, di jalan-jalan, atau lokasi lainnya dapai dimengerti oleh masyarakat dan mudah diperagakan karena bidang peta tidak terlalu besar.

huruf b

Peraturan mintakat merupakan produk hukum yang memuat prinsip-prinsip dan metoda penjabaran rencana tata ruang ke rencana tata ruan^ yang lebih terperinci (detail). Berdasarkan studi yang dilaku-

kan uniuk Daerali Khusus Ibukoia Jakarta, wilayah Ibukota Daerah Khusus Jakarta digolongkan menjadi 8 (delapan) Wilayali Pengembangan (WP), sedangkan permintakannya dapat dibagi ke daiam 40 sub berdasarkan mintakat, dan selanjutnya tiap mintakat dibagi menjadi blok-blok yang jumlahnya terdiri sekurang-kurangnya 10 blok dan sebanyak-banyak 25 blok. Mengacu ke rencana struktur tata ruang yang telah ditetapkan maka komponen'utama pembentuk ruang yakni kawasan kawasan pemukiman, kawasan prospektif, dan pusat kegiatan dijabarkan ke dalam blok-blok mintakat penyempurnaan hijau penyempurnaan hijau binaan, wisma dengan fasilitasnya, wisma bangunan u m u m dengan fasilitasnya, karya pemerintahan beserta fasilitasnya, karya bangunan u m u mbeserta fasilitasnya, karya taman dengan fasilitasnya, fasilitas umum beserta fasilitas pendukungnya, karya industri dan pergudangan, serta prasarana wilayah.

Penjabaran peruntukan tersebut ke dalam blok-blok mintakat berpedoman kepada kriteria yang telah ditetapkan di dalam metodologi.

Cukup jelas

Untuk dapat mengakomodasikan tuntutan kebutuh—an perkembangan sosial ekonomi dan pengaruh globalisasi perekonomian, dalam rangka pemanfa—atan ruang kota secara efisien dan efektif sesuai dinamika perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat, maka Gubernur Kepala Daerah dapat melakukan perubahan peruntukan ruang dalam Rencana Rinci Tata' Ruang Wilayah Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a) Penyesuaian rencana peruntukan ruang hanya diperkenankan di kawasan dengan tipologi dinamis, tipologi peralihan menuju dinamis, dan tipologi peralihan menuju mantap.
- b) Penyesuaian rencana peruntukan ruang harus dapat memenuhi standar sarana kota atau fasilitas sosial dan fasilitas umum secara proporsional sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

huruf c s.d e

Pasal 94 ayat (1)

LD Tahui No. 23

c) Tanah yang rencana peruntukan ruangnya akan disesuaikan harus telah dikuasai oleh pemohon secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Penyesuaian rencana peruntukan ruang lidai(
  boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah
  ini.
- e) Luas keseluruhan tanah yang rencana peruntukannya disesuaikan tidak melampaui 10% dari luas total kawasan dengan tipologi dinamis, tipologi peralihan menuju dinamis dan tipologi peralihan menuju mantap di tiap wilayah kecamatan yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) tahun.
- f) Penyesuaian rencana peruntukan ruang tersebut secara keseluruhan diberitahukan oleh Gubernur kepada Dewan selambat-lambatnya sekali dalam setahun untuk selanjutnya disah¬kan oleh Dewan.

ayat (2)

Cukup jelas

14 9-

Pasal 95 100

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

#### DATTAR LAMPIRAN I

- Tabel 01. RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Tabel 02. KONDISI DAN RENCANA BADAN AIR PERMUKAAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Tabel 03. INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
  BANGUNAN UMUM, CAMPURAN DAN INDUSTRI/PER¬
  GUDANGAN DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)
  LEBIH BESAR DARI 20% UNTUK TIPE BANGUNAN TUNGGAL/
  RENGGANG
- Tabel 04. INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN
  DAN BANGUNAN UMUM DENGAN KOEFISIEN DASAR
  BANGUNAN (KDB) MAKSIMAL 20% UNTUK TIPE BANGUNAN
  TUNGGAL/RENGGANG
- Tabel 05. INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
  BANGUNAN UMUM, CAMPURAN DAN INDUSTRI/PERGU¬

  DANGAN DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

  LEBIH BESAR DARI 20% UNTUK TIPE BANGUNAN RAPAT/

  DERET
- Tabel 06. STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUM/FASOS)

- 151 -

Penjelasan Tabel 02

Pencapaian peningkaian luas badan air dilakukan melalui :

- Perluasan situ Babakan dari 23 Ha menjadi 32 Ha
  Perluasan situ Mangga Bolong dari *ll.00* Ha menjadi 12.02 Ha
  Perluasan situ Rawa Dongkel dari 9.00 Ha menjadi 12.02 Ha
  Perluasan situ Kelapa Dua Wetan dari 4.5 menjadi 10.00 Ha
  Perluasan situ Rawa Rorotan dari 20 Ha menjadi 50 Ha
  Perluasan situ Kendal dari 10 Ha menjadi 27.5 Ha
- 2. Pembangunan lokasi yang potensial untuk parkir air di kawasan Kali Cakung Lama seluas 23.68 Ha, Sal. Penghubung Rawa Bebek seluas 29,02 Ha, Kali Sunter 40 Ha, Kali Cipinang 30,96 Ha, Kawasan seputar situ Kelapa Dua Wetan 32 Ha, Kali Cilangkap 35 Ha aliran Kali Ciliwung di Kecamatan Pasar Rebo seluas 494,5 Ha, Waduk Halim tahap II seluas 45 Ha kawasan-kawasan rendah di Kecamatan Jagakarsa 187 Ha, Kecamatan Pasar Minggu 136 Ha, Kecamatan Cilandak 45 Ha, Kecamatan Kebayoran Lama 6 Ha, Kecamatan Kembangan 12 Ha, Kecamatan Kali Deres 19.68 Ha, Kecamatan Penjaringan 24 Ha.
- 3. Pembangunan Banjir Kanal Timur seluas 230 Ha yang terdapat di wilayah :
  - a. Jakarta Timur seluas 100 Ha
  - b. Jakarta Utara seluas 130 Ha
- 4. Normalisasi Kali/Sungai yang melalui 2 Propinsi seluas 195,4 Ha
- 5. Normalisasi Kali/Sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 47,01 Ha
- 6. Nonnalisasi Sal. Sub makro seluas 40.83 Ha

Tabel 01

# RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

				TAR	GET 2005	(HA)					TAR	GET 2010	(HA)			
NO.	JENIS	JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%	JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%	
I	HIJAU LINDUNG A. CAGAR ALAM 1. DARATAN	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35		0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35		
	2. KEPULAUAN	0,00	170,87				170,87			170,87				170,87		
	B. HUTAN LINDUNG	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	44,76		0,00	44,76				44,76	44,76	
	C. HUTAN WISATA	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82		0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82		
	JUMLAH	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,50	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,50	
II	HIJAU BINAAN A. RTH FASUM 1. HUTAN KOTA/TMN. KOTA/TN	165.57	112,98	39,59	210,50	258,25	786,89		224,17	128,98	49,58	408,90	483,15	1.294,78		
	2. LAPANGAN OLAHRAGA	35,25	106,80	16,80	176,80	162,90	498,55		35,25	106,80	16,80	176,80	162,90	498,55		
	B. PEMAKAMAN	37,95	65,33	151,21	145,14	166,85	566,48		37,95	67,20	151,21	228,26	260,56	745,18		
	C. RTH FUNGSI PENGAMAN															
	1. TEGANGAN TINGGI	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70		0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	47,40		
	2. JALAN TOL & MEDIAN JALAN	13,89	271,40	25,05	108,96	275,44	694,74		120,03	557,61	271,40	499,19	809,00	2.257,24		
	3. SUNGAI	2,00	44,14	31,85	98,65	91,00	267,64		3,49	66,64	36,65	155,53	136,63	398,94		
	4. KHUSUS					115,00	115,00						115,00	115,00		
	D. PENGHLIAUAN PULAU	0,00	51,00				51,00		0,00	190.00				190,00		
	E. RTH BUDIDAYA PERTANIAN															
	1. KEBUN BIBIT	0,00	10,51	8,06	15,18	0,00	33.75		0,00	10,51	10,51	76,80	0,00	97,82		
	2. SAWAH	0,00	198,14	206,92	8,20	593,51	1.006,78		0,00	256,29	198,14	7,54	381,94	843.91		
	3. PERTANIAN DARAT	28,63	498,63	661,06	992,17	753,48	2.933.98		28,63	950,60	393,58	458,98	883,39	2.715.19		
	JUMLAH	283,29	1.382,63	1.140,54	1.755,60	2.416,44	6.978,51	10,19	449,52	2.358,33	1.151,57	2.012,01	3.232,58	9.204,01	13	
	JUMLAH I DAN II	283,29	1.723,43	1.140,54	1.755.60	2.416,44	7.319,31	10,69	449,52	2.699,13	1.151,57	2.012,01	3.232,58	9.544,81	13.	

### Keterangan:

- No. II. A. 1 rencana pengembangan hutan kota, taman lingkungan/tempat bermain yang diperoleh dari peremajaan kawasan kumuh dan luas RTH untuk pemanfaatan non hijau di GOR Senayara. Taman Ria, Komplek MPR. Dephut Manggala = 58.6 HA, Hutan Pluit, Kampus UI, Ragunan, Pramuka Cibubur, JIEP Pulogadung;
- $No. \ II. \ A. \ 2 \quad adalah \ ruang \ terbuka \ hijau \ yang \ digunakan untuk lapangan \ olahraga \ termasuk lapangan \ golf \ ;$
- No. II. B rencana diperoleh dari perluasan pemakaman seluas ± 179 Ha;
- No. II. C. 2 rencana termasuk RTH yang berfungsi sebagai pengaman jalan tol dan penghijauan pada daerah milik jalan yang dikelola Pemda Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- No. II. C. 4 adalah RTH Fungsi pengaman khusus pada Pelud Halim Perdana Kusuma dan mabes TNI
- No. II. D. Perluasan penghijauan pulau diperoleh dari realisasi penetapan RTH sebesar 40% dari luas pulau yang dikembangkan untuk pemanfaatan bangunan umum / penunjang pariwisata.

  No. II. E. 1, 2 & 3 luas RTH budi daya pertanian yang dipertahankan sebagai RTH seluas ± 3.657 Ha dari luas pertanian eksisting ± 11.225 Ha yagn sebagaian merupakan pemanfaatan non RTH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

LD Tahun 1999 No. 23

Tabel 02 KONDISI DAN RENCANA PENATAA., BADAN AIR PERMUKAAN DI DKI JAKARTA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

	JENIS			KEADAA	N SEKARAN	G (Ha)			TARGET 2010 (Ha)								
		JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%	JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI 5	%	RENCANA PENCAPATAN	
1	SITU-SITU	1,9	10	-	57	39,5	108,4		1,9	20,5	-	67,2	78,02	167,62		- Peningkatan melalui perluasan	
2	WADUK	18,5	181,97	12,2	3	15,8	231,47		18,5	205,97	43,85	624,27	549,7	1,442,29		situ yang masih memungkinkan - Pemb. lokasi yang potensial untuk parkir air	
3	BANJIR KANAL	92,3	44	46			182,3		92,3	174	46		100	412,3		- Peningkatan melalui pemb.	
4	KALI / SUNGAI YANG MELALUI 2 PROPINSI	38,6	223,44	90,05	30	163	545,09		50,18	290,47	127.06	49	223,78	740,49		B. Kanal Timur seluas 230 Ha - Peningkatan melalui normalisasi	
5	KALI / SUNGAI DI DKI JAKARTA	12,99	83,36	26,82	13,09	20,55	156,81		16,88	108,36	34,86	17,01	26,71	203,82		- Peningkatan melaalui normalisasi	
6	SAL. SUB MAKRO	8,56	93	19,26	30,67	52,71	204,2		10,27	111,6	23,11	36,8	63,25	245,03		- Peningkatan melælui normalisasi	
7	SAL. IRIGASI	-	46,10	16,27	32,78	62,45	157,6		-	46,10	16,27	32,78	62,45	157,6			
	JUNIAH	172,85	681,87	210,6	166,54	354,01	1,585,87	2,41	190,03	857	291,15	827,06	1,103,91	3,369,15	A,92		

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Tabel 03
INTENSITAS RUANG PEMANFAATAN PERMUKIMAN, BANGUNAN UMUM, CAMPURAN DAN INDUSTRI / PERGUDANGAN, DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20% UNTUK TYPE BANGUNAN TUNGGAL / RENGGANG

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

VETINGGIAN	JARAK BEBAS		PAD	TAC			KURANG	PADAT			T	DAK PADA	Т
BANGUNAN	SAMPING / BELAKANG	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal
1	4,0	0,6	60%	15%	80%	0,5	50%	20%	75%	0,4	40%	25%	70%
2	4,5	1,2				1,0				0,8			
3	5,0	1,8				1,5				1,2			
4	5,5	2,4				2,0				1,6			
5	6,0												
6	6,5							0.544	754	20	250/	30%	70%
7	7,0	3,0	55%	20%	75%	2,5	45%	25%	75%	2,0	35%	3076	70%
8	7,5												-
9	8,0												
10	8,5												
11	9,0												
12	9,5	2.5	50%	20%	80%	3,0	40%	25%	75%	2,5	30%	30%	70%
13	10,0	3,5	30%	20%	0078	3,0	4076	2370	7370	2,0	3070	0074	
14	10,5												
15	11,0												
16	11,5												-
17	11,5												
18	12,5												
1	12,5	4,0	45%	25%	75%	3,5	35%	30%	70%	3,0	25%	35%	65%
1		4,0	4570	2070	1576	5,5	0070		10.0	, ,,,			
24				*									
25										0.47,25	22000	F 12	C
23										-17 6.3	100 100 A	击时4	
i	12,5	4,5	40%	25%	75%	4,0	30%	30%	70%	1. 据书	7		4-
- 1	12,0	1,0	10.0							4.7 CT 31 1 44 4 6 6	-	1	2
32										4 1			
33											La Ser	90 J.C.S.	1
1										1		P	3144×
i	15,0	5,0	40%	25%	75%	4,5	30%	30%	70%		E Hou	7.3	100
1.	10,0	0,0				,,,,,					186	-0'	24
40											Managar.		
41					-					7, 7	a hal	STORY INT	
1										1			1
i	15,0	6,0	40%	30%	70%	5,0	30%	35%	65%	100		100	
i	10,0	0,0	4070	00.00	10.0	0,0	0071	0070	0070	0.4		4.5	
48										1.00			
49						ser Callon	W. C. C.	Si L	1	-434,1516	7. 24.	272714	100
1							14				3		
1	15,0	7,0	40%	30%	70%	37.7	的影響						1. 12. 13
1										1		1000	
64				7		the state of the s			1	143.51P	1	TENTIL	1.18
65							27734	क्ष्मभा ज	- India	()是2世)	第150	<b>新沙拉</b>	Start.
1								No.		1	3		1
	15,0	8,0	40%	35%	70%	1 / 1 150			140.0		4. 5.4		14.7
1						150	in the		der.	1			1.25.43
80						1 Like	a.		de La	Sec. II.	1	27	
81						16.4	3.4			2.10	1000	112.203.42	
1						200	14 48			100	Pasture and	and the	The same
	15,0	9,0	40%	35%	70%		211			Trans.	All the second	14. 1. 1	
1						and the same	14-14-15		gran Tall	1.15	3	17.4	2 140
96								145 15	1	3.74	97.	13 13 Pag.	Will -
							35-15			431 64		2-11-6	1400
97 ke atas	15,0	>9,0	40%	40%	70%	wingsmodel i			1 111			等一步	230

Keterangan :

KLB : Kocfisien Lantai Bangunan

KTB: Koefisien Tapak Basemen

KDH: Koefisien Dasar Hijau Catatan:

Jarak bebas samping dan belakang khusus industri / pergudangan mengikuti ketentuan jarak bebas tersebut di atas dengan ditambah 1 (satu) meter dan untuk pemanfaatan permukiman khusus rumah tinggal sampai dengan 2 (dua) lantai mengikuti peraturan bangunan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Tabel 04
INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
DAN BANGUNAN UMUM DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)
MAKSIMAŁ 20% UNTUK TYPE BANGUNAN TUNGGAL / RENGGANG

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

KETINGGIAN	JARAK BEBAS		PADAT			KURANG PADA	T		TIDAK PADAT	
BANGUNAN	SAMPING / BELAKANG	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal
1 2 3	4,0 4,5 5,0	0,2 0,4 0,6	35%	65%	0,2 0,4 0,6	40%	60%	0,2 0.4 0,6	45%	55
4	5,5	0,8			8,0			0,8		
5	6,0 6,5									
7	7,0	1,6	35%	65%	1,4	40%	60%	1,2	45%	55
8	7,5									
9	8,0									
10	8,5									
11	9,0	- 1								
12	9,5 10,0	3,0	35%	65%	2,5	40%	60%	2,0	45%	55'
13 14	10,5	3,0	3370	05/6	2,0	40%	00%	2,0		
15	11,0									
16	11,5									
17 18	11.5 12,5 12,5									
1		3,5	40%	60%	3,0	45%	55%	2,5	50%	50'
. 24								Commence of the Commence of th	David Co.	C
25 I					,			72 ST	50年。 10年	
1	12,5	4,0	40%	60%	3,5	45%	55%			
32								3	Contract of the Contract of th	
33										
1.	15,0	4,5	40%	60%	4,0	45%	55%			
40								0.0		
41										
1	15,0	5,0	45%	55%	4,50	50%	50%			
48							1.1747 -17410 87	6	420/4	-
49					31.		1			
- 1	15,0	6,0	45%	55%					Par La	
i									1	
64							200			4.7
65								<b>有一种多人</b> 。		
	15,0	7,0	45%	55%				La Sales	Ar !	10 5/4
i 1	15,0	0,7	43/4	3376			关节 经	7.2 A 4.3		7: 1
80					100	Militar N	1.00			
81							27. 27. 25.		***	37 174. 7
1	45.0	0.0	5004				ر مارولده			
	15,0	8,0	50%	50%		Garage	in the said	51 A	Et	
96							73.0		ALCOHOL:	
1						8		A STATE	Section .	7000
97 ke atas	15,0	9,0	50%	50%		4	44.25		4	-
					1	-	Sec. 23. 4	1.75		

Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan

KDH: Koefisien Dasar Hijau

KTB: Koefisien Tapak Basemen

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Tabel 05
INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
BANGUNAN UMUM DAN CAMPURAN
DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20%
UNTUK TYPE BANGUNAN RAPAT / DERET

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

VETINOCIAN	JARAK BEBAS		PAC	TAC			KURANG	PADAT			Т	IDAK PADA	T
BANGUNAN	SAMPING / BELAKANG	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksima
1	4,0	0,7	75%	10%	85%	0,6	60%	15%	80%	0,5	50%	20%	75%
2	4,5	1,5				1,2				1,0			
3	5,0	2,2				1,8				1,5			
4	5,5	3,0				2,4				2,0			
5	6,0												
6	6,5												
7	7,0	3,5	60%	15%	80%	3,0	50%	20%	75%	2,5	40%	25%	709
8	7,5												
9	8,0											1	
10 `	8,5											1	2.
11	9,0												
12	9,5											1.00	
13	10,0	4,0	50%	15%	75%	3,5	40%	20%	70%			A CONTRACTOR	
14	10,5												
15	11,0												
16	11,5									inch.	A dec 25	10000	a Mars.
17	11,5								1	SEL CONTRACTOR	红 一 5		
18	12,5					14 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						4.41	
1	12,5												
1		4,5	45%	20%	75%								
1						18.95							
24													
25													
1													
1	12,5	5,0	40%	25%	75%								
1										14.1		4.4	
32						1	1 27 12			100	1.	100	

### Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan KDH : Koefisien Dasar Hijau KTB: Koefisien Tapak Basemen

### Catatan

- Jarak bebas samping untuk bangunan rapat pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran di Wilayah Pengembangan Tengah Pusat (WP-TP) mulai lantai pertama sampai dengan lantai ke delapan diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
- 2. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran hanya di Wilayah Pengembangan Tengah Timur (WP-TT), Wilayah Pengembangan Tengah Barat (WP-TB), Wilayah Pengembangan Utara (WP-U), Wilayah Pengembangan Selatan Utara (WP-SU) dan Kawasan Sistim Pusat Kegiatan Utama mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke empat diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari empat lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
- 3. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan permukiman khusus rumah tinggal di semua Wilayah Pengembangan mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke dua diperkenankan nol, dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari dua lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas dan mengikuti ketentuan bangunan lainnya.

Tabel 05
INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
BANGUNAN UMUM DAN CAMPURAN
DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20%
UNTUK TYPE BANGUNAN RAPAT / DERET

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

WETINGGIAN	JARAK BEBAS		PAD	TAC			KURANG	PADAT			TIDAK PADAT			
KETINGGIAN BANGUNAN	SAMPING / BELAKANG	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	
1	4,0	0,7	75%	10%	85%	0,6	60%	15%	80%	0,5	50%	20%	75%	
2	4,5	1,5				1,2				1,0				
3	5,0	2,2				1,8				1,5				
4	5,5	3,0				2,4				2,0				
5	6,0													
6	6,5													
7	7,0	3,5	60%	15%	80%	3,0	50%	20%	75%	2,5	40%	25%	70%	
8	7,5													
9	8,0									723.4				
10	8,5									3		1		
11	9,0													
12	9,5													
13	10,0	4,0	50%	15%	75%	3,5	40%	20%	70%	-	1	SALE P	100	
14	10,5													
15	11,0									1351				
16	11,5									140(4.2)			a Mar.	
17	11,5							1	1. 2.	15 Sit	1997年			
18	12,5					La S. Vig. 1.						1-1-		
1	12,5											Mar He		
1		4,5	45%	20%	75%	4						- 1		
- 1						10.45								
24						-			3	- 1				
25														
1										1				
1	12,5	5,0	40%	25%	75%	1.								
						.*						1		
32							1			7.	1	120 /		

# Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan KDH : Koefisien Dasar Hijau KTB: Koefisien Tapak Basemen

### Catatan

- Jarak bebas samping untuk bangunan rapat pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran di Wilayah Pengembangan Tengah Pusat (WP-TP) mulai lantai pertama sampai dengan lantai ke delapan diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
- 2. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran hanya di Wilayah Pengembangan Tengah Timur (WP-TT), Wilayah Pengembangan Tengah Barat (WP-TB), Wilayah Pengembangan Utara (WP-U), Wilayah Pengembangan Selatan Utara (WP-SU) dan Kawasan Sistim Pusat Kegiatan Utama mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke empat diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari empat lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
- 3. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan permukiman khusus rumah tinggal di semua Wilayah Pengembangan mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke dua diperkenankan nol, dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari dua lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas dan mengikuti ketentuan bangunan lainnya.

				ASUM / IFASOS )
250 JIWA 1.250 JIWA 2.500 JIWA 3.000 JIWA	15.000 JIWA 30.000 JIWA JIWA	120.000 JIWA 200.000 JIWA	480.000 JIWA 1,5 JUTA JIWA	JENIS FASU M / FASO
Taman Kanak-Kanak @ 500 M	SMTP (15 lokal) @ 4.000 M, SMTP (10 lokal) @ 2.900 M,  SMTA (10 lokal) @ 4.800 M, SMTA (10 lokal) @ 3.000 M,  Perpustakaan @ 500 M,  Perpustakaan @ 3.000 M,	Akademi @ 5.000 M, Perpustakaan @ 1.000 M,	Perguruan Tinggi @ 20.000 M. Perpustakaan @ 2000 M.	PEN DIDIKAN
Pos Kesehatan/Balai pengobatan @ 200 M,  Balai kesehatan @ 100 M,	Puskesmas Kelurahan	Puskesmas Kec/Balai Pengobatan @ 2.400 M,  R.S Pembantu Type C @ 10.000 M,	R.S Wilayah Type B @ 45,000 M, R.S Gawat Darurat @ 30,000 M,	KES EHATAN
Musholla @ 300 M, Musholla @ 160 M,	Masjid Kelurahan @ 2.000 M,  Tempat Ibadah Lainnya @ 2.000 M,  Masjid @ 1.000 M,  Tempat Ibadah Lainnya @ 1.000 M,	Masjid Kecamatan @ 5.000 M, Tempat Ibadah Luin @ 1.600 M,  Masjid @ 12.000 M,	Masjid Wilayah @ 20.000 M, Tempat Ibadah Lainnya @ 5.000 M,	PERI BADATAN
Balai Warga / gedung Serbaguna @ 400 M,  Balai warga @ 250 M,	Karang Taruna/Gd. Serbaguna @ 500 M, Gedung serbaguna @ 650 M,	Balai Rakyat/Ged. Serba Guna @ 2.000 M,  Panti Latihan Kerja @ 1.000 M,  Panti Sosial @ 500 M,  Ged. Jumpa Bakti/Serba Guna @ 10.000 M,	Ged. Pertemuan Umum @ 5.000 M,	BIN A SOSIAL
Tempat bermain @ 250 m,  Tempat bermain @ 200 m,  I.apangan Olahraga/ Tempat Bermain/Taman @ 1.500 M,  Taman Warga @ 750 M,	Lapangan Olahraga ② 8.400 M, Gedung Olahraga ② 1.000 M, Kolam Renang ② 1.000 M, Bioskop ② 2.000 M, Taman — ② 1.500 M, Taman Lingkungan ② 2.000 M, Lapangan Olahraga ③ 6.000 M, Gedung Olahraga ③ 6.000 M,	Lap. Serbaguna @ 10.000 M, Taman @ 10.000 M, Gedung Olahraga @ 10.000 M  Stadion Mini @ 50.000 M2  Museum @ 30.000 M2  Ged. Olah seni @ 3.000 M2  Bigskop/Theater @ 3.000 M2	Komp. Olahraga dan Gelanggang Olahraga @ 70.000 M, Ged. Hiburan & Rekreasi @ 6.000 M, Bioskop @ 4.000 M, Gedung Kesenian @ 10.000 M, Taman Kota @ 50.000 M, Gedung Seni Tradisional @ 5.000M,	OLAHRAGA REKREASI
Pos Keamanan, Gardu/ Listrik, Telepon Umum Bus Surat, T. Sampah @ 400 M, Pos Keamanan, dli @ 175 M,	Kantor Kelurahan	Kantor Kecamatan	Kantor Perserintahan @ 25.000 M Kantor Pos wilayah @ 6.000 M, Kantor Kowilko @ 4.000 M, Kantor Kodim @ 3.500 M, Kantor Telkom Wilayah & 5.000 M, Kantor DDAM Wilayah & 5.000 M, Kantor Urusan Agama @ 3.000 M, Marwil Kebakaran @ 3.000 M,	PELAYANAN PEMERINTAH
Warung @ 100 M,  Warung @ 50 M,  Perbelanjaan/Pertokoan Mini @ 3.600 M,  Pertokoan @ 1.000 M.	Pasar Lingkungan @ 10.000 M, Pasar lingkungan/Pertokoan @ 650 M,  Pasar/Pertokoan @ 10.000 M,	Pusat perbelanjaan / pasar @ 36.000 M,		PERB ELANJAAI NIAGA
Pangkalan/Parkir Umum @ 400 M, Pangkalan Kendaraan Umum @ 300 M, SUB UNIT KAWASAN PERENCANAN	Pangkalan/Parkir Umum @ 2.000 M,	Terminal Transit \$\top 8.000 \text{ M}, \text{Parkir Umum} \$\tag{13.500 \text{ M}},		TRAINSPORTA

KETERANGAN: Luas bangunan (M²) fasilitas umum dan fasilitas sosial menurut standar menengah
Luas lahan (M²) fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan reduksi 30% pada PSL Padat, 15% pada PSL Kurang Padat

GUBERNUR KEPALA DAER AH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I.AMPIRAN II PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1999 TANGGAL 28 JULI 1999

#### DAFTAR LAMPIRAN II

Gambar 01.	PETA WILAYAH	PENGEMBANGAN	KOTA	DAERAH	KHUSUS	IBUKOTA	
	IAKARTA						

- Gambar 02. PETA RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Gambar 03. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010
- Gambar 04. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN HIJAU
- Gambar 05. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PROSPEKTIF
- Gambar 06. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT KEGIATAN
- Gambar 07. PETA RENCANA JARINGAN KERETA
- Gambar 08. PETA RENCANA JARINGAN JALAN DAN TERMINAL
- Gambar 09. PETA PEMBATASAN LALU LINTAS DAN PENGGUNAAN MODA ANGKUTAN
- Gambar 10. PETA ARAHAN LOKASI PELABUHAN LAUT
- Gambar II. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SUMBER AIR
- Gambar 12. PETA PENGEMBANGAN PENGENDALIAN BANJIR DAN DRAINASE
- Gambar 13. PETA RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
- Gambar 14. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT Gambar 15. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010
- KOTAMADYA JAKARTA UTARA

  Gambar 16. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010
- KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 17. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN Gambar 18. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010
- KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

  Gambar 19 PETA ARAHAN PENCANA PENANEAATAN PHANG KOTAMADYA
- Gambar 19. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 20. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 21. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 22. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN IANG KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

- Gambar 23 PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 24. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA PUSAT
- Gambar 25. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA UTARA
- Gambar 26. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA BARAT
- Gambar 27 PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA SELATAN
- Gambar 28. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKA RTA TIMUR
- Gambar, 29. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 30. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambai 31. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 32. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- Gambar 33. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 34. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA
- Gambar 35. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 36. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 37. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- Gambar 38. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 39. PETA ARAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
- Gambar 40. PETA USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RUSUN (RSS)
- Gambar 41. PETA STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG SUNGAI DAERAH KHUSUS IBUKUTA JAKARTA
- Gambar 42. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA PUSAT Gambar 43. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA
- UTARA

  UTARA
- Gambar 44. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 45. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA
  SELATAN
- Gambar 46. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMAD¥A JAKARTA TIMUR